



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Statistik Produksi

2025



BADAN PUSAT STATISTIK



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Statistik Produksi

2025



BADAN PUSAT STATISTIK

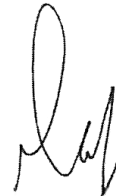
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dalam mewujudkan visi dan misi, serta mencapai sasaran kinerja tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi. Di dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025 serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi di Tahun 2025. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan bahan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi di masa yang akan datang.

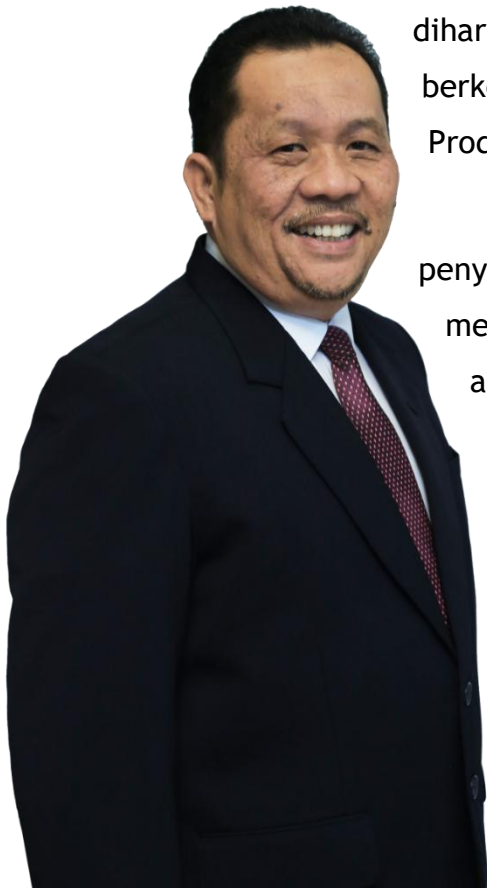
Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan laporan ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 19 Januari 2026
Deputy Bidang Statistik Produksi,



M. Habibullah

NIP.196706191989011001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Deputy Bidang Statistik Produksi	2
1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran.....	3
1.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	3
1.3.2 Dukungan Anggaran	7
1.4 Potensi dan Permasalahan	7
1.5 Sistematika Penyajian Laporan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Visi dan Misi Badan Pusat Statistik (BPS).....	13
2.2 Target Kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi Tahun 2025-2029....	16
2.3 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi Tahun 2025.....	18
2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025.....	19
2.4.1 Prioritas Nasional.....	19
2.4.2 Prioritas Presiden.....	21
2.4.3 Isu Strategis Nasional	21
2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Deputy Bidang Statistik Produksi Tahun 2025	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29

3.1	Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Deputy Bidang Statistik Produksi Tahun 2025	30
3.1.1	Perbandingan Capaian Kinerja Total Selama 2023-2025	30
3.1.2	Nilai Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) 2025	33
3.1.3	Perbandingan Capaian Kinerja dan Rekomendasi Perbaikan ...	35
3.1.4	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2023-2025	36
3.1.5	Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025	38
3.2	Capaian Kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi Terhadap Target Renstra.....	56
3.3	Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	57
3.3.1	Prioritas Nasional.....	58
3.3.2	Prioritas Presiden.....	66
3.3.3	Isu Strategis Nasional	70
3.4	Prestasi dan Inovasi Deputy Bidang Statistik Produksi.....	88
3.4.1	Prestasi.....	88
3.4.2	Inovasi.....	95
3.5	Realisasi dan Efisiensi Anggaran.....	101
BAB IV	PENUTUP.....	109
4.1	Kesimpulan	109
4.2	Rekomendasi Perbaikan Kinerja	110
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Dukungan Anggaran Kegiatan Deputi Bidang Statistik Produksi7
Tabel 2.1	Target Kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi (DBSP) Tahun 2025-2029 17
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025 .. 18
Tabel 2.3	Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025 27
Tabel 3.1	Capaian Kinerja per Indikator Tahun 2023-2025..... 32
Tabel 3.2	Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2025 34
Tabel 3.3	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2023-2025 37
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025 38
Tabel 3.5	Realisasi Capaian Hasil Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi oleh Pengguna Data (<i>TPD_{Sp} – u</i>) menurut Dimensi Tahun 2025 ... 43
Tabel 3.6	Capaian Kinerja IKU 1.2.0.1 Tahun 2025..... 43
Tabel 3.7	Daftar Publikasi/Laporan yang Dihasilkan oleh Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025 44
Tabel 3.8	Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) K/L Mitra Tahun 2023 dan 2024 53
Tabel 3.9	Capaian Kinerja IKU 2.2.0.1 Tahun 2025..... 54
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Renstra 56
Tabel 3.11	Daftar Kendala dan Solusi Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan..... 60
Tabel 3.12	Daftar Kendala dan Solusi Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan..... 62

Tabel 3.13	Daftar Kendala dan Solusi Pembinaan Statistik Sektor Statistik Industri	65
Tabel 3.14	Daftar Kendala dan Solusi Survei KSA dan Ubinan Padi	67
Tabel 3.15	Daftar Kendala dan Solusi Survei Kesejahteraan Petani	71
Tabel 3.16	Daftar Kendala dan Solusi Survei KSA Padi dan KSA Jagung.....	76
Tabel 3.17	Daftar Kendala dan Solusi Pendataan Komoditas Bawang Putih....	77
Tabel 3.18	Daftar Kendala dan Solusi Penyediaan Data Komoditas Daging Lembu	81
Tabel 3.19	Daftar Kendala dan Solusi Kegiatan Statistik Perikanan	85
Tabel 3.20	Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Direktorat Tahun 2025	101
Tabel 3.21	Catatan Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Direktorat Tahun 2025	102
Tabel 3.22	Realisasi Anggaran per Sasaran Menurut Direktorat Tahun 2025 ..	103
Tabel 3.23	Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2025	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Sebaran Pegawai Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025 Menurut Unit Kerja 4
Gambar 1.2	Komposisi Pegawai Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025 Menurut Tingkat Pendidikan 5
Gambar 1.3	Sebaran Pegawai Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025 Menurut Golongan Kepangkatan 5
Gambar 1.4	Komposisi Pegawai Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025 Menurut Jabatan Fungsional 6
Gambar 3.1	Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025 31
Gambar 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2024 dan 2025..... 35
Gambar 3.3	Dokumentasi Survei KSA Padi 69
Gambar 3.4	Dokumentasi Survei KSA Padi 69
Gambar 3.5	Penghargaan Terbaik III dalam Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Kategori Unit Kerja Eselon II BPS Pusat 89
Gambar 3.6	Penghargaan Unit Kerja Eselon II BPS Pusat dengan Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025 yang dinyatakan Berkualitas (STPHP)..... 89
Gambar 3.7	Penghargaan Pengelolaan Arsip di Lingkup Unit Kerja dengan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 (STPHP)..... 90
Gambar 3.8	Penghargaan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI 90
Gambar 3.9	Penghargaan dari Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional (STPHP)..... 90
Gambar 3.10	Penghargaan dari Asosiasi Gula Indonesia..... 91
Gambar 3.11	Penghargaan dari Asosiasi Teh Indonesia..... 91

Gambar 3.12	Penghargaan atas Dedikasi dan Kontribusi Terbaik dalam Mendukung Pelaksanaan EPSS BPS pada Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Kategori Unit Kerja Eselon II BPS Pusat.....	92
Gambar 3.13	Penghargaan Unit Kerja Eselon II BPS Pusat dengan Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025 yang dinyatakan Berkualitas (SP2K)	92
Gambar 3.14	Penghargaan Pengelolaan Arsip di Lingkup Unit Kerja dengan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 (SP2K).....	93
Gambar 3.15	Penghargaan Insan Statistik Teladan Tahun 2025	93
Gambar 3.16	Penghargaan dari Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional	93
Gambar 3.17	Penghargaan Terbaik II dalam Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Kategori Unit Kerja Eselon II BPS Pusat	94
Gambar 3.18	Inovasi CAPI SI-UTAN	96
Gambar 3.19	<i>Sharing Knowledge Agriculture Statistics</i>	97
Gambar 3.20	<i>Sharing Knowledge Seminar Multilateral RRT</i>	97
Gambar 3.21	<i>Sharing Knowledge Tesis S2</i>	97
Gambar 3.22	<i>Sharing Knowledge Investasi Emas</i>	98

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Susunan Organisasi Deputy Bidang Statistik Produksi..... 115
Lampiran 2	Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 116
Lampiran 3	Jumlah Pegawai Unit Kerja Deputy Bidang Statistik Produksi Menurut Unit Organisasi dan Tingkat Pendidikan Tahun 2025..... 121
Lampiran 4	Jumlah Pegawai Unit Kerja Deputy Bidang Statistik Produksi Menurut Unit Organisasi dan Golongan Kepangkatan Tahun 2025 122
Lampiran 5	Jumlah Pejabat Fungsional Unit Kerja Deputy Bidang Statistik Produksi Tahun 2025 123
Lampiran 6	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi Tahun 2025 125
Lampiran 7	Daftar Dokumen Pemerintah yang Digunakan sebagai Dasar Hitung Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS) 129
Lampiran 8	Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) 2025 sebagai Rujukan dalam Penghitungan Realisasi Kinerja Tw III dan IV 2025 Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Deputy Bidang Statistik Produksi 132
Lampiran 9	Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-237/02000/TS.160/2025 Tanggal 7 Mei 2025 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 135
Lampiran 10	Daftar Kementerian/Lembaga (K/L) Mitra Unit Kerja Deputy Bidang Statistik Produksi Target Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025 137
Lampiran 11	Keputusan Kepala BPS Nomor 741 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023..... 143
Lampiran 12	Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024..... 148

Lampiran 13	Daftar Prestasi/Penghargaan Unit Kerja Deputi Bidang Statistik Produksi Menurut Unit Kerja Eselon II Tahun 2025	153
Lampiran 14	Daftar Inovasi Unit Kerja Deputi Bidang Statistik Produksi Menurut Unit Kerja Eselon II Tahun 2025	155
Lampiran 15	Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Unit Kerja Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025	156

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Deputi Bidang Statistik Produksi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik pertanian, kelautan, peternakan dan perikanan, kehutanan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi;
2. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik pertanian, kelautan, peternakan dan perikanan, kehutanan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi;
3. pelaksanaan pengembangan statistik pertanian, kelautan, peternakan dan perikanan, kehutanan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi; dan
4. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja 2025.

Evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Deputi Bidang Statistik Produksi memperlihatkan capaian kinerja yang baik. Pada tahun 2025, rata-rata capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi sebesar 103,35 persen. Penghitungan didasarkan pada skala penilaian yang digunakan sebagai acuan, dapat dikatakan kategori capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi tahun 2025 sudah berhasil mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja per indikator, seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi tahun 2025 mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Statistik Produksi melalui peran aktif dalam berbagai forum nasional dan internasional, komunikasi, koordinasi dan diplomasi (KKD) dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan *stakeholders* terkait, serta prestasi yang diraih dan inovasi yang dikembangkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang Statistik Produksi telah berjalan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra BPS, serta sekaligus telah mampu melaksanakan Misi BPS dengan baik. Sedangkan pelaksanaan program Deputi Bidang Statistik Produksi tahun 2025 dibiayai melalui APBN dengan nilai pagu sebesar Rp 2.310.714.000 dimana realisasinya mencapai Rp 2.110.046.691 atau sebesar 91,32 persen.

Efisiensi anggaran yang dicapai oleh Deputi Bidang Statistik Produksi pada tahun 2025 adalah sebesar 1,13. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Deputi Bidang Statistik Produksi telah berada dalam kategori “efisien”, dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 91,32 persen dan capaian kinerja sebesar 103,35 persen. Hal tersebut tercermin dari nilai capaian kinerja yang lebih tinggi dari realisasi anggarannya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah azas akuntabilitas. Azas tersebut menyatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada awal tahun 2025, Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai tahun 2025 harus dicapai secara efektif, efisien, transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, khususnya kepada lembaga pengawas dan penilai akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi, maka Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025 adalah perwujudan dari kewajiban Deputi Bidang Statistik Produksi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi di tahun yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang telah dicapai.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Deputy Bidang Statistik Produksi kepada Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan;
2. Sebagai laporan kinerja tahunan yang merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja yang selanjutnya digunakan untuk pengambilan keputusan, dan penetapan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan; dan
4. Mengevaluasi capaian kinerja, tujuan, dan sasaran Deputy Bidang Statistik Produksi selama tahun 2025.

1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Deputy Bidang Statistik Produksi

Tugas Deputy Bidang Statistik Produksi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, air bersih, dan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Deputy Bidang Statistik Produksi BPS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi;
2. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi;
3. pelaksanaan pengembangan statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi; dan
4. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPS.

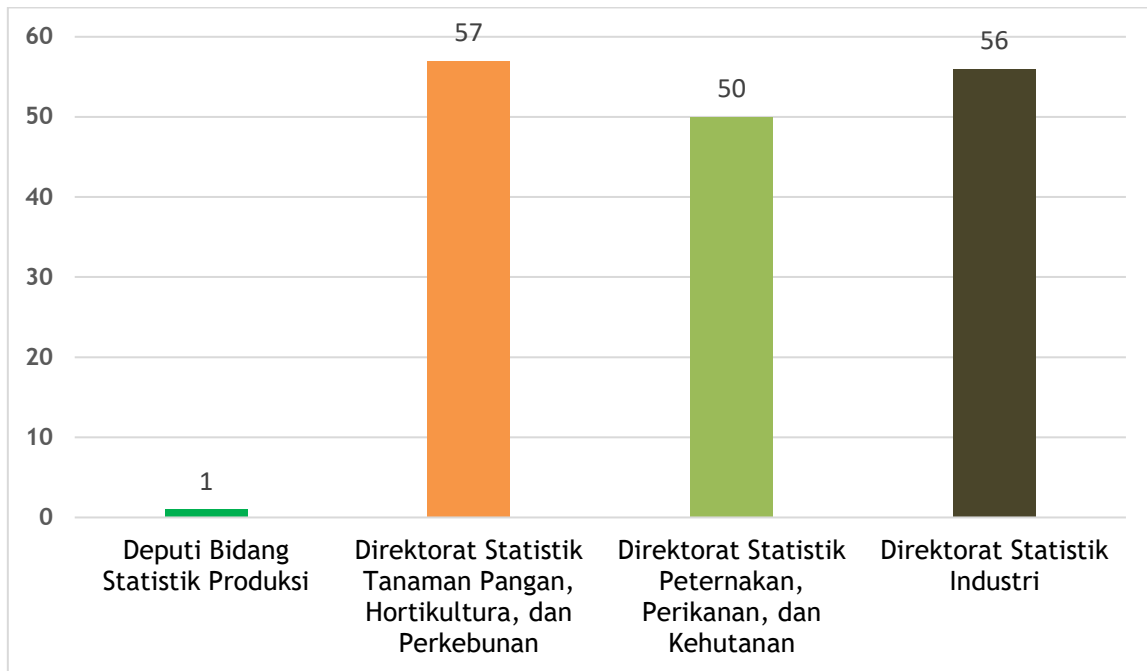
Susunan organisasi BPS berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Deputi Bidang Statistik Produksi dipimpin oleh Deputi yang membawahi 3 (tiga) Direktorat yaitu:

1. Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
2. Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
3. Direktorat Statistik Industri.

1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

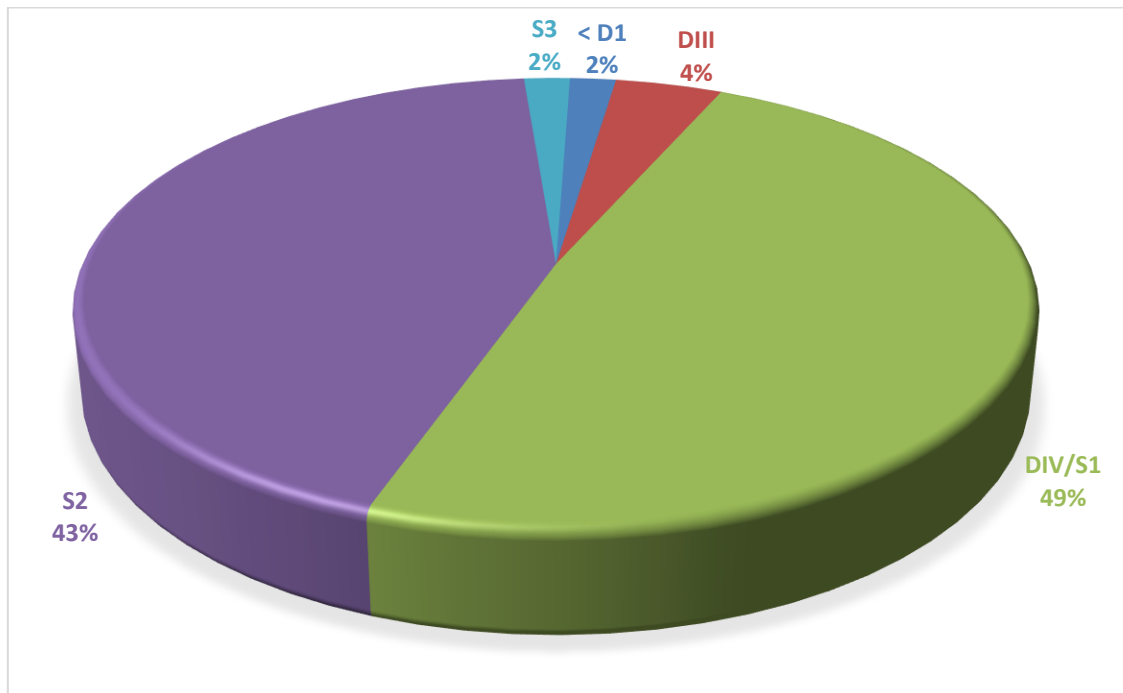
1.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada akhir tahun 2025, SDM Deputi Bidang Statistik Produksi berjumlah 164 pegawai. Jumlah SDM tahun 2025 mengalami penambahan sebanyak 8 pegawai jika dibandingkan dengan tahun 2024. Berdasarkan sebaran jumlah pegawai menurut unit kerja, jumlah pegawai di lingkungan Deputi Bidang Statistik Produksi dapat dirinci sebagai berikut: 1 orang Deputi Bidang Statistik Produksi, 57 pegawai di Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 50 pegawai di Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, dan 56 pegawai di Direktorat Statistik Industri. Jumlah pegawai terbanyak ada di Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Secara umum, sebaran pegawai di lingkungan Deputi Bidang Statistik Produksi menurut unit kerja cukup merata sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1.



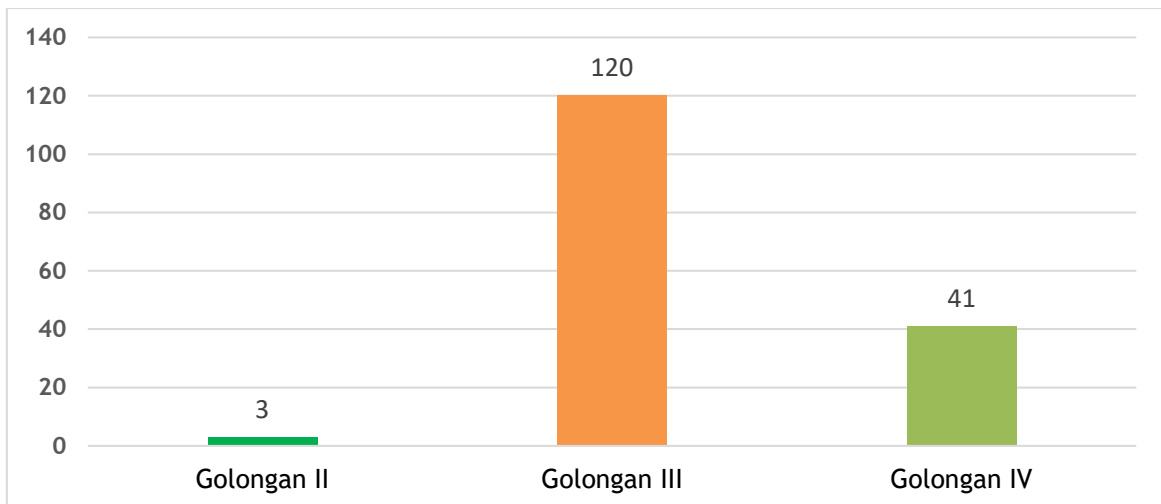
Gambar 1.1 Sebaran Pegawai Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025 Menurut Unit Kerja

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai di lingkungan Deputi Bidang Statistik Produksi didominasi oleh pegawai berpendidikan DIV/S1. Secara rinci, jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah pegawai berpendidikan terakhir S3 sebanyak 3 orang, berpendidikan terakhir S2 sebanyak 71 orang, berpendidikan terakhir DIV/S1 sebanyak 80 orang, berpendidikan terakhir Diploma III sebanyak 7 orang, dan berpendidikan terakhir Diploma 1 atau di bawahnya sebanyak 3 orang. Dari data tersebut, sebanyak 93,90 persen pegawai memiliki pendidikan DIV/S1 ke atas. Dengan komposisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM di lingkungan Deputi Bidang Statistik Produksi sangat baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai sasaran Deputi Bidang Statistik Produksi. Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.2.



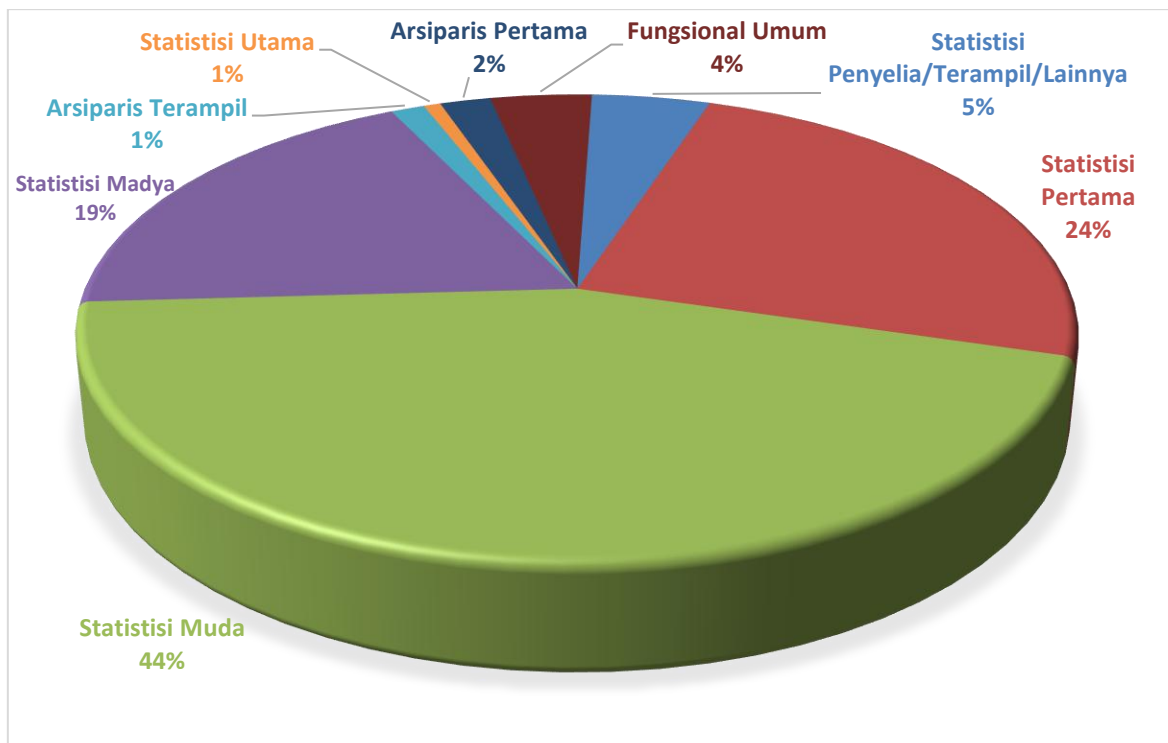
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Deputy Bidang Statistik Produksi Tahun 2025 Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan sebaran jumlah pegawai di lingkungan Deputy Bidang Statistik Produksi menurut golongan kepangkatan, yaitu 3 pegawai golongan II, 120 pegawai golongan III, dan 41 pegawai golongan IV. Jumlah pegawai terbanyak adalah pegawai golongan III. Secara umum, sebaran pegawai Deputy Bidang Statistik Produksi menurut golongan kepangkatan dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Sebaran Pegawai Deputy Bidang Statistik Produksi Tahun 2025 Menurut Golongan Kepangkatan

Berdasarkan jabatan fungsional, pegawai di lingkungan Deputi Bidang Statistik Produksi didominasi oleh pegawai statistisi ahli muda. Secara rinci, jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional adalah pegawai fungsional statistisi ahli sebanyak 137 orang (pertama 38 orang, muda 69 orang, madya 29 orang, dan utama 1 orang), pegawai fungsional statistisi penyelia/lainnya sebanyak 7 orang, pegawai fungsional arsiparis terampil sebanyak 1 orang, pegawai fungsional arsiparis pertama sebanyak 3 orang, dan pegawai fungsional umum sebanyak 6 orang. Dari data tersebut, sebanyak 64,29 persen pegawai memiliki jabatan fungsional ahli muda ke atas. Dengan komposisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM di lingkungan Deputi Bidang Statistik Produksi sangat baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai sasaran Deputi Bidang Statistik Produksi. Komposisi pegawai menurut jabatan fungsional dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025 Menurut Jabatan Fungsional

1.3.2 Dukungan Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Deputi Bidang Statistik Produksi melaksanakan kegiatan di bidang statistik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, air bersih, dan konstruksi yang mengacu pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui APBN dengan rincian seperti pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Dukungan Anggaran Kegiatan Deputi Bidang Statistik Produksi

Kegiatan	Pagu Setelah Self Blocking
(1)	(2)
2904 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi	Rp560.090.000
2909 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Rp734.221.000
2910 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp1.016.403.000
Deputi Bidang Statistik Produksi	Rp2.310.714.000

Keterangan: Pagu berdasarkan POK Aplikasi BackOffice (Notula Rapat Monitoring Kinerja/Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Unit Kerja DBSP)

1.4 Potensi dan Permasalahan

Peranan data statistik produksi sangat penting dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, masyarakat menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*). Selain itu, *stakeholders* terkait menginginkan ketersediaan data sampai level wilayah terkecil dan berbasis spasial untuk pengambilan kebijakan yang lebih operasional. Hal tersebut menjadi fokus utama Deputi Bidang Statistik Produksi untuk menyediakan data secara lebih cepat,

akurat, dan berbasis spasial yang dapat diakses publik dengan mudah melalui *website* BPS.

Untuk mewujudkan data produksi yang lebih cepat, akurat, dan berbasis spasial, berikut dijabarkan identifikasi potensi yang dimiliki oleh Deputi Bidang Statistik Produksi:

1. Deputi Bidang Statistik Produksi memiliki SDM yang berkualitas dari sisi pendidikan yaitu 93,90 persen pegawai memiliki pendidikan DIV/S1 ke atas. Hal ini memberikan dampak positif dalam penyediaan data statistik produksi yang berkualitas, berdampak, dan terpercaya.
2. Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 menunjukkan bahwa kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh 3 unit kerja Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Statistik Produksi telah berkualitas. Sedangkan hasil Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS) Tahun 2025 Deputi Bidang Statistik Produksi dalam rangka peningkatan pemanfaatan data statistik produksi berkualitas dan *insight* dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sebesar 89,57 persen.
3. Deputi Bidang Statistik Produksi melaksanakan kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) yang merupakan amanat Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dimana BPS berperan sebagai Pembina Data Statistik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan statistik sektoral K/L Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi yang berkualitas.
4. Deputi Bidang Statistik Produksi telah mengimplementasikan teknologi terkini dalam pengumpulan dan pengolahan data berbasis *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) dan *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI). Beberapa aplikasi kegiatan statistik produksi yang menggunakan moda CAPI atau CAWI, seperti aplikasi KSA Padi untuk tanaman padi, Sedia Data Perusahaan Perkebunan (SEDAPP ONLINE), Aplikasi Sistem Informasi Pendataan Perusahaan Kehutanan (SIUTAN) untuk perusahaan kehutanan, dan aplikasi FASIH Survei Kesejahteraan Pertanian (SKP) 2025.

5. Deputi Bidang Statistik Produksi berperan aktif dalam forum-forum statistik tingkat nasional dan internasional dengan mengirimkan perwakilan sebagai narasumber maupun peserta dalam *training*, *workshop*, dan seminar, antara lain Pelatihan Pembina Statistik Sektoral, Pelatihan Asesor Kompetensi, *Workshop* Registrasi Risiko melalui Aplikasi MARI TEMEN, *Workshop* Pengukuran Kualitas Kegiatan Statistik 2025, Webinar Hari Statistik Nasional (HSN) 2025, *FAO-Food Loss Index Training*, *FAO-Training on Data Dissemination*, dan berbagai kegiatan lainnya.
6. Data statistik produksi telah dijadikan rujukan dalam rangka penyusunan kebijakan di berbagai K/L dan *stakeholders*. Hal tersebut dibuktikan dengan dilibatkannya Deputi Bidang Statistik Produksi sebagai narasumber dalam beberapa acara, seperti *Fullday* Penguatan pendataan Kawasan Ekonomi Khusus - Kawasan Industri, Sosialisasi Metode Indeks SKP 2025 bersama Pakar, dan berbagai kegiatan lainnya.

Berdasarkan hasil rapat monitoring capaian Renstra tahun 2025, permasalahan atau kendala yang dihadapi unit kerja Deputi Bidang Statistik Produksi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, antara lain:

1. Permasalahan/kendala dalam rangka mencapai sasaran “Peningkatan Pemanfaatan Data dan *Insight* Statistik Produksi yang Berkualitas”
 - a. Sinkronisasi jadwal kegiatan statistik produksi;
 - b. Keterlambatan dalam pengiriman data dan disagregasi data belum sampai level terkecil;
 - c. *Response rate* masih relatif rendah, terutama dari responden perusahaan;
 - d. Belum adanya ukuran kualitas data yang dihasilkan oleh unit kerja di lingkup Deputi Bidang Statistik Produksi;
 - e. Data hasil Survei Industri Besar Sedang bulanan mempunyai tingkat *margin of error* (MOE) sebesar 27 persen dan level estimasinya hanya sampai level nasional, sementara kebutuhannya adalah estimasi sampai level provinsi 2 digit KBLI; dan

- f. Permintaan K/L atas data individu statistik produksi yang belum bisa terpenuhi.
2. Permasalahan/kendala dalam rangka mencapai sasaran “Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektor K/L Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi yang Berkualitas”
 - a. Penguatan substansi materi untuk setiap indikator yang akan dinilai;
 - b. Sinkronisasi jadwal pembinaan dengan K/L Mitra;
 - c. BPS sebagai pembina statistik sektoral perlu mendapatkan masukan untuk perbaikan ke depan terkait penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektor;
 - d. Perbedaan persepsi tim Pembina Statistik Sektor (PSS) BPS dan tim Penilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) BPS; dan
 - e. Restrukturisasi Kementerian/Lembaga (K/L) Mitra.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Dalam laporan ini berisi 4 bab dan lampiran-lampiran yang saling berkaitan, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Deputi Bidang Statistik Produksi, sumber daya manusia (SDM) dan dukungan anggaran, potensi dan permasalahan, serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi visi dan misi BPS, target kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi 2025-2029, Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi tahun 2025, Dukungan BPS terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional tahun 2025, serta rencana kerja dan anggaran Deputi Bidang Statistik Produksi tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi realisasi, capaian kinerja, dan nilai Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Deputi Bidang Statistik Produksi tahun 2025, Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi terhadap target Rencana Strategis (Renstra) 2025, capaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional tahun 2025, prestasi dan inovasi Deputi Bidang Statistik Produksi tahun 2025, serta realisasi dan efisiensi anggaran Deputi Bidang Statistik Produksi tahun 2025.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja. Pada bab ini diuraikan kesimpulan terhadap capaian kinerja, permasalahan, dan kendala utama tahun 2025, serta resume rekomendasi perbaikan kinerja atau rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan Deputi Bidang Statistik Produksi pada periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Badan Pusat Statistik (BPS)

Visi dan Misi BPS 2025-2029 dirumuskan dengan memperhatikan isu strategis kelembagaan BPS yang berpengaruh pada peran dan posisi dalam penyediaan statistik resmi berkualitas untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Perumusan ini juga selaras dengan arah kebijakan di dalam RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan delapan Misi Asta Cita dan 17 Program Prioritas.

Isu-isu strategis kelembagaan tersebut disampaikan dalam uraian berikut:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan atas Pasal 5 Ayat 1, memberikan mandat kepada BPS untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pengukuran Indikator 5 (lima) Sasaran Visi dan 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP).
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. BPS berperan dalam mendukung Transformasi Digital Nasional melalui penyediaan data digital yang andal serta digitalisasi proses bisnis statistik.
3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Cooperation and Development*). Keputusan tersebut memberikan mandat kepada BPS untuk menjadi Koordinator Bidang Statistik dan Data.
4. Adanya gejolak ekonomi global, peningkatan ketegangan geopolitik, perkembangan teknologi informasi, arus data yang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, disrupsi Revolusi Industri 4.0, dinamika ekonomi

domestik, dan perubahan fokus program-program pembangunan pemerintah. Hal tersebut mewajibkan BPS untuk senantiasa menyediakan statistik resmi yang berkualitas dan mampu memberikan wawasan bagi pengguna, khususnya dalam pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan pemerintah.

5. BPS berperan penting dalam menyediakan indikator yang menggambarkan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Namun, potensi politisasi terhadap indikator ini dapat menimbulkan bias, serta mengganggu stabilitas nasional dan pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, BPS harus menjaga independensi dengan mengedepankan objektivitas dan netralitas indikator statistik dalam setiap kegiatan statistik agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan terbebas dari intervensi kepentingan politik.

Dengan adanya isu-isu strategis kelembagaan tersebut, maka Visi BPS 2025-2029 adalah “Lembaga yang **Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif** dalam Mendukung Perumusan **Kebijakan Berbasis Data** Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, BPS merumuskan tiga Misi yang saling terintegrasi sebagai panduan langkah ke depan. Misi BPS 2025-2029 yaitu: **Misi 1: Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan**

Misi ini merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi BPS. Data statistik yang berkualitas dan *insight* yang mendalam sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data. Dengan menyediakan data yang berkualitas, BPS memastikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil keputusan yang efektif dan terarah. Hal ini sejalan dengan Visi BPS untuk menjadi lembaga yang tepercaya dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional. Data yang berkualitas juga menjadi bukti konkret dari independensi BPS karena dihasilkan melalui metodologi yang ilmiah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

Misi 2: Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

Misi ini bertujuan untuk memperkuat peran BPS sebagai lembaga statistik utama di Indonesia yang mengoordinasikan dan memimpin seluruh kegiatan statistik nasional. Dengan memperkuat kepemimpinan dalam SSN, BPS mengoordinasi agar seluruh data yang dihasilkan oleh berbagai instansi dan lembaga di Indonesia memenuhi standar yang sama, konsisten, dan dapat diintegrasikan. Hal ini mendukung Visi BPS untuk menjadi lembaga yang independen dan terpercaya karena koordinasi yang baik dalam SSN akan menciptakan data yang konsisten dan terstandar, serta memastikan transparansi dalam proses pengumpulan dan penyajian data. Selain itu, kepemimpinan yang kuat dalam SSN juga memperkuat peran aktif BPS dalam mendukung kebijakan berbasis data.

Misi 3: Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Statistik yang Efektif dan Efisien

Keberhasilan Misi 1 dan Misi 2 membutuhkan kelembagaan yang tangguh. Untuk itu, BPS berfokus pada pengembangan SDM yang unggul, optimalisasi tata kelola organisasi, dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Melalui efektivitas dan efisiensi, BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

Melalui keterpaduan ketiga misi tersebut, BPS berkomitmen untuk menjembatani kebutuhan data nasional dengan perumusan kebijakan yang strategis dan berbasis data. Dengan demikian, Visi BPS sebagai lembaga independen, terpercaya, dan berperan aktif dapat terwujud secara konsisten memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, BPS menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis yang saling mendukung, yang dirancang untuk memastikan keberhasilan dalam setiap aspek penting dari operasionalnya.

Tujuan 1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan *Insight* yang Relevan.

Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS).

Tujuan 2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien.

Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Tujuan 3: Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik.

Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Dengan sinergi ketiga tujuan ini, BPS mampu memantapkan posisinya sebagai lembaga independen, tepercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data sebagai perwujudan Visi Presiden.

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja untuk setiap tujuan, BPS menetapkan tiga sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan;

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu; dan

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional.

Dalam mewujudkan sasaran ini, terdapat sejumlah tantangan dan risiko yang harus diwaspadai. Melalui manajemen risiko yang efektif, BPS dapat menjaga dan meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, sehingga mendukung terwujudnya kinerja yang bersih, akuntabel, dan profesional. Upaya ini mencakup penguatan pengawasan internal, pengembangan SDM, inovasi layanan publik, dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang konsisten.

Sampai dengan Laporan Kinerja (LAKIN) 2025 ini disusun, visi, misi, dan tujuan di level Deputi Bidang Statistik Produksi belum bisa ditetapkan.

2.2 Target Kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025-2029

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang

telah ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2025-2029, Deputi Bidang Statistik Produksi dalam menjalankan tugasnya mengacu pada Renstra BPS 2025-2029 guna mencapai tujuan jangka panjang BPS yang sekaligus mencapai tujuan pemerintah.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai target kinerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala, dan risiko yang ada atau yang mungkin muncul. Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Renstra BPS Tahun 2025-2029, target kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Target Kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi (DBSP) Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis BPS	Indikator Kinerja DBSP	Satuan	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan 1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> yang Relevan							
	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi	Persen	83,95	84,35	84,75	85,35	85,95
2	Tujuan 2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien							
	Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/ Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	16,32	27,05	35,03	40,71	45,10

2.3 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025

Pada awal tahun telah ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dipantau setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Renstra BPS Tahun 2025-2029, target Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis BPS	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> yang Relevan			
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi	Persen	83,95
Tujuan 2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien			
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik produksi dan menerapkan hasil pembinaan (%)	Persen	16,32

2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

2.4.1 Prioritas Nasional

Sebagai turunan Undang-Undang No. 59 Tahun 2024, diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Mengacu pada peraturan tersebut, BPS memiliki peranan mendukung Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Salah satu Prioritas Nasional yang didukung adalah Agenda Transformasi Tata Kelola khususnya pada Proyek Prioritas “Penyediaan Data Pembangunan”. Selain itu, BPS juga berperan untuk mendukung enam Rincian Output Prioritas, salah satunya mengenai Pembinaan Statistik Sektoral.

Sejalan dengan Visi BPS 2025-2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan.

Deputi Bidang Statistik Produksi memiliki peran dalam kaitannya dengan penyelenggaraan statistik sektoral yaitu sebagai pengarah dalam rangka melakukan pembinaan secara berkala dan evaluasi kepada wali data dan produsen

data K/L Mitra, serta melakukan komunikasi, koordinasi, dan diplomasi (KKD) kepada unit kerja eselon I K/L Mitra terkait. Adapun K/L Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam penyelenggaraan Statistik sektoral adalah K/L Mitra yang ditentukan oleh Sekretariat Pembinaan untuk setiap Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Statistik Produksi. K/L Mitra yang dibina sesuai surat Plt. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Nomor B-11/03000/ES/2025 Tanggal 30 Januari 2025 Perihal Penyampaian Lokus Pembinaan Statistik Sektoral berjumlah 19 (sembilan belas) K/L, yaitu:

1. Kementerian Pertanian
2. Badan Pangan Nasional
3. Kementerian ATR/BPN
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Badan Keamanan Laut
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Kementerian Kehutanan
10. Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH
11. Majelis Permusyawaratan Rakyat
12. Dewan Perwakilan Rakyat
13. Dewan Perwakilan Daerah
14. Kementerian Pekerjaan Umum
15. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Kementerian Perindustrian
17. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
18. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Badan Pengusahaan Batam
19. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2.4.2 Prioritas Presiden

Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah, Beras dalam Negeri, serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dilakukan melalui dua kegiatan statistik utama, yaitu Survei KSA Padi dan Survei Ubinan Padi. Survei KSA Padi mencakup seluruh lahan pertanian, baik sawah maupun bukan sawah, dilaksanakan di 38 provinsi dan 488 kabupaten/kota, dengan metode pengumpulan data berbasis survei (*sampling*) menggunakan moda CAPI. Sebanyak 281.817 titik amatan dipantau setiap bulan oleh 7.572 petugas dengan metode pengamatan langsung di lapangan.

Sementara itu, Survei Ubinan Padi dilakukan untuk memperoleh data produktivitas melalui pengukuran langsung pada 78.626 sampel plot ubinan, dilaksanakan setiap empat bulan oleh petugas BPS. Survei ubinan padi menggunakan pendekatan area berbasis Kerangka Sampel Area (KSA) dengan menggunakan titik pengamatan pada subsegmen KSA sesuai fase pertumbuhan padi. Dengan melibatkan peranan teknologi terkini sehingga data produksi padi yang dikumpulkan menjadi lebih akurat, cepat dan tepat waktu. Kedua survei dilengkapi dokumentasi foto kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas. Dalam rangka menindaklanjuti Inpres ini, Deputi Bidang Statistik Produksi berperan sebagai pengarah serta melakukan komunikasi, koordinasi, dan diplomasi (KKD) kepada unit kerja eselon I K/L terkait (seperti Rapat Koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional) dalam rangka pembahasan serta pelaksanaan kegiatan Survei KSA Padi dan Survei Ubinan Padi.

2.4.3 Isu Strategis Nasional

➤ Survei Kesejahteraan Petani (SKP)

Survei Kesejahteraan Petani (SKP) merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan BPS. Survei ini dilakukan untuk menghasilkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai instrumen pengukuran berbasis data yang mencerminkan kondisi kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian (RTUP). Cakupan survei meliputi 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota

dengan populasi responden RTUP pada enam subsektor pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei berbasis sampling dengan moda *Computer-Assisted Personal Interviewing* (CAPI), menggunakan metode wawancara oleh 3.022 Petugas Pendataan Lapangan dan Petugas Pemeriksaan Lapangan. Dalam penyelenggaraan kegiatan SKP tersebut, Deputy Bidang Statistik Produksi berperan sebagai pengarah dari sisi teknis dan administrasi, serta mendorong kajian-kajian yang lebih mendalam untuk penguatan kualitas data SKP yang dihasilkan.

➤ **Sensus Ekonomi Tahun 2026 (SE2026)**

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, salah satu kegiatan sensus BPS adalah Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk tahun berakhir angka 6. Direktorat Statistik Industri memiliki peran strategis dalam pendekatan Kantor Pusat untuk persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 (SE2026) di tahun 2025 dan mendukung keberhasilan pelaksanaan SE2026 di tahun 2026, khususnya pada pendataan unit usaha yang termasuk dalam kategori sebagai berikut:

1. B (Pertambangan dan Penggalian);
2. C (Industri Pengolahan);
3. D (Pengadaan Listrik dan Gas);
4. E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang); dan
5. F (Konstruksi).

Usaha berbadan hukum dalam lingkup kegiatan statistik industri didominasi oleh perusahaan berskala menengah dan besar dengan struktur organisasi terpusat serta jaringan cabang yang luas, yang umumnya menerapkan SOP internal yang ketat dan memerlukan arahan formal dari manajemen pusat sebelum memberikan data. Dalam konteks tersebut, kunjungan Kantor Pusat perusahaan untuk perolehan surat dukungan menjadi salah satu strategi utama yang selaras dan menjadi bagian penting dalam optimalisasi peran Deputy Bidang Statistik Produksi dalam mendukung suksesnya SE2026.

Pendekatan ini diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan *response rate* sensus secara signifikan. Selain itu, pendekatan Kantor Pusat memungkinkan

untuk menjangkau lebih banyak unit usaha secara lebih efisien. Pendekatan ini juga mendukung peningkatan kualitas dan konsistensi data, karena arahan yang bersifat terpusat mendorong keseragaman pemahaman responden terhadap konsep, definisi, dan variabel SE2026. Kunjungan Kantor Pusat perusahaan yang dilakukan tidak hanya berfungsi untuk memperoleh surat dukungan pelaksanaan SE2026, tetapi juga menjadi momentum strategis dalam perolehan, validasi, dan pemutakhiran direktori usaha.

Penguatan pendataan Kawasan Ekonomi Khusus - Kawasan Industri juga perlu dilakukan dalam rangka menyongsong SE2026. Percepatan pertumbuhan sektor industri nasional merupakan salah satu pilar utama dalam transformasi ekonomi Indonesia. Salah satu strategi yang terbukti efektif dalam mendorong kinerja industri adalah strategi aglomerasi, yaitu pengembangan industri dengan mengkonsentrasikan perusahaan-perusahaan yang saling terkait dalam suatu wilayah tertentu, seperti Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan-kawasan tersebut dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan mampu mendorong hilirisasi industri, peningkatan nilai tambah, serta pemerataan investasi antarwilayah.

Lebih lanjut, BPS mencatat bahwa sekitar separuh Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nasional dihasilkan dari aktivitas industri yang berlokasi di KEK dan KI. Besarnya kontribusi sektor industri, yang diiringi pertumbuhan sektor-sektor penunjang di kawasan tersebut, menunjukkan potensi besar KEK dan KI dalam mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju struktur ekonomi bernilai tambah tinggi. Hasil pendataan di beberapa wilayah menunjukkan bahwa keberadaan KEK dan KI tidak hanya meningkatkan aktivitas produksi, tetapi juga mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kapasitas produksi, serta masuknya investasi baru. BPS juga menemukan bahwa perusahaan yang beroperasi di dalam KEK dan KI rata-rata memiliki tingkat produktivitas dan nilai output yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan sejenis di luar kawasan. Kondisi ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai, kemudahan regulasi, serta akses logistik yang lebih efisien.

Penguatan data statistik kawasan industri tidak terlepas dari sinergi lintas kementerian dan lembaga. Kerjasama antara BPS dengan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan Nasional KEK, Kementerian Perindustrian, serta Himpunan Kawasan Industri (HKI) semakin memperkuat penyediaan dan pemutakhiran data statistik kawasan. SE2026 diharapkan dapat memotret secara komprehensif kontribusi KEK dan KI terhadap perekonomian Indonesia. Dari sisi persiapan, Deputi Bidang Statistik Produksi memandang perlu dilaksanakan pertemuan koordinasi dengan para pemangku kepentingan utama guna merumuskan strategi pendataan SE2026, khususnya di wilayah KEK dan KI. Pertemuan tersebut melibatkan Menteri Perindustrian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan Nasional KEK, pengelola KEK dan KI, serta Kepala BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/Kota yang wilayahnya memiliki KEK dan KI. Masing-masing pihak diharapkan memberikan telaah mengenai peran dan kontribusinya dalam meningkatkan efektivitas KEK dan KI sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat penyusunan kerangka sampel industri yang lebih akurat, memperbarui direktori perusahaan di kawasan, serta menghasilkan indikator statistik yang lebih kredibel mengenai kontribusi KEK dan KI terhadap perekonomian nasional dan regional. Sebagai penutup, pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi komitmen bersama untuk mendukung keberhasilan pendataan SE2026, sekaligus memperkuat peran statistik industri dalam perumusan kebijakan pembangunan industri yang berbasis data dan berorientasi pada keberlanjutan.

Dalam penyelenggaraan kegiatan SE2026 tersebut, Deputi Bidang Statistik Produksi berperan sebagai pengarah pada persiapan kegiatan Sensus Ekonomi yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, seperti pengarahan dalam penyusunan proses bisnis dan manajemen lapangan kegiatan pendataan lengkap SE2026, serta sosialisasi kegiatan SE2026 bersama Komisi X DPR RI di berbagai daerah.

➤ **Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK telah melalui beberapa tahapan penting. Pada tahap perencanaan, telah dilakukan pembahasan metodologi neraca arus energi dan emisi GRK berbasis

System of Environmental Economic Accounts (SEEA) Central Framework. Selain itu, telah dilakukan koordinasi oleh Direktorat Statistik Industri sebagai Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) terkait di BPS dan K/L, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bank Indonesia untuk memastikan kesesuaian konsep serta ketersediaan data. Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan pengumpulan dan integrasi data dari berbagai sumber kompilasi produk administratif (kompromin).

Dalam penyusunan neraca ini, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Direktorat Statistik Industri selaku PJK melakukan dukungan berupa penyusunan Publikasi Neraca Energi. Data komoditas energi dalam neraca energi setiap tahunnya akan di serahkan ke Direktorat Neraca Produksi sebagai bahan dalam penyusunan Publikasi Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK. Koordinasi terus dilakukan antar direktorat agar output yang dihasilkan berkualitas sehingga konsumen pengguna data dapat memperoleh manfaat dari publikasi tersebut. Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, Deputi Bidang Statistik Produksi berperan sebagai pengarah untuk mendorong pengembangan indikator-indikator baru di bidang energi dalam rangka kegiatan penyusunan Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

➤ **Data Komoditas Gula, Pergaraman, Jagung, Beras, Daging Lembu, Perikanan, Bawang Putih**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 61 Tahun 2024 mengenai Neraca Komoditas serta Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, telah dilakukan kegiatan penyediaan data komoditas pangan strategis sebagai bahan evaluasi ketersediaan pasokan pangan nasional. Aktivitas ini berfokus pada pengumpulan, penyusunan, dan penyediaan data yang akurat untuk mendukung perencanaan kebutuhan pasokan dan memastikan stabilitas pangan nasional. Neraca Komoditas adalah sistem data terintegrasi yang memuat informasi produksi dan konsumsi komoditas tertentu secara nasional untuk periode waktu tertentu, berfungsi sebagai dasar penerbitan izin ekspor-impor, acuan

pengembangan industri, serta data bagi pelaku usaha, yang bertujuan untuk membuat proses perdagangan lebih transparan dan berbasis data. Perpres Nomor 7 Tahun 2025 adalah Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas, yang mengatur koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas pangan (gula, garam, jagung, beras, daging sapi, perikanan, bawang putih) dan non-pangan menggunakan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) dalam kerangka *Indonesia National Single Window* (INSW) untuk mempercepat perizinan ekspor-impor. Peraturan ini memperbarui kerangka kerja untuk pengawasan dan pengendalian komoditas strategis di bawah koordinasi Menteri Koordinator Pangan dan Menteri Koordinator Perekonomian.

BPS berperan sebagai pembina statistik mempunyai kewajiban untuk melakukan pendampingan/asistensi dalam pelaksanaan Pendataan Usaha Garam dan memastikan seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan proses bisnis statistik, yaitu *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM), yang dimulai dari tahap persiapan, pendataan lapangan, pengolahan, diseminasi, dan evaluasi kegiatan.

Direktorat Statistik Industri sebagai unit kerja teknis di lingkup Deputi Bidang Statistik Produksi melakukan Pembinaan Pendataan Usaha Garam 2025 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdasarkan Surat Deputi Bidang Statistik Produksi nomor B-35/05000/PR.110/2025 tanggal 4 Juli 2025. Pendataan Usaha Garam bertujuan untuk menyediakan data produksi garam rakyat sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan, khususnya subsektor pergaraman sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk kegiatan usaha garam serta mendukung program nasional ketahanan garam, baik untuk konsumsi maupun industri.

Dalam penyediaan data komoditas tersebut, Deputi Bidang Statistik Produksi berperan menjadi pengarah dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan Pengumpulan Data Luas Panen Tanaman Pangan, Survei Ubinan Tanaman Pangan, Pendataan Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB), Pendataan Laporan Triwulanan Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan (PP/TPI), Pendataan Laporan Triwulanan Perndaratan Ikan Tradisional (PIT), Pendataan Tahunan

Perusahaan Budidaya Ikan (LTB), Pendataan Tahunan Perusahaan Penangkapan Ikan (LTP), dan Pendampingan Pendataan Usaha Garam.

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, rencana kerja Deputi Bidang Statistik Produksi didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Adapun alokasi anggaran BPS yang ada di Deputi Bidang Statistik Produksi pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025

Rencana Kerja	Pagu Total (Perjanjian Kinerja)	Pagu yang Dapat Digunakan (Sebelum Tambahan Anggaran)	Pagu yang Dapat Digunakan (Setelah Tambahan Anggaran)
(1)	(2)	(3)	(4)
2904 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	Rp. 5.995.116.000	Rp. 257.356.000	Rp560.090.000
2909 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Rp. 2.912.442.000	Rp. 170.177.000	Rp734.221.000
2910 Penyediaan dan pengembangan Statistik Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan	Rp. 5.804.569.000	Rp. 310.613.000	Rp1.016.403.000
Deputi Bidang Statistik Produksi	Rp. 14.712.127.000	Rp. 738.146.000	Rp2.310.714.000

Keterangan: Pagu berdasarkan POK Aplikasi BackOffice (Notula Rapat Monitoring Kinerja/Capaian Kinerja Triwulan I 2025 Unit Kerja DBSP) dan POK Aplikasi SAKTI (Notula Rapat Monitoring Kinerja/Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Unit Kerja DBSP)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Deputy Bidang Statistik Produksi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja untuk memonitor pencapaian kinerja pada perjanjian kinerja, membandingkan antara rencana kinerja dengan capaian pada setiap indikator kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/kegiatan di masa yang akan datang. Analisis kinerja terdiri dari keberhasilan, kegagalan, tingkat efisiensi, hambatan/kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif untuk lebih meningkatkan kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi di masa yang akan datang.

Analisis capaian kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi meliputi evaluasi kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja, solusi yang telah dilakukan, serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar capaian kinerja di tahun berikutnya meningkat. Analisis capaian kinerja yang disajikan pada laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi Tahun 2025;
2. Capaian Kinerja BPS Terhadap Target Renstra;
3. Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025;
4. Prestasi dan Inovasi Deputy Bidang Statistik Produksi; dan
5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran.

3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025

3.1.1 Perbandingan Capaian Kinerja Total Selama 2023-2025

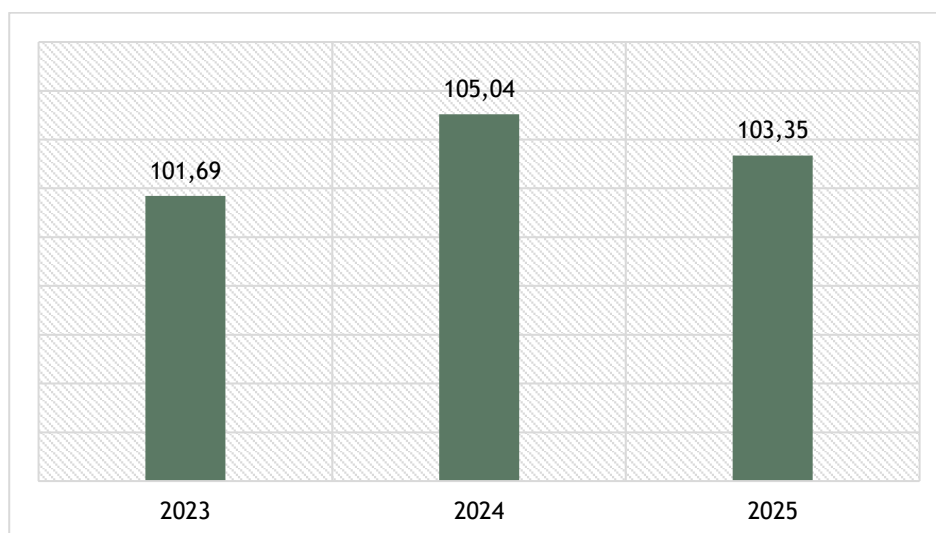
Pada tahun 2023-2024, Deputi Bidang Statistik Produksi menetapkan 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) sasaran strategis. Tujuan pertama adalah “Menyediakan data Statistik Produksi yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan”. Tujuan pertama ini menggambarkan komitmen Deputi Bidang Statistik Produksi untuk terus meningkatkan kualitas data dalam rangka penyediaan data yang digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Tujuan pertama dicapai dengan 1 (satu) sasaran strategis, yaitu “Meningkatnya ketersediaan Data Statistik Produksi yang berkualitas”, yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu “Persentase pengguna data yang menggunakan data statistik Produksi sebagai dasar pembangunan nasional” dan “Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas Statistik Bidang Produksi”. Tujuan yang kedua adalah “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan statistik bidang produksi melalui SSN”. Tujuan kedua dicapai dengan 1 (satu) sasaran strategis, yaitu “Penguatan statistik sektoral K/L/D/I”, dengan didukung oleh indikator kinerja utama yaitu “Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaan”. Tujuan kedua ini adalah peran serta Deputi Bidang Statistik Produksi dalam mewujudkan SSN yang andal, sefektif dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas.

Selanjutnya pada tahun 2025, ditetapkan 2 (dua) tujuan baru dengan 2 (dua) sasaran strategis. Tujuan pertama adalah “Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan *Insight* yang Relevan”. Tujuan tersebut dicapai dengan 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Peningkatan Pemanfaatan Data dan *Insight* Statistik Produksi” yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu “Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi”. Sementara itu, tujuan kedua adalah “Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien”. Tujuan kedua tersebut dicapai dengan 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi

yang Berkualitas” yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu “Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral”.

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama yang telah ditetapkan tersebut, selama tahun 2023-2025, Deputi Bidang Statistik Produksi memperoleh capaian kinerja total di atas 100 persen. Capaian kinerja total tersebut dihitung berdasarkan rata-rata capaian seluruh indikator kinerja utama pada setiap tahun. Adapun capaian kinerja setiap indikator kinerja utama dihitung melalui persamaan sebagai berikut:

Capaian kinerja setiap indikator kinerja utama dihitung melalui perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi realisasi kinerja dibandingkan dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerja yang dihasilkan. Sebaliknya, apabila realisasi kinerja lebih rendah dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja yang dihasilkan juga akan lebih rendah.



Gambar 3.1 Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Berdasarkan Gambar 3.1, selama tahun 2023-2025 Deputi Bidang Statistik Produksi telah berhasil mencapai seluruh tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pada setiap awal tahun. Capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi pada tahun 2023 mencapai sekitar 101,69 persen, kemudian meningkat menjadi 105,04 persen pada tahun 2024, dan selanjutnya menurun menjadi 103,25 persen pada tahun 2025.

Penurunan capaian kinerja pada tahun 2025 antara lain dipengaruhi oleh adanya perubahan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama dibandingkan dengan tahun 2023-2024, sehingga basis pengukuran kinerja pada tahun 2025 tidak sepenuhnya sebanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, capaian kinerja tahun 2025 tetap berada di atas 100 persen, yang menunjukkan bahwa Deputi Bidang Statistik Produksi tetap mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun. Adapun capaian kinerja per indikator selama tahun 2023-2025 disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja per Indikator Tahun 2023-2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan: Menyediakan Data Statistik Produksi yang Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan				
Sasaran Strategis: Meningkatkan ketersediaan Data Statistik Produksi yang berkualitas	Persentase Pengguna Data yang Menggunakan Data Statistik Produksi Sebagai Dasar Pembangunan Nasional	106,29	102,07	N/A
	Persentase Konsumen yang Merasa Puas dengan Kualitas Statistik Bidang Produksi	97,29	106,39	N/A
Tujuan: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan Statistik Bidang Produksi Melalui SSN				
Sasaran Strategis: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang Mendapatkan Pembinaan Statistik Produksi dan Menerapkan Hasil Pembinaan	101,51	106,67	N/A
Tujuan: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> yang Relevan				
Sasaran Strategis: Peningkatan Pemanfaatan Data dan <i>Insight</i> Statistik Produksi yang Berkualitas	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi	N/A	N/A	106,69
Tujuan: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien				

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Strategis: Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi yang Berkualitas	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektor	N/A	N/A	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja		101,69	105,04	103,35

Keterangan: N/A (Belum dijadikan indikator)

3.1.2 Nilai Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) 2025

Berdasarkan Surat Plt. Inspektur Wilayah I Nomor T-118/08100/PW.120/LHE/2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025 (Lihat Lampiran 6), hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar 74,15 dengan predikat BB. Predikat tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Statistik Produksi berada pada kategori Sangat Baik.

Sehubungan dengan predikat akuntabilitas BB tersebut, koreksi capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 22 Tahun 2024 adalah sebesar 10 persen. Di sisi lain, capaian kinerja setiap indikator Deputi Bidang Statistik Produksi tahun 2025 (Lihat Tabel 3.1) kurang dari 110 persen sehingga tidak dilakukan normalisasi. Oleh karena itu, penghitungan nilai Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

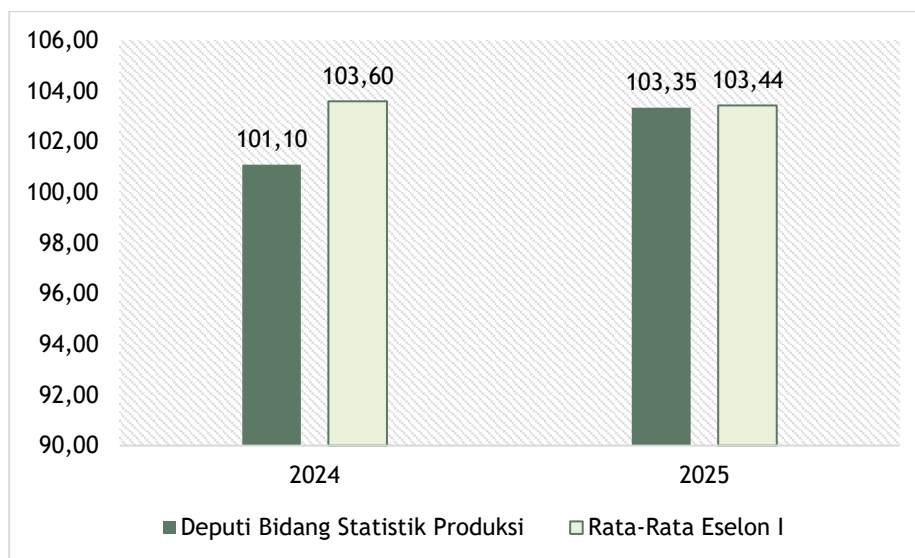
Tabel 3.2 Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penilaian Kinerja Organisasi		
		Normalisasi Capaian PK (%)	Koreksi Normalisasi Capaian PK (%)	Nilai Akhir Capaian PK $k(3) \times (100\% - k(4))$ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> yang Relevan				
Sasaran Strategis 1.2.0: Peningkatan Pemanfaatan Data dan <i>Insight</i> Statistik Produksi yang Berkualitas				
IKU 1.2.0.1:				
Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi	106,69	106,69	10	96,03
Tujuan 2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien				
Sasaran Strategis 2.2.0: Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi yang Berkualitas				
IKU 2.2.0.1:				
Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial	100,00	100,00	10	90,00
Total Capaian PK				186,03
NKO Rata-Rata Capaian PK				93,01
Predikat PKO				BAIK

Berdasarkan Tabel 3.2, Deputi Bidang Statistik Produksi memperoleh total capaian Penilaian Kinerja (PK) sebesar 186,03 persen dengan Nilai Kinerja Output (NKO) rata-rata capaian PK sebesar 93,01 persen, serta memperoleh Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) berpredikat “BAIK” sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024.

Pencapaian tersebut mencerminkan tingkat efektivitas Deputi Bidang Statistik Produksi dalam merealisasikan sasaran strategis yang telah ditetapkan, sekaligus menunjukkan akuntabilitas yang kuat dalam pelaksanaan program kerja sepanjang tahun berjalan. Predikat “BAIK” yang diperoleh menginterpretasikan bahwa tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi sudah sangat baik dan sesuai dengan ekspektasi, serta menunjukkan bahwa Deputi Bidang Statistik Produksi telah berhasil merealisasikan seluruh indikator kinerja utama secara sangat efektif.

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dan Rekomendasi Perbaikan



Gambar 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2024 dan 2025

Berdasarkan Gambar 3.2, Deputi Bidang Statistik Produksi memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Eselon I lainnya di BPS. Meskipun demikian, capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi tahun 2025 sudah optimal yang ditunjukkan dengan realisasi capaian kinerja lebih dari 100 persen. Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 2,23 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Deputi Bidang Statistik Produksi mampu mencapai bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil tersebut, Deputi Bidang Statistik Produksi mengidentifikasi beberapa upaya perbaikan kinerja yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Meningkatkan upaya dalam penyediaan data statistik produksi yang berkualitas serta *insight* yang relevan, khususnya sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data;
2. Meningkatkan upaya dalam penyediaan publikasi/laporan statistik produksi yang berkualitas; dan
3. Meningkatkan upaya pembinaan statistik sektoral ke Kementerian/Lembaga Mitra.

3.1.4 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2023-2025

Pada Tabel 3.3 disajikan target, realisasi, serta capaian kinerja per sasaran Deputy Bidang Statistik Produksi tahun 2023-2025. Berdasarkan Tabel 3.3 diketahui bahwa terdapat perbedaan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja antara periode 2023-2024 dan tahun 2025. Namun demikian, capaian kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi per indikator selama tahun 2023-2025 pada umumnya berada di atas 100 persen, kecuali pada sasaran “Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Produksi yang Berkualitas” untuk indikator kedua, yaitu “Persentase Konsumen yang Merasa Puas dengan Kualitas Statistik Bidang Produksi” pada tahun 2023, yang memperoleh capaian kinerja sebesar 97,29 persen. Capaian kinerja yang belum mencapai 100 persen tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui berbagai upaya peningkatan kualitas statistik produksi dan layanan kepada pengguna, sehingga pada tahun 2024 capaian kinerja pada indikator yang sama meningkat menjadi 106,39 persen.

Selanjutnya, jika ditinjau berdasarkan sasaran strategis, selama tahun 2023-2025, seluruh sasaran strategis Deputy Bidang Statistik Produksi berhasil menunjukkan capaian kinerja di atas 100 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Statistik Produksi selama tahun 2023-2025 secara umum telah berjalan efektif dan optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan.

Tabel 3.3 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2023-2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sasaran 1. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Produksi yang Berkualitas								101,79	104,23	N/A
Persentase Pengguna Data yang Menggunakan Data Statistik Produksi Sebagai Dasar Pembangunan Nasional	Persen	91,00	96,72	N/A	96,72	98,72	N/A	106,29	102,07	N/A
Persentase Konsumen yang Merasa Puas dengan Kualitas Statistik Bidang Produksi	Persen	89,00	90,00	N/A	86,59	95,75	N/A	97,29	106,39	N/A
Sasaran 2. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I								101,51	106,67	N/A
Persentase K/L/D/I yang Mendapatkan Pembinaan Statistik Produksi dan Menerapkan Hasil Pembinaan	Persen	75,00	100,00	N/A	76,13	106,67	N/A	101,51	106,67	N/A
Sasaran 3. Peningkatan Pemanfaatan Data dan Insight Statistik Produksi yang Berkualitas								N/A	N/A	106,69
Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi	Persen	N/A	N/A	83,95	N/A	N/A	89,57	N/A	N/A	106,69
Sasaran 4. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi yang Berkualitas								N/A	N/A	100,00
Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/ Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	N/A	N/A	16,32	N/A	N/A	16,32	N/A	N/A	100,00

Keterangan: N/A (Belum dijadikan indikator)

3.1.5 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi tahun 2025 dapat dilihat dari keberhasilan dalam merealisasikan seluruh indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap seluruh indikator tujuan dan sasaran strategis, Deputy Bidang Statistik Produksi memperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 103,35 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum seluruh tujuan dan sasaran tahun 2025 telah berhasil dicapai, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil tersebut sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Statistik Produksi sepanjang tahun 2025, serta menunjukkan dukungan kinerja yang optimal dalam pencapaian target kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun rincian capaian kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi tahun 2025 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> yang Relevan					
Sasaran Strategis					
1.2.0:					
Peningkatan Pemanfaatan Data dan <i>Insight</i> Statistik Produksi yang Berkualitas	IKU 1.2.0.1: Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi	Persen	83,95	89,57	106,69
Tujuan 2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien					
Sasaran Strategis					
2.2.0:					
Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Statistik Produksi yang Berkualitas	IKU 2.2.0.1: Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	16,32	16,32	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja					103,35

❖ Capaian Kinerja IKU 1.2.0.1 (Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi)

Tujuan pertama adalah “Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan *Insight* yang Relevan”. Tujuan pertama tersebut dicapai dengan 1 (satu) sasaran strategis, yaitu “Peningkatan Pemanfaatan Data dan *Insight* Statistik Produksi yang Berkualitas”, yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu “Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi”.

Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi (TPDS) adalah indikator yang mengukur sejauh mana data statistik resmi yang dihasilkan atau dipublikasikan oleh Unit Kerja di lingkup Deputi Bidang Statistik Produksi digunakan oleh pihak-pihak yang relevan, seperti pembuat kebijakan, dalam proses perumusan, pengambilan keputusan, atau evaluasi kebijakan nasional. Indikator ini mencerminkan efektivitas distribusi, relevansi, kualitas, dan keberhasilan lembaga dalam menjadikan data statistik resmi yang dipublikasikan Unit Kerja di lingkup Deputi Bidang Statistik Produksi sebagai dasar bagi perumusan kebijakan publik. TPDS dihitung melalui rumus sebagai berikut.

$$TPDS_p = 0,8 \times TPDS_{p-dp} + 0,2 \times TPDS_{p-u}$$

Keterangan:

$TPDS_p$ = Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi

$TPDS_{p-dp}$ = Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi pada dokumen pemerintah

Dokumen pemerintah di sini dibatasi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RJPMD Provinsi), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD Provinsi), serta regulasi pemerintah lainnya (peraturan, keputusan, instruksi) yang memanfaatkan data BPS. Daftar dokumen pemerintah selain RPJPN, RPJMN, Renstra K/L, dan RJPMD Provinsi, dapat mengalami perubahan setiap tahunnya.

$TPDS_{p-u}$ = Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi oleh pengguna data yang diperoleh melalui survei khusus untuk mengukur pemanfaatan data oleh pengguna data

$$TPDS_{p-dp} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i \times Q_i}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P_i = Pemanfaatan Data Statistik Produksi pada dokumen pemerintah ke- i yang akan bernilai 0 jika dokumen tersebut tidak menggunakan data BPS dan akan bernilai 1 jika dokumen tersebut minimal menggunakan satu jenis data yang bersumber dari BPS

Q_i = Kualitas pemanfaatan data pada dokumen pemerintah ke- i yang diukur dari rata-rata relevansi data pada dokumen pemerintah ke- i (R_i) dan kemutakhiran data pada dokumen pemerintah ke- i (U_i).

$$Q_i = 0,5R_i + 0,5U_i$$

Keterangan:

R_i = Relevansi data pada dokumen pemerintah ke- i
 Relevansi ini akan bernilai 1 jika minimal 50 persen dari jenis data BPS yang digunakan memiliki kesesuaian dengan konteks yang disampaikan dalam narasi dokumen pemerintah. Sebagai contoh, jika suatu dokumen pemerintah menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi dalam konteks pembangunan ekonomi nasional ataupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam konteks pembangunan manusia maka relevansi data akan bernilai 1.
 Relevansi data akan bernilai 0 jika kriteria di atas tidak terpenuhi.

U_i = Kemutakhiran data pada dokumen pemerintah ke- i
 Kemutakhiran ini akan bernilai 1 jika minimal 50 persen dari jenis data BPS yang digunakan merupakan data terkini (*up to date*).
 Kemutakhiran data akan bernilai 0 jika kriteria di atas tidak terpenuhi.

$$TPDS_{p-u} = \frac{\sum_{i=1}^5 \text{Skor responden}_i}{5} \times 100\%$$

Keterangan:

i = Aspek yang diukur dalam survei khusus mengenai pemanfaatan data Statistik Produksi oleh pengguna. Aspek ini meliputi (1) distribusi dan aksesibilitas, (2) relevansi, (3) frekuensi penggunaan, (4) citra dan kepercayaan, dan (5) dampak pada kebijakan.

Berdasarkan surat dari Plt. Sekretaris Utama Nomor B-54/02000/PR.620/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Nilai Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS) 2025 (Lihat Lampiran 7), terdapat sejumlah dokumen pemerintah yang memanfaatkan data produksi BPS pada tahun 2025, diantaranya sebagai berikut:

1. Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Renstra Kementerian Koordinator Bidang Pangan
3. Renstra Kementerian Koperasi
4. RKP Aceh
5. RKP Bali
6. RKP Bengkulu
7. RKP Gorontalo
8. RKP Jawa Tengah
9. RKP Jawa Timur
10. RKP Kalimantan Barat
11. RKP Kalimantan Selatan
12. RKP NTB
13. RKP Sulawesi Barat
14. RKP Sulawesi Tenggara
15. RPJMD Aceh
16. RPJMD Bangka Belitung
17. RPJMD Banten
18. RPJMD Gorontalo
19. RPJMD Jambi
20. RPJMD Jawa Timur
21. RPJMD Kalimantan Selatan

22. RPJMD Kalimantan Tengah
23. RPJMD Kalimantan Utara
24. RPJMD Lampung
25. RPJMD Maluku
26. RPJMD NTB
27. RPJMD NTT
28. RPJMD Riau
29. RPJMD Sulawesi Barat
30. RPJMD Sulawesi Selatan
31. RPJMD Sulawesi Tengah
32. RPJMD Sumatera Barat
33. RPJMD Sumatera Selatan
34. RPJMD Sumatera Utara
35. RPJMN
36. RPJPN (dokumen di ttd September 2024)

Hasil identifikasi dari sisi kualitas (relevansi dan kemutakhiran) untuk dokumen-dokumen di atas memberikan nilai Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi pada dokumen pemerintah ($TPDS_{p-dp}$) tahun 2025 sebesar 93,06 persen. Selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut: http://s.bps.go.id/IKU1_TPDS_2025.

Selanjutnya, dalam surat tersebut juga disampaikan hasil Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi oleh pengguna data yang diperoleh melalui survei khusus untuk mengukur pemanfaatan data oleh pengguna data ($TPDS_{p-u}$) tahun 2025 sebesar 75,65 persen. Nilai tersebut merupakan rata-rata dari berbagai dimensi yang diukur dalam survei khusus mengenai pemanfaatan data Statistik Produksi oleh pengguna (hasil rilis Direktorat Diseminasi Statistik). Dimensi yang dinilai serta realisasi capaian hasil untuk tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Hasil Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi oleh Pengguna Data ($TPDS_{p-u}$) menurut Dimensi Tahun 2025

No	Dimensi	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)
1	Distribusi dan Aksesibilitas	99,68
2	Relevansi	87,87
3	Frekuensi Penggunaan	39,28
4	Citra dan Kepercayaan	89,33
5	Dampak Pada Kebijakan	62,09
$TPDS_{p-u}$		75,65

Berdasarkan data di atas, dapat dihitung realisasi Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi tahun 2025 melalui rumus berikut:

$$TPDS_p = (0,8 \times TPDS_{p-dp}) + (0,2 \times TPDS_{p-u})$$

$$TPDS_p = (0,8 \times 93,06) + (0,2 \times 75,65)$$

$$TPDS_p = 89,57$$

Dengan demikian, capaian kinerja IKU 1.2.0.1 Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi disajikan pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja IKU 1.2.0.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2.0.1 Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi	Persen	83,95	89,57	106,69

Dari hasil pengukuran capaian kinerja IKU 1.2.0.1 diperoleh angka sebesar 106,69 persen yang menandakan bahwa Deputi Bidang Statistik Produksi telah berhasil mencapai bahkan melampaui target IKU 1.2.0.1 pada tahun 2025. Capaian tersebut didukung dengan berbagai upaya strategis yang dilakukan oleh Deputi Bidang Statistik Produksi, yaitu melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga, yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dalam menghasilkan data statistik produksi yang berkualitas, akurat, dan berdampak bagi perumusan kebijakan.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap penyusunan *output* data statistik produksi, Deputi Bidang Statistik produksi juga telah melaksanakan serangkaian kegiatan persiapan yang meliputi penyusunan instrumen pendataan lapangan, kegiatan *briefing*, pelatihan, *workshop*, serta sosialisasi yang melibatkan para pakar dan pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan pendataan lapangan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memantau progres kegiatan agar seluruh tahapan dapat terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Melalui rangkaian proses tersebut, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pengolahan data, Deputi Bidang Statistik Produksi telah berhasil menghasilkan berbagai *output* data statistik produksi yang kemudian didiseminasikan melalui rilis Berita Resmi Statistik (BRS) serta publikasi/laporan. Selama tahun 2025, jumlah publikasi/laporan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- 57 publikasi/laporan (termasuk Berita Resmi Statistik dan 2 publikasi non-ARC) dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- 13 publikasi/laporan dari Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- 27 publikasi/laporan dari Direktorat Statistik Industri.

Tabel 3.7 Daftar Publikasi/Laporan yang Dihasilkan oleh Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025

No	Publikasi/Laporan	Jadwal Terbit
(1)	(2)	(3)
Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
1	BRS Luas Panen dan Produksi Padi ATAP 2024	3 Februari 2025
2	BRS Luas Panen dan Produksi Padi ATAP 2024 English	3 Februari 2025
3	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung ATAP 2024	3 Februari 2025
4	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung ATAP 2024 English	3 Februari 2025
5	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Januari 2025)	3 Maret 2025

No	Publikasi/Laporan	Jadwal Terbit
(1)	(2)	(3)
6	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Januari 2025) English	3 Maret 2025
7	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Januari 2025)	3 Maret 2025
8	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Januari 2025) English	3 Maret 2025
9	Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) 2024 (Non ARC)	17 Maret 2025
10	Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL) 2024 (Non ARC)	17 Maret 2025
11	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Februari 2025)	8 April 2025
12	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Februari 2025) English	8 April 2025
13	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Februari 2025)	8 April 2025
14	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Februari 2025) English	8 April 2025
15	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Maret 2025)	2 Mei 2025
16	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Maret 2025) English	2 Mei 2025
17	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Maret 2025)	2 Mei 2025
18	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Maret 2025) English	2 Mei 2025
19	Ringkasan Eksekutif Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2024 (Angka Tetap) (ARC)	9 Mei 2025
20	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan April 2025)	2 Juni 2025
21	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan April 2025) English	2 Juni 2025
22	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan April 2025)	2 Juni 2025
23	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan April 2025) English	2 Juni 2025
24	Statistik Hortikultura 2024 (ARC)	10 Juni 2025
25	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Mei 2025)	1 Juli 2025
26	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Mei 2025) English	1 Juli 2025
27	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Mei 2025)	1 Juli 2025
28	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Mei 2025) English	1 Juli 2025

No	Publikasi/Laporan	Jadwal Terbit
(1)	(2)	(3)
29	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Juni 2025)	1 Agustus 2025
30	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Juni 2025) English	1 Agustus 2025
31	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Juni 2025)	1 Agustus 2025
32	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Juni 2025) English	1 Agustus 2025
33	Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2024 (ARC)	15 Agustus 2025
34	Luas Panen dan Produksi Jagung di Indonesia 2024 (Non ARC)	15 Agustus 2025
35	Direktori Perusahaan Perkebunan Karet Indonesia 2024 (ARC)	29 Agustus 2025
36	Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2024 (ARC)	29 Agustus 2025
37	Statistik Tanaman Perkebunan Semusim Indonesia 2024 (Tebu dan Tembakau) (ARC)	29 Agustus 2025
38	Statistik Tanaman Perkebunan Tahunan Indonesia 2024 (Kelapa Sawit, Kopi, Kakao, Karet, Teh, dan Komoditas Perkebunan Unggulan) (ARC)	29 Agustus 2025
39	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Juli 2025)	1 September 2025
40	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Juli 2025) English	1 September 2025
41	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Juli 2025)	1 September 2025
42	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Juli 2025) English	1 September 2025
43	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Agustus 2025)	1 Oktober 2025
44	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Agustus 2025) English	1 Oktober 2025
45	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Agustus 2025)	1 Oktober 2025
46	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Agustus 2025) English	1 Oktober 2025
47	Analisis Produktivitas Padi di Indonesia 2024 (Hasil Survei Ubinan) (Non ARC)	1 Oktober 2025
48	Indikator Pertanian 2024 (ARC)	17 Oktober 2025
49	Statistik Perusahaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura Lainnya 2025 ARC)	17 Oktober 2025
50	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan September 2025)	3 November 2025
51	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan September 2025) English	3 November 2025

No	Publikasi/Laporan	Jadwal Terbit
(1)	(2)	(3)
52	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan September 2025)	3 November 2025
53	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan September 2025) English	3 November 2025
54	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Oktober 2025)	1 Desember 2025
55	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Oktober 2025) English	1 Desember 2025
56	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Oktober 2025)	1 Desember 2025
57	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Oktober 2025) English	1 Desember 2025
Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan		
1	Statistik Pemotongan Ternak 2024	14 Mei 2025
2	Statistik Peternakan Sapi Perah 2024	19 Juni 2025
3	Statistik Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil 2024	15 Juli 2025
4	Statistik Produksi Kehutanan 2024	31 Juli 2025
5	Statistik Perusahaan Peternakan Unggas 2024	15 Agustus 2025
6	Statistik Pelabuhan Perikanan Tahun 2024	7 November 2025
7	Statistik Pendaratan Ikan Tradisional Tahun 2024	7 November 2025
8	Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan Tahun 2024	28 November 2025
9	Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan Tahun 2024	28 November 2025
10	Statistik Perusahaan Budidaya Ikan Tahun 2024	5 Desember 2025
11	Statistik Perusahaan Penangkapan Ikan Tahun 2024	5 Desember 2025
12	Statistik Perusahaan Penangkapan Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2024	5 Desember 2025
13	Peternakan Dalam Angka 2025	9 Januari 2026
Direktorat Statistik Industri		
1	Indikator Statistik Konstruksi Triwulan IV 2024	27 Maret 2025
2	Perkembangan Indeks Produksi Industri Mikro dan Kecil 2024	25 Juni 2025

No	Publikasi/Laporan	Jadwal Terbit
(1)	(2)	(3)
3	Indikator Statistik Konstruksi Triwulan I 2025	30 Juni 2025
4	Statistik Industri Manufaktur Indonesia 2023	31 Juli 2025
5	Perkembangan Indeks Produksi Industri Manufaktur 2024	29 Agustus 2025
6	Profil Industri Mikro dan Kecil 2024	16 September 2025
7	Indikator Statistik Konstruksi Triwulan II 2025	30 September 2025
8	Direktori Industri Manufaktur Indonesia 2025	31 Oktober 2025
9	Benchmark Indeks Konstruksi (2016=100), 2018-2023	31 Oktober 2025
10	Benchmark Statistik Konstruksi, 2018-2023	31 Oktober 2025
11	Direktori Perusahaan Pertambangan Besar 2025	19 November 2025
12	Direktori Perusahaan Air Bersih, Listrik, dan Gas 2025	19 November 2025
13	Statistik Industri Manufaktur Produksi 2023	31 Desember 2025
14	Statistik Industri Manufaktur Bahan Baku 2023	31 Desember 2025
15	Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi 2020-2024	31 Desember 2025
16	Statistik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 2020-2024	31 Desember 2025
17	Statistik Pertambangan Bahan Galian Indonesia 2024	31 Desember 2025
18	Statistik Air Bersih 2020-2024	31 Desember 2025
19	Statistik Gas 2020-2024	31 Desember 2025
20	Statistik <i>Captive Power</i> 2025	31 Desember 2025
21	Neraca Energi Indonesia 2020-2024	31 Desember 2025
22	Direktori Perusahaan Konstruksi 2025, Buku I: Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua	31 Desember 2025
23	Direktori Perusahaan Konstruksi 2025, Buku II: Pulau Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku	31 Desember 2025
24	Indikator Konstruksi Triwulan III-2025	31 Desember 2025
25	Konstruksi Dalam Angka 2025	31 Desember 2025

No	Publikasi/Laporan	Jadwal Terbit
(1)	(2)	(3)
26	Statistik Konstruksi 2024	31 Desember 2025
27	Statistik Listrik 2020-2024	31 Desember 2025

Selain capaian kuantitatif tersebut, kualitas statistik yang dihasilkan juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-600/02000/PR.613/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 sebagai Rujukan dalam Penghitungan Realisasi Kinerja Triwulan III dan IV Tahun 2025 (Lihat Lampiran 8), tiga Direktorat di lingkup Deputi Bidang Statistik Produksi berhasil meraih predikat “Berkualitas”. Capaian tersebut mencerminkan komitmen Deputi Bidang Statistik Produksi dalam meningkatkan pemanfaatan data statistik produksi melalui penyediaan data yang tidak hanya memenuhi aspek kuantitas, tetapi juga kualitas, relevansi, dan kebermanfaatan bagi pengguna data yang kemudian mendukung capaian dari IKU 1.2.0.1 Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi.

Namun demikian, dalam mencapai kinerja tersebut masih terdapat **kendala yang dihadapi**, diantaranya:

1. Sinkronisasi jadwal kegiatan statistik produksi.
2. Keterlambatan pengiriman data dan disagregasi data belum sampai level terkecil.
3. *Response rate* masih relatif rendah, terutama dari responden perusahaan.
4. Belum adanya ukuran kualitas data yang dihasilkan oleh unit kerja di lingkup DBSP.
5. Data hasil Survei Industri Besar Sedang bulanan mempunyai tingkat *margin of error* (MOE) sebesar 27 persen dan level estimasinya hanya sampai level nasional, sementara kebutuhannya yaitu estimasi sampai level provinsi 2 digit KBLI.
6. Permintaan Kementerian/Lembaga (K/L) atas data individu statistik produksi yang belum bisa terpenuhi.

Adapun **upaya atau solusi** yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya:

1. Mengatur agenda prioritas.
2. Melakukan komunikasi kepada K/L Produsen Data (*reminder*).
3. Membuat surat Deputi Bidang Statistik Produksi sebagai pengantar untuk pendataan perusahaan dan melakukan monitoring berkala.
4. Mengikuti internalisasi Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) tahun 2025.
5. Meningkatkan cakupan dan memperbaiki metodologi kegiatan Survei Industri Besar Sedang bulanan berkoordinasi dengan Direktorat PMSS.
6. Melakukan kerjasama dengan K/L melalui Nota Kesepahaman/MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Sementara itu, **upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut** kedepannya sebagai berikut:

1. Melanjutkan kerjasama dengan K/L berdasarkan Nota Kesepahaman/ MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
2. Melakukan penguatan SBR melalui *updating frame* survei statistik produksi yang selanjutnya digunakan sebagai *prelist* Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
3. Melakukan kegiatan prioritas statistik produksi seperti SE2026, SKP2026, KSA dan Ubinan, serta kegiatan lainnya.
4. Menyediakan Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) Statistik Industri.

❖ **Capaian Kinerja IKU 2.2.0.1 (Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/ Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral)**

Tujuan kedua adalah “Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral”. Tujuan kedua tersebut dicapai dengan 1 (satu) sasaran strategis, yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi yang Berkualitas”, yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu “Persentase Kenaikan

Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral”.

Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga (K/L) Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral merupakan pertumbuhan rata-rata dari nilai IPS K/L Mitra Unit Kerja Deputi dari tahun dasar (Tahun 2023). Indikator ini merupakan indikator dampak dari keberhasilan dari pembinaan yang sudah dilakukan oleh unit kerja Deputi.

IKU 2.2.0.1 dihitung melalui persamaan sebagai berikut:

$$y = \frac{x_t - x_0}{x_0} \times 100\%$$

Keterangan:

x_t = Nilai Rata-Rata IPS dari K/L Mitra (alokasi baru) pada tahun ke-t

x_0 = Nilai Rata-Rata IPS dari K/L Mitra (alokasi baru) pada tahun dasar (tahun 2023)

K/L Mitra Deputi adalah seluruh K/L Mitra Direktorat di bawah Deputi terkait.

K/L Mitra Direktorat dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah K/L Mitra yang ditentukan oleh Sekretariat Pembinaan untuk setiap Direktorat

Berdasarkan poin ketiga dalam Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-237/02000/TS.160/2025 Tanggal 7 Mei 2025 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 (Lihat Lampiran 9): “Instansi Pemerintah yang memiliki target capaian kinerja pada tahun 2025 dan berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS 2024 sesuai Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagai pemenuhan kinerja”.

Oleh karena itu, nilai realisasi IKU 2.2.01 Deputi Bidang Statistik Produksi tahun 2025 mengikuti hasil EPSS tahun 2024 pada 19 (sembilan belas) K/L Mitra (alokasi baru) yang dibina oleh Direktorat di bawah Deputi Bidang Statistik Produksi sesuai surat Plt. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Nomor B-11/03000/ES/2025 Tanggal 30 Januari 2025 Perihal Penyampaian Lokus Pembinaan Statistik Sektoral (Lihat Lampiran 10), yaitu:

1. Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan membina 7 K/L, yang diantaranya:
 - Kementerian Pertanian
 - Badan Pangan Nasional
 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN)
 - Badan Pemeriksa Keuangan
 - Badan Keamanan Laut
 - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
2. Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan membina 6 K/L, yang diantaranya:
 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - Kementerian Kehutanan
 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH)
 - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
 - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
3. Direktorat Statistik Industri membina 6 K/L yang diantaranya:
 - Kementerian Pekerjaan Umum
 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Kementerian Perindustrian
 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Badan Pengusahaan Batam
 - Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Adapun nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2023 dan 2024 untuk 19 (sembilan belas) K/L Mitra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) K/L Mitra Tahun 2023 dan 2024

No	K/L Mitra	IPS 2023	IPS 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kementerian Pertanian	3,12	3,67
2	Badan Pangan Nasional	2,65	2,83
3	Kementerian ATR/BPN	1,48	2,47
4	Badan Pemeriksa Keuangan	3,01	2,98
5	Badan Keamanan Laut	2,17	2,52
6	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1,67	1,83
7	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*	-	2,65
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2,68	2,73
9	Kementerian Kehutanan**	-	-
10	Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH**	-	-
11	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1,15	1,67
12	Dewan Perwakilan Rakyat	1,51	2,57
13	Dewan Perwakilan Daerah	1,48	1,90
14	Kementerian Pekerjaan Umum**	-	-
15	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman**	-	-
16	Kementerian Perindustrian	2,86	3,05
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2,41	2,08
18	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Badan Pengusahaan Batam	2,22	2,74
19	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1,8	1,96
Rata-rata***		2.1579	2,5100

Keterangan:

*) IPS 2023 tidak tersedia karena PPATK belum melakukan *submit* ke dalam sistem sampai batas waktu yang ditentukan

***) K/L yang terbentuk pada kabinet baru periode 2025-2029

****) Menggunakan nilai rata-rata sebenarnya (bukan hasil pembulatan), agar dapat diperoleh hasil penghitungan yang lebih presisi

Sumber Data:

- Keputusan Kepala BPS Nomor 741 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lihat Lampiran 11)
- Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Lihat Lampiran 12)

Realisasi IKU 2.2.0.1 tahun 2025 dapat dihitung melalui persamaan sebagai berikut:

$$y = \frac{x_t - x_0}{x_0} \times 100\%$$

$$y_{I-2025} = \frac{2,5100 - 2,1579}{2,1579} \times 100\% = 16,3168\% \approx 16,32\%$$

Dengan demikian, capaian kinerja IKU 2.2.0.1 Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral disajikan pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Capaian Kinerja IKU 2.2.0.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.2.0.1 Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	16,32	16,32	100,00

Dari hasil pengukuran kinerja IKU 2.2.0.1 diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 100 persen yang artinya bahwa Deputi Bidang Statistik Produksi telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka pemenuhan capaian IKU 2.2.0.1 tersebut, Deputi Bidang Statistik Produksi telah melaksanakan serangkaian kegiatan pembinaan statistik sektoral terhadap 19 (sembilan belas) K/L Mitra. Kegiatan tersebut dilaksanakan baik secara luring maupun daring melalui *Zoom Meeting* dan media komunikasi lainnya, termasuk *WhatsApp Group*, guna memastikan intensitas pendampingan dan efektivitas koordinasi.

Selain kegiatan pembinaan, Deputi Bidang Statistik Produksi juga telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan statistik sektoral, serta merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan guna mendorong peningkatan nilai IPS K/L Mitra pada periode selanjutnya.

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penguatan tata kelola statistik sektoral yang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia. Hasil capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi sebesar 100 persen mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap K/L Mitra dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

Namun demikian, dalam prosesnya masih terdapat beberapa **kendala yang dihadapi**, yaitu:

1. Penguatan substansi materi untuk setiap indikator yang akan dinilai.
2. Sinkronisasi jadwal pembinaan dengan K/L Mitra.
3. BPS sebagai pembina perlu mendapatkan masukan untuk perbaikan ke depan terkait penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral.
4. Perbedaan persepsi tim Pembina Statistik Sektoral (PSS) BPS dan tim Penilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) BPS.
5. Restrukturisasi Kementerian/Lembaga (K/L) Mitra.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dilakukan beberapa **upaya atau solusi** berikut:

1. Memberikan contoh kasus untuk bukti dukung.
2. Melakukan komunikasi kepada K/L Mitra.
3. Meminta *feedback* dari K/L Mitra terkait penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral.
4. Melakukan monitoring evaluasi (monev) berkala (internal BPS).
5. Meningkatkan intensitas pembinaan secara berkala dan evaluasi kepada Wali Data dan Produsen Data K/L Mitra (eksternal).

Adapun **upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut kedepannya** sebagai berikut:

1. Melakukan internalisasi Pembina Statistik Sektoral (PSS) BPS tahun 2026.
2. Mengajukan permintaan data sektoral K/L Mitra untuk kelengkapan penyusunan data pertumbuhan ekonomi.
3. Melakukan pemetaan data yang akan dialirkan ke BPS melalui sistem dari K/L yang dibina.
4. Melakukan kerjasama dan kolaborasi yang lebih intensif dengan K/L produsen data.

3.2 Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi Terhadap Target Renstra

Pada tahun 2025, Deputi Bidang Statistik Produksi telah menetapkan target kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun yang sama.

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Renstra

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 1. Peningkatan Pemanfaatan Data dan <i>Insight</i> Statistik Produksi yang Berkualitas					Target Tercapai	Target Tercapai
Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi	Persen	83,95	85,95	89,57	106,69	104,21
Sasaran 2. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi yang Berkualitas					Target Tercapai	Target Belum Tercapai
Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	16,32	45,10	16,32	100	36,19

Berdasarkan Tabel 3.10, target tahun 2025 yang ditetapkan pada IKU 1.2.0.1 “Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi” ditetapkan sebesar 83,95 persen, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 89,57 persen. Dengan demikian, capaian kinerja terhadap target tahun 2025 tercatat sebesar 106,69 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Deputi Bidang Statistik Produksi berhasil memenuhi, bahkan melampaui, target kinerja yang telah direncanakan dalam Renstra 2025-2029 untuk tahun 2025. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029, realisasi kinerja tahun 2025 juga telah melampaui target yang telah

ditetapkan. Dengan demikian, target kinerja IKU 1.2.0.1 akan disesuaikan agar target yang ditetapkan menjadi “lebih menantang” dalam rangka mendorong kinerja yang lebih baik dan berdampak pada tahun berikutnya.

Adapun untuk IKU 2.2.0.1 “Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral”, target yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 16,32 persen. Realisasi kinerja pada tahun 2025 juga mencapai 16,32 persen, sehingga capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 100 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Deputi Bidang Statistik Produksi telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun 2025. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 yang sebesar 45,10 persen, realisasi kinerja tahun 2025 belum mencapai target tersebut. Kondisi ini masih dinilai wajar mengingat tahun 2025 merupakan fase awal pelaksanaan Renstra 2025-2029, sehingga pencapaian target jangka menengah direncanakan dilakukan secara bertahap dan menunjukkan target kinerja yang disusun Deputi Bidang Statistik Produksi cukup menantang serta memberikan dorongan untuk terus mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Pada periode awal ini, pelaksanaan pembinaan statistik sektoral masih difokuskan pada peningkatan pemahaman terhadap standar dan tata kelola statistik serta penguatan koordinasi dengan K/L mitra.

Keberhasilan capaian kinerja terhadap target Renstra tahun 2025 mencerminkan bahwa program kerja yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif, didukung oleh koordinasi yang baik antarunit kerja, baik internal maupun eksternal, dalam penyediaan data dan *insight* statistik produksi yang berkualitas serta pelaksanaan pembinaan statistik sektoral yang optimal kepada K/L mitra Deputi Bidang Statistik Produksi.

3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

Deputi Bidang Statistik Produksi ikut berperan dalam mendukung program prioritas nasional, prioritas presiden, serta isu strategis nasional tahun 2025 melalui beberapa kegiatan berikut:

3.3.1 Prioritas Nasional

Salah satu program prioritas nasional tahun 2025 adalah Pembinaan Statistik Sektoral. Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, Deputi Bidang Statistik Produksi melalui ketiga Direktorat di lingkungannya telah melaksanakan pembinaan statistik sektoral terhadap K/L Mitra sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang menugaskan Badan Pusat Statistik untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional serta mendukung pembangunan nasional.

Pada tahun 2025, Deputi Bidang Statistik Produksi telah melaksanakan pembinaan statistik sektoral terhadap 19 (sembilan belas) K/L mitra. Pelaksanaan pembinaan tersebut mencakup kegiatan pendampingan, koordinasi, serta penguatan pemahaman terhadap standar dan tata kelola statistik sektoral. Adapun capaian *output*, kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan, serta rencana tindak lanjut pembinaan statistik sektoral dijelaskan secara rinci per direktorat di lingkungan Deputi Bidang Statistik Produksi.

1. Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Selama tahun 2025 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah melakukan pembinaan pada 7 kementerian/lembaga yang menjadi mitra binaan. Tahapan pembinaan meliputi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan pelaporan, dan tahapan monitoring dan evaluasi. Output yang sudah dicapai selama tahun 2025 diantaranya sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

- Nama-nama Tim Pembinaan Statistik Sektoral sudah terinput pada Aplikasi Pembinaan;
- Pelaksanaan internalisasi materi Pembinaan Statistik Sektoral;
- Pelaksanaan rapat koordinasi internal sebagai persiapan Pembinaan Statistik Sektoral Triwulan IV tahun 2025 serta *refreshing* pengajuan Rekomendasi Statistik dan pelaporan Metadata Statistik pada tanggal 15 September 2025;

- Pemutakhiran SK Tim PSS.
 - Edukasi seputar pembinaan statistik sektoral (esensial) IV.
- b. Tahap Pelaksanaan
- Mengidentifikasi narahubung K/L mitra pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yaitu Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen-ATR/BPN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
 - Membuat rencana kerja pembinaan statistik sektoral;
 - Mengidentifikasi kegiatan statistik sektoral;
 - Mengidentifikasi kegiatan statistik sektoral yang ada di K/L mitra pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - Mengidentifikasi 2 kegiatan prioritas pembinaan pada K/L mitra Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - Melakukan pembinaan statistik sektoral sebanyak 24 kali, masing-masing 4 kali pada setiap K/L mitra pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
- c. Tahap Pelaporan: Menginput berkas pembinaan pada Aplikasi Pembinaan Statistik Sektoral.
- d. Tahapan Monitoring dan Evaluasi: Melakukan Monitoring Evaluasi Mandiri.

Pelaksanaan pembinaan sektoral di Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tidak luput dari kendala. Setiap kendala yang ditemui sudah dicarikan solusi dan rencana tindak lanjut yang tepat sehingga tidak terjadi kendala serupa pada pelaksanaan pembinaan statistik sektoral kedepannya. Rangkuman kendala yang ditemui dan solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Daftar Kendala dan Solusi Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

No	Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
1	Di antara K/L yang dibina, masih ada yang hanya mengajukan 2 kegiatan lama untuk dilakukan pembinaan Statistik Sektorial, padahal kegiatan tersebut telah dilakukan penilaian selama 2 tahun berturut-turut.	K/L diminta untuk berkoordinasi dengan produsen data yang ada di K/L masing-masing agar dapat menambahkan kegiatan lain untuk dilakukan pembinaan.
2	Keterlambatan dalam melakukan input kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan di aplikasi PSS.	Menyiapkan template lengkap untuk input laporan kegiatan agar lebih cepat diunggah ke aplikasi PSS.
3	Kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) cukup padat, sehingga menyulitkan pelaksanaan koordinasi lebih lanjut.	Terdapat PIC untuk masing-masing K/L untuk mengatur atau memonitoring kegiatan pembinaan statistik sektorial (menambah personil)
4	Pemahaman terhadap materi pembinaan belum dapat dipahami secara optimal karena materi disampaikan secara online	Melakukan penguatan materi yang disampaikan pada triwulan III untuk beberapa K/L yang menjadi tanggung jawab Direktorat STPHP secara offline (BPK, Bapanas, Kementerian ATR/BPN) dan sebagai tindak lanjut dari kendala triwulan III dan dilakukan pada triwulan IV 1. BPK Tanggal 3 November 2. Bapanas Tanggal 2 Desember 3. Kementerian ATR BPN Tanggal 20-21 November 2025

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh tim pembina statistik sektorial Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan diantaranya adalah:

- a. Evaluasi hasil pembinaan triwulan IV 2025 untuk lokus pembinaan tahun 2025 (Kementan dan Kementerian ATR/BPN).
- b. Menyusun timeline pembinaan statistik sektorial tahun 2026 untuk lokus Kementan, Kementerian ATR/BPN, dan KPPU.
- c. Melakukan pembinaan statistik sektorial *series* 1.

2. Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan memiliki peran dalam kaitannya dengan penyelenggaraan statistik sektoral yaitu sebagai Pembina enam Kementerian/Lembaga mitra binaan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Sekretariat Jenderal MPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Selama tahun 2025 Direktorat Statistik Peternakan Perikanan dan Kehutanan telah melakukan pembinaan pada 6 kementerian/lembaga yang menjadi mitra binaan. Tahapan pembinaan meliputi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan pelaporan, dan tahapan monitoring dan evaluasi. Output yang sudah dicapai selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Tahap Persiapan

- Nama-nama Tim Pembinaan Statistik Sektoral sudah terinput pada Aplikasi Pembinaan;
- Pelaksanaan internalisasi materi Pembinaan Statistik Sektoral
- Pelaksanaan rapat koordinasi internal sebagai persiapan Pembinaan Statistik Sektoral Triwulan IV tahun 2025 serta *refreshing* pengajuan Rekomendasi Statistik dan pelaporan Metadata Statistik pada tanggal 15 September 2025;
- Pemutakhiran SK Tim PSS.
- Edukasi seputar pembinaan statistik sektoral (esensial) IV.

b. Tahap Pelaksanaan

- Mengidentifikasi narahubung K/L Mitra Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (yaitu: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Sekretariat Jenderal MPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Sekretariat Jenderal DPD RI);
- Membuat Rencana Kerja Pembinaan Statistik Sektoral;

- Mengidentifikasi kegiatan statistik sektoral yang ada di K/L Mitra Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan;
 - Mengidentifikasi 2 kegiatan prioritas pembinaan pada K/L Mitra Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan;
 - Melakukan pembinaan statistik sektoral sebanyak 24 kali, masing-masing 4 kali pada setiap K/L Mitra Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.
- c. Tahap Pelaporan: Menginput berkas pembinaan pada Aplikasi Pembinaan Statistik Sektoral.
- d. Tahapan Monitoring dan Evaluasi: Melakukan Monitoring Evaluasi Mandiri.

Pelaksanaan pembinaan sektoral di Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan tidak luput dari kendala. Setiap kendala yang ditemui sudah dicarikan solusi dan rencana tindak lanjut yang tepat sehingga tidak terjadi kendala serupa pada pelaksanaan pembinaan statistik sektoral kedepannya. Rangkuman kendala yang ditemui dan solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Daftar Kendala dan Solusi Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

No	Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
1	Kehadiran peserta, khususnya Produsen Data, tidak dapat dipastikan karena birokrasi yang lambat di K/L.	Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral diselenggarakan oleh K/L.
2	Indikator yang sangat teknis, seperti penerapan standar data, metadata, dan pengusulan rekomendasi statistik sulit jika dilakukan secara online, sehingga perlu dilakukan secara offline.	Menggunakan pembinaan secara offline untuk indikator yang sangat teknis dan tetap memberikan asistensi di luar waktu pembinaan yang resmi melalui telepon/WA.
3	Volume dan jadwal kegiatan di K/L dan BPS yang tidak terprediksi saat perencanaan mengakibatkan waktu kegiatan pembinaan	Kegiatan dilaksanakan dengan ketersediaan waktu dari K/L dengan

No	Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
	bergeser dari yang sudah direncanakan.	tetap menjaga kelengkapan peserta, yaitu walidata dan produsen data
4	Tidak adanya kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025.	Tim pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan melakukan rapat koordinasi internal untuk membahas persiapan pembinaan statistik sektoral Triwulan IV Tahun 2025.
5	Keterbatasan waktu K/L dalam mengikuti pembinaan statistik sektoral karena kembali dibukanya anggaran-anggaran kegiatan lain di K/L menjelang akhir tahun.	Melakukan pertemuan tambahan (di luar target pembinaan) dengan K/L binaan Direktorat SP2K secara online dengan materi penyampaian spesifikasi bukti dukung EPSS setiap indikator menurut tingkat kematangan. Pembinaan statistik sektoral dilakukan dengan menyampaikan beberapa materi sekaligus dalam jangka waktu satu hari.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh tim pembina statistik sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan diantaranya adalah:

- a. Melakukan penyesuaian topik pembinaan pada Triwulan IV Tahun 2025, sebagai berikut:
 - Bagi K/L binaan yang melakukan penilaian mandiri EPSS 2025, maka topik pembinaan ke-7 berupa Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri EPSS 2025.
 - Bagi K/L binaan yang tidak melakukan penilaian mandiri EPSS 2025, maka topik pembinaan ke-7 berupa materi Penjaminan Kualitas Data.
- b. Pada Triwulan I Tahun 2026 Tim Pembina Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan melakukan persiapan pembinaan statistik sektoral untuk tahun anggaran 2026.

3. Direktorat Statistik Industri

Pada tahun 2025 Pembinaan Statistik Sektoral telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) Direktorat

Statistik Industri (DSI) Tahun 2025 yang merupakan dokumen pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja atas penyelenggaraan pembinaan kepada kementerian/lembaga mitra DSI. Adapun output yang telah dicapai dalam kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral DSI Pada tahun 2025 antara lain:

- a. Terlaksana 18 kegiatan pembinaan, yang terdiri dari 8 kegiatan sesuai rencana kerja dan 10 kegiatan tambahan (di luar rencana kerja).
- b. Pendampingan intensif kepada 6 Kementerian/Lembaga mitra, yaitu Kemenperin, Kemen ESDM, Kemen PU, Kemen PKP, BP Batam, dan KPPU.
- c. Pencapaian nilai Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral (TPSS) sebesar 108,33, yang melampaui target awal tahun sebesar 90,00.
- d. Tersusunnya daftar inventarisasi kegiatan statistik sektoral dan penentuan dua kegiatan prioritas untuk dibina di setiap instansi.
- e. Pelaksanaan Monev mandiri secara berkala (Semester I dan II) untuk menjaga kualitas isian data dan dokumen pendukung pada aplikasi.

Selama pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Industri (PSS DSI) Tahun 2025, masih dijumpai sejumlah kendala strategis, baik yang bersumber dari internal tim pembina maupun dari Kementerian/Lembaga mitra, antara lain terkait tingkat komitmen dan responsivitas, kewenangan pengambilan keputusan, kapasitas sumber daya manusia, serta keterbatasan waktu dan beban kerja.

Untuk menjawab kendala tersebut, PSS DSI telah menerapkan berbagai langkah strategis melalui penguatan koordinasi lintas pihak, pendampingan yang lebih terarah dan berkelanjutan, peningkatan kapasitas tim pembina, serta penajaman fokus pembinaan pada kegiatan prioritas. Implementasi langkah-langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral serta menjadi pijakan untuk peningkatan efektivitas pembinaan pada periode selanjutnya.

Tabel 3.13 Daftar Kendala dan Solusi Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Industri

No	Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
1	Partisipasi dan responsivitas K/L mitra masih rendah.	Penguatan koordinasi dan komunikasi intensif dengan PIC K/L serta penegasan komitmen sejak tahap perencanaan
2	PIC K/L belum memiliki kewenangan pengambilan keputusan.	Mendorong penunjukan PIC yang berwenang dan melibatkan pimpinan K/L pada tahap awal pembinaan.
3	Pengelolaan PSS di K/L oleh pegawai baru/CPNS	Pendampingan bertahap dan berkelanjutan serta penyediaan materi pembinaan yang mudah dipahami.
4	Kesibukan kegiatan teknis K/L sehingga pembinaan belum menjadi prioritas.	Penyesuaian jadwal pembinaan dan penekanan manfaat pembinaan bagi peningkatan kualitas data.
5	Keterbatasan waktu dan kapasitas internal Tim PSS DSI.	Pembagian peran yang lebih jelas, penguatan koordinasi internal, dan fokus pada kegiatan prioritas.
6	Perbedaan tingkat pemahaman dan kepercayaan diri tim pembina.	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, internalisasi materi, dan berbagi pengetahuan antaranggota.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh tim pembina statistik sektoral Direktorat Statistik Industri diantaranya adalah:

- a. Memperkuat perencanaan pembinaan statistik sektoral melalui koordinasi awal dengan K/L mitra, termasuk pelibatan pimpinan dan penetapan PIC yang memiliki kewenangan, guna menjamin komitmen dan keberlanjutan pembinaan.
- b. Mengarahkan pembinaan statistik sektoral pada kegiatan statistik yang menghasilkan data yang dibutuhkan BPS, khususnya yang terkait dengan aliran data ke BPS, dengan tetap mencakup pembinaan data prioritas Kementerian/Lembaga. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan pembinaan yang lebih relevan, terintegrasi, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas dan ketersediaan data statistik nasional.

- c. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas tim pembina secara terencana dan berkelanjutan guna menyamakan pemahaman, meningkatkan kompetensi teknis, dan memperkuat peran Tim PSS DSI dalam pembinaan statistik sektoral.
- d. Meningkatkan kualitas pendampingan teknis kepada K/L mitra dalam penyusunan metadata, penerapan standar data, serta penyusunan rekomendasi statistik, dengan memastikan kesesuaian terhadap domain pembinaan statistik sektoral.
- e. Menyempurnakan pengaturan pembagian peran, jadwal, dan mekanisme koordinasi internal Tim PSS DSI agar pelaksanaan pembinaan berjalan lebih efektif dan selaras dengan rencana kerja tahunan.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan secara berkala dan terukur sebagai dasar pengendalian kualitas pelaksanaan pembinaan dan perbaikan berkelanjutan pada tahun berjalan.

3.3.2 Prioritas Presiden

Deputi Bidang Statistik Produksi juga ikut terlibat dalam mendukung program-program prioritas Presiden yang terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah. Dalam rangka menindaklanjuti Inpres Nomor 6 Tahun 2025, Deputi Bidang Statistik Produksi melalui Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan **menyediakan data luas panen dan produksi padi** melalui Survei KSA Padi dan Survei Ubinan Padi. Selain itu, dilakukan serangkaian koordinasi dengan K/L terkait dengan pengelolaan gabah dan beras dalam negeri, yang diantaranya:

1. Kementerian Pertanian (Kementan) untuk perencanaan target produksi, luas tanam, dan penyaluran bantuan/subsidi.
2. Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta penyusunan prognosa pangan.
3. Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan perumusan stabilisasi harga pangan dalam pengendalian inflasi.

4. Kemenko Pangan untuk penyusunan neraca pangan dan neraca komoditas serta mengkoordinasikan implementasi HPP, impor/ekspor, dan program stabilisasi pasokan.
5. Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan K/L lainnya untuk perencanaan pembangunan sektor pangan.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran kegiatan, Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dibantu oleh unit kerja lainnya di BPS menyusun rancangan metodologi KSA dan Ubinan, menyiapkan instrumen pengumpulan data dengan moda CAPI, ubinan menggunakan FASIH, serta menyiapkan instrumen diseminasi untuk publikasi hasil statistik. Hingga akhir 2025, telah tersedia rancangan metodologi KSA dan Ubinan yang baku, instrumen pengumpulan data, serta publikasi hasil kegiatan statistik melalui *website* BPS. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut memastikan tersedianya data padi yang akurat sebagai dasar kebijakan pengelolaan beras nasional.

Variabel Utama: *Data luas panen dan produksi padi*

Diseminasi: *Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) Luas Panen dan Produksi Padi setiap awal bulan*

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menghadapi beberapa kendala. Berikut disajikan **kendala yang dihadapi beserta upaya perbaikan (solusi)** yang telah dilakukan:

Tabel 3.14 Daftar Kendala dan Solusi Survei KSA dan Ubinan Padi

No	Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
Survei KSA Padi		
1	Bencana alam di beberapa daerah di Indonesia yang menghambat pelaksanaan KSA baik dari segi waktu maupun keterjangkauan lokasi sampel segmen.	Penyesuaian jadwal survei pada daerah yang terkena bencana
2	Kapasitas <i>server/clouds/storage</i> yang terbatas dan file foto amatan lapangan KSA yang semakin bertambah (membutuhkan	Penambahan kapasitas <i>server/clouds/storage</i>

No	Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
	ruang/ <i>space</i> yang lebih) sehingga mengakibatkan sering terjadinya kesalahan/ <i>error</i> pada saat pengiriman data amatan oleh petugas KSA	
Survei Ubinan Padi		
1	Adanya kejadian lewat panen yang disebabkan karena petugas tidak diinfokan mengenai jadwal panen dari petani yang terkadang dilakukan secara mendadak dan pelaksanaan panen yang dilakukan serentak menggunakan <i>combined harvester</i> sehingga petugas tidak sempat melakukan ubinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan hubungan dan komunikasi antara petugas dan petani/kelompok tani • di beberapa daerah juga sudah ada yang membuat aplikasi reminder ubinan

Selanjutnya, terdapat **rencana tindak lanjut/rencana aksi** yang akan dilakukan di tahun 2026, yaitu pembaharuan kuesioner ubinan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan dari Survei KSA dan Ubinan Padi.

Survei KSA Padi





Gambar 3.3 Dokumentasi Survei KSA Padi

Survei Ubinan Padi



Gambar 3.4 Dokumentasi Survei KSA Padi

3.3.3 Isu Strategis Nasional

1. Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Survei Kesejahteraan Petani)

Survei Kesejahteraan Petani (SKP) merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan BPS. Survei ini dilakukan untuk menghasilkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai instrumen pengukuran berbasis data yang mencerminkan kondisi kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian (RTUP). Cakupan survei meliputi 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota dengan populasi responden RTUP pada enam subsektor pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei berbasis sampling dengan moda CAPI (*Computer-Assisted Personal Interviewing*), menggunakan metode wawancara oleh 3.022 Petugas Pendataan Lapangan dan Petugas Pemeriksaan Lapangan.

Pelaksanaan SKP2025 mengikuti jadwal operasional yang telah disusun secara terstruktur, mulai dari penarikan dan distribusi sampel pada 1-13 Agustus 2025, Workshop Instruktur Utama (Intama) pada 12-14 Agustus 2025, hingga finalisasi kuesioner dan pedoman pada 25-29 Agustus 2025. Pelatihan Instruktur Nasional (Innas) diselenggarakan secara *online* pada 1-4 September 2025, dilanjutkan pelatihan petugas lapangan secara luring pada 8-12 September 2025. Kegiatan lapangan berlangsung pada 15 September-15 Oktober 2025, tahapan berikutnya meliputi data *cleaning* (16 Oktober-15 November), penyusunan dan pemeriksaan tabulasi (16-30 November), serta penyusunan publikasi dan bahan rilis mulai Desember 2025. Data IKP rilis pada tahun 2026.

Output utama yang dihasilkan hingga akhir 2025 adalah tersedianya nilai Indeks Kesejahteraan Petani (IKP), yang akan dihitung berdasarkan enam dimensi dan dua puluh indikator. Melalui SKP dapat mengukur kesejahteraan petani tidak hanya dari sisi harga namun juga dari berbagai aspek penting kehidupan, antara lain kesehatan (akses layanan, status gizi), pendidikan

(lama sekolah, partisipasi belajar), standar hidup (rumah, sanitasi, listrik), aset produktif, lingkungan sosial, mobilitas dan partisipasi, kemampuan dasar untuk hidup layak. Hasil ini diharapkan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kesejahteraan petani dan pengembangan sektor pertanian secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Survei Kesejahteraan Petani(SKP) tidak luput dari kendala. Beberapa kendala kegiatan SKP 2025 dan solusi serta tindak lanjut yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Daftar Kendala dan Solusi Survei Kesejahteraan Petani

No	Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
1	Efisiensi anggaran yang berdampak ketersediaan dan kecukupan dana untuk honor petugas lapangan, khususnya petugas yang berstatus mitra statistik.	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan untuk melakukan reviu perhitungan efisiensi sehingga anggaran untuk pendataan lapangan dapat tersedia.
2	Terdapat beberapa data yang tidak wajar.	Melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasil evaluasi data ke daerah agar dapat dilakukan pengecekan dan menindaklanjuti ketidakwajaran data. Komunikasi dengan PJ SKP di daerah juga sudah dilakukan, baik melalui google form, telepon, grup WA, maupun personal chat untuk menyampaikan beberapa temuan dari hasil pemeriksaan. Selain itu, sudah dilakukan supervisi ke daerah terkait pengawasan kegiatan SKP.
3	Terdapat perbaikan data setelah periode referensi pendataan dan pemeriksaan oleh BPS Kabupaten/Kota	BPS Provinsi menginventarisasi temuan berdasarkan ID RTUP yang selanjutnya dilakukan perbaikan oleh BPS Pusat
4	Pada saat pelaksanaan SKP 2025 ditemukan sejumlah permasalahan di daerah. BPS daerah membutuhkan solusi yang cepat agar dapat menyelesaikan masalah tersebut	BPS Pusat mengadakan forum diskusi melalui zoom meeting secara berkala dengan BPS daerah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut
5	Sampel tersebar di beberapa daerah sulit dan alasan keamanan terutama di daerah Papua sehingga menyulitkan dalam proses pendataan	Melakukan koordinasi dengan instansi lain dan beberapa di antaranya dilakukan penggantian sampel dengan tetap

No	Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
		memperhatikan kecukupan untuk level estimasi yang telah ditentukan.

Rencana aksi dan tindak lanjut Survei Kesejahteraan Petani (SKP) tahun 2026:

- a. Melakukan konsultasi/FGD dengan pakar terkait metode penghitungan dan indikator kesejahteraan petani.
- b. Analisis koherensi IKP2025 dengan DTSEN.
- c. Penyempurnaan rumus penghitungan Indeks Kesejahteraan Petani dan melengkapi indikator penyusunnya.
- d. Perbaiki kuesioner dan konsep definisi pada buku pedoman Survei Kesejahteraan Petani (SKP) 2026.
- e. Uji coba SKP diperlukan karena penyempurnaan indikator, sehingga bisa dikaji secara teknis maupun operasional lapangan.
- f. Pengawasan uji coba kuesioner CAPI SKP 2026.
- g. Melakukan Kajian sampling SKP tahun 2026.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 (Sensus Ekonomi 2026)

Pada tahun 2025, Deputi Bidang Statistik Produksi melalui Direktorat Statistik Industri turut berperan aktif dalam mendukung persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Keterlibatan DSI mencakup berbagai tahapan kegiatan, mulai dari penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, penyusunan kerangka usaha dan instrumen pendataan, pengembangan metode dan proses bisnis pendataan, hingga dukungan dalam sosialisasi. Beberapa output yang dicapai dalam persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang telah dilakukan pada tahun 2025 antara lain:

- a. Keikutsertaan dalam penyusunan proses bisnis dan manajemen lapangan kegiatan pendataan lengkap SE2026;
- b. Keikutsertaan dalam penyusunan instrumen pendataan lengkap SE2026;

- c. Melakukan pemeriksaan hasil data training Gen AI untuk pengisian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
- d. Memperoleh dukungan dari beberapa Kantor Pusat dan direktori perusahaan di bawahnya;
- e. Penyusunan *Statistical Business Register* (SBR) untuk usaha/perusahaan industri;
- f. Memperoleh dukungan dari Kementerian Perindustrian dalam rangka pelaksanaan SE2026;
- g. Keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi kegiatan Sensus Ekonomi 2026 bersama Komisi X di beberapa wilayah;
- h. Penandatanganan komitmen bersama antara BPS dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) dalam mendukung kegiatan Sensus Ekonomi 2026;
- i. Mengikuti workshop intama untuk mendukung kegiatan pelatihan Sensus Ekonomi 2026.

Pada pelaksanaannya, masih ditemui beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Keterbatasan anggaran untuk melakukan kunjungan dan koordinasi langsung ke Kantor Pusat yang bergerak di bidang industri, pertambangan energi, dan konstruksi;
- b. Waktu kegiatan terkait sosialisasi Sensus Ekonomi bersama Komisi X berbenturan dengan jadwal kegiatan di Direktorat Statistik Industri.

Sebagai keberlanjutan atas capaian Direktorat Statistik Industri pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 pada tahun 2025, beberapa tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain:

- a. Penyusunan dan finalisasi proses bisnis (probis) pendataan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI), sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama yang telah dibangun dengan pengelola kawasan serta untuk memastikan mekanisme pendataan yang lebih terstruktur dan efektif.
- b. Pelaksanaan Pelatihan Instruktur Nasional (Innas) dan Instruktur Daerah (Inda) serta Pelatihan Petugas Pendataan Lengkap SE2026 guna

meningkatkan pemahaman dan kapasitas petugas dalam pelaksanaan pendataan SE2026.

- c. Penyempurnaan proses bisnis pendataan SE2026, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya

3. Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Pada tahun 2025, Deputi Bidang Statistik Produksi melalui Direktorat Statistik Industri telah menyelesaikan target dalam penyusunan Publikasi Neraca Energi Indonesia 2020-2024. Publikasi ini menjadi penting karena akan digunakan dalam penghitungan Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi. Publikasi Neraca Energi merupakan integrasi dari neraca komoditas energi yang datanya diperoleh dari data administrasi yang diolah oleh tim pertambangan dan energi di Direktorat Statistik Industri. Adapun output yang telah dicapai dalam kegiatan Publikasi Neraca Energi pada tahun 2025 antara lain:

- a. Melakukan pengumpulan data administrasi yang bersumber dari K/L maupun dari Publikasi BPS.
- b. Melakukan kompilasi data komoditas energi kedalam masing masing neraca komoditas energi.
- c. Pembahasan Harmonisasi Penyusunan Neraca Energi BPS-KESDM sesuai rekomendasi IMF untuk mendukung Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK.
- d. Penyusunan Publikasi Neraca Energi Indonesia 2020-2024.

Dalam dukungan data untuk Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK, kegiatan penyusunan Neraca Energi ini menghadapi beberapa kendala yaitu masih terdapat data yang tidak tersedia baik di kementerian /lembaga maupun di badan usaha. Atas kendala tersebut solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan estimasi data melalui pendekatan dan asumsi yang didasarkan kepada informasi yang diperoleh melalui media berita ataupun media sosial. Di samping itu tetap membangun koneksi serta melakukan koordinasi secara rutin baik dengan internal BPS maupun kementerian/lembaga.

Beberapa rencana tindak lanjut/rencana aksi yang akan dilakukan di 2026 dalam mendukung penyusunan Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK, yaitu:

- a. Pembentukan tim statistik energi agar kinerja penyusunan Publikasi Neraca Energi lebih fokus dilakukan.
 - b. Format *template* neraca energi akan diperluas untuk sektor industri menjadi lebih detil sesuai dengan format dari IRES (*International Recommendation Energy Statistics*) agar manfaat publikasi meningkat.
 - c. Melakukan harmonisasi data neraca energi dengan Pusdatin Kementerian ESDM untuk meminimalkan diskrepansi data.
4. **Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas dan Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional: Data Komoditas Gula, Pergaraman, Jagung, Beras, Daging Lembu, Perikanan, Bawang Putih**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 61 Tahun 2024 mengenai Neraca Komoditas serta Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, telah dilakukan kegiatan penyediaan data komoditas pangan strategis (gula, pergaraman, jagung, beras, daging lembu, perikanan, dan bawang putih) sebagai bahan evaluasi ketersediaan pasokan pangan nasional. Deputi Bidang Statistik Produksi melalui Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan berperan melaksanakan survei terkait seperti Pengumpulan Data Luas Panen Tanaman Pangan, Survei Ubinan Tanaman Pangan, Pendataan Komoditas Bawang Putih. Sementara itu, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan berperan melaksanakan Pendataan Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB), Pendataan Laporan Triwulanan Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan (PP/TPI), Pendataan Laporan Triwulanan Perndaratan Ikan Tradisional (PIT), Pendataan Tahunan Perusahaan Budidaya Ikan (LTB), dan Pendataan Tahunan Perusahaan Penangkapan Ikan (LTP).

a. **Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan berperan dalam menyediakan *output* data berupa data luas panen dan produksi padi, data luas panen dan produksi jagung, serta data komoditas bawang putih.

Untuk **komoditas padi dan jagung**, dievaluasi kendala dan solusi sebagai berikut:

Tabel 3.16 Daftar Kendala dan Solusi Survei KSA Padi dan KSA Jagung

No	Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
1	Bencana alam di beberapa daerah di Indonesia yang menghambat pelaksanaan KSA baik dari segi waktu maupun keterjangkauan lokasi sampel segmen.	Penyesuaian jadwal survei pada daerah yang terkena bencana
2	Kapasitas <i>server/clouds/storage</i> yang terbatas dan file foto amatan lapangan KSA yang semakin bertambah (membutuhkan ruang/ <i>space</i> yang lebih) sehingga mengakibatkan sering terjadinya kesalahan/ <i>error</i> pada saat pengiriman data amatan oleh petugas KSA	Penambahan kapasitas <i>server/clouds/storage</i>

Pengembangan yang telah dilakukan:

- Penggunaan *web based* monitoring untuk mengoptimalkan pemeriksaan secara aktual setiap bulan.
- Migrasi sistem pendataan dan pengolahan CAPI dari BPPT ke BPS.
- Pada KSA padi, Pemanfaatan citra satelit dan pemodelan *machine learning* untuk memprediksi fase tumbuh padi di suatu titik (*mixed method*), jika akurasiya baik, berpotensi digunakan melengkapi informasi KSA khususnya di area *remote*.

Rencana tindak lanjut:

- Penggunaan *remote sensing* dan *machine learning* dalam membangun poligon populasi lahan potensi jagung sebagai dasar KSA Jagung yang lebih akurat.
- Penggunaan *drone*.
- Pengembangan KSA untuk komoditas lain.

Untuk **komoditas bawang putih**, diidentifikasi kendala dan solusi sebagai berikut :

Tabel 3.17 Daftar Kendala dan Solusi Pendataan Komoditas Bawang Putih

No	Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
1	Organisasi: Keterlambatan pengiriman dokumen SPH dan belum adanya unit khusus pengelolaan data di Dinas Pertanian, sehingga masih membutuhkan dukungan dari BPS.	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta berkoordinasi secara berjenjang baik di level pusat, maupun daerah.
2	SDM: Beban kerja tinggi dengan cakupan luas, jumlah petugas terbatas, sering terjadi pergantian petugas, serta kualitas petugas yang bervariasi.	Peningkatan teknologi Informasi : Dukungan Teknologi Informasi dalam Pengolahan dan Pengiriman Data SPH mencakup beberapa perubahan signifikan dari sistem lama ke sistem yang lebih efisien.
3	Metodologi: Data berasal dari kompilasi administrasi, sehingga masih memiliki kelemahan dalam ketepatan hasil.	Merancang kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sampel panel dan dilakukan secara triwulanan berbasis metode estimasi untuk mengukur perkembangan produksi Survei Indeks Produksi Hortikultura : subsektor hortikultura di Indonesia. Survei ini bertujuan untuk mengontrol kualitas data SPH yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian serta mendukung penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian.

No	Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
4	Geografis: Pengiriman laporan fisik tidak efektif, wilayah survei luas terutama di daerah terpencil Biaya: Anggaran pusat menurun, distribusi form SPH ke daerah sulit, serta anggaran pelatihan SDM terbatas.	Dukungan Teknologi Informasi dalam Pengolahan dan Pengiriman Data SPH mencakup beberapa perubahan signifikan dari sistem lama ke sistem yang lebih efisien, yaitu dengan teknologi informasi berbasis <i>paperless</i> dan <i>web-based</i> .
5	Validitas: Sering terjadi kesalahan input; <i>contact person</i> sulit dihubungi/proses konfirmasi kesalahan dokumen membutuhkan waktu yang lama; validasi manual cukup menyulitkan petugas.	Melakukan monitoring, pemeriksaan, evaluasi, dan konfirmasi ulang data statistik hortikultura secara periodik.
6	Pelaporan data tepat waktu	Melakukan perubahan moda dengan SPH-CAWI (Computer Aided Web Interviewing) : SPH CAWI merupakan MODUL dalam aplikasi SIPEDAS berupa form elektronik untuk input pelaporan SPH oleh Petugas pengumpul data hortikultura di tingkat Kecamatan. Modul ini sebagai pengganti Kertas Daftar Isian SPH.
7	Peningkatan kualitas data yang dilaporkan	Akan dimonitoring dan dievaluasi menggunakan data pembanding berupa Indeks Produksi.

Sesuai Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres 61/2024 mengenai Neraca Komoditas, dalam perhitungan produksi Neraca Komoditas, data *supply* bawang putih terdiri dari data stok akhir tahun 2025 dan perkiraan produksi tahun 2026. Kedua data tersebut berasal dari penghitungan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional, dimana data BPS yang telah satu data dengan Kementerian Pertanian berasal dari kegiatan SPH yang digunakan untuk proyeksi produksi bawang putih. Sejalan dengan pentingnya data hasil Pendataan SPH, terdapat beberapa rencana tindak lanjut/rencana aksi yang akan dilakukan di 2026, yaitu.

- Melakukan sosialisasi dan implementasi ke BPS daerah mengenai dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS antara Direktorat Jenderal

Hortikultura Kementerian Pertanian dan Sekretariat Utama BPS Nomor B-263/HK-220/D/05/2025 Nomor 16.2/HK.610/PKS/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Satu Data Statistik Pertanian Hortikultura) yang meliputi penyusunan pedoman, bahan materi dan pelatihan petugas, pengolahan dan pengiriman data, monitoring dan evaluasi, penjaminan kualitas, pengembangan sistem pengumpulan, pengolahan, pengiriman, monitoring dan evaluasi data, yang sudah memenuhi pertukaran data/interoperabilitas melalui sistem sehingga Tercapai Satu Data Hortikultura (antara SPH Online BPS dan SPH *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI)/Sistem Penyediaan Data Statistik Pertanian Hortikultura (SIPEDAS Hortikultura, Kementan), dan Diseminasi Data SPH

- Melakukan pertemuan secara berkala dengan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Penanggung Jawab Statistik Hortikultura di BPS Provinsi untuk evaluasi data SPH dan kegiatan lain dalam pengumpulan data statistik hortikultura. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat pemeriksaan dan evaluasi data secara bulanan yang sudah dilakukan.
- Melakukan koordinasi dengan Ditjen Hortikultura Kementan RI mengenai pendataan bawang putih agar data yang diperoleh dapat lebih lengkap dan sesuai dengan pelaporan melalui aplikasi Sipedas.

b. Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres 61/2024 mengenai Neraca Komoditas serta Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, telah dilakukan kegiatan penyediaan data komoditas pangan strategis sebagai bahan evaluasi ketersediaan pasokan pangan nasional. *Output* yang dihasilkan dari Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan mencakup data komoditas daging lembu dari kegiatan Pendataan Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB) dan data perikanan dari kegiatan Pendataan Laporan Triwulanan

Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan (PP/TPI), Pendataan Laporan Triwulanan Pendaratan Ikan Tradisional (PIT), Pendataan Tahunan Perusahaan Budidaya Ikan (LTB) dan Pendataan Tahunan Perusahaan Penangkapan Ikan (LTP).

Sesuai Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres 61/2024 mengenai Neraca Komoditas, dalam perhitungan produksi Neraca Komoditas, data supply daging lembu terdiri dari data stok akhir tahun 2025 dan perkiraan produksi tahun 2026. Kedua data tersebut berasal dari penghitungan Ditjen PKH Kementan RI dan Badan Pangan Nasional, dimana data BPS dari kegiatan LPTB digunakan untuk proyeksi produksi lembu (sapi dan kerbau) lokal. Demikian pula untuk data produksi ikan yang digunakan pada penghitungan neraca komoditas berasal dari Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data BPS dari kegiatan pendataan statistik perikanan digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data ini merupakan bahan penting dalam proses perumusan kebijakan, terutama dalam penyusunan neraca komoditas dan percepatan pembangunan sektor perikanan nasional.

Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam menghasilkan data statistik peternakan untuk komoditas lembu (sapi dan kerbau) adalah **Pendataan Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB)**. Tujuan dari kegiatan LPTB yaitu untuk:

- Mendapatkan data jumlah ternak yang dipotong setiap bulan dari Rumah Potong Hewan (RPH), Tempat Pemotongan Hewan (TPH), dan pemotongan luar RPH/TPH tercatat yang berasal dari Dinas yang menangani data peternakan.
- Mendapatkan rata-rata produksi (berat hidup, karkas, jeroan, kulit basah, daging skeletal, daging variasi dan produksi lainnya) hasil pemotongan ternak dan rata-rata harga karkas setiap bulan yang berasal dari pengukuran pada RPH dan TPH.

Cakupan ternak: sapi potong lokal, sapi potong ekspor impor, sapi perah, kerbau, kambing, domba dan babi.

Dalam prosesnya, kegiatan ini menghadapi beberapa kendala dengan beberapa solusi yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.18 Daftar Kendala dan Solusi Penyediaan Data Komoditas Daging Lembu

No	Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
1	Efisiensi anggaran yang berdampak ke kecukupan dana untuk honor petugas lapangan, khususnya petugas yang berstatus mitra statistik.	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan untuk melakukan <i>review</i> ulang perhitungan efisiensi sehingga anggaran untuk pendataan lapangan dapat tersedia.
2	Pemotongan ternak di luar RPH/TPH yang tercatat secara bulanan tidak selalu tersedia oleh dinas.	Melakukan koordinasi terkait hal tersebut dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian RI mengenai hal tersebut sehingga Ditjen PKH dapat menginstruksikan mitigasi ke dinas yang berada di daerah untuk menghitung pemotongan yang tidak tercatat. Selain itu, BPS RI dan Ditjen PKH Kementan RI juga sudah menyepakati Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Subsektor Peternakan sehingga memperkuat dasar BPS di daerah dalam melakukan pendataan di lapangan.
3	Pelaporan data LPTB terlambat dikirim karena data pemotongan yang belum tersedia atau belum direkap oleh RPH/TPH/Dinas hingga batas waktu tanggal 7 setiap bulannya.	Membuka akses aplikasi FASIH Simental LPTB hingga n+2 bulan dengan tetap melakukan monitoring pencacahan setiap bulannya. Adapun masa pengolahan diberikan waktu hingga tanggal 25 setiap bulannya.

No	Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
4	Tidak semua indikator produksi ditimbang beratnya oleh RPH/TPH.	Melakukan perkiraan indikator yang tidak ditimbang dengan menanyakan ke petugas RPH/TPH serta memberikan tabel kewajaran rentang berat dan konversi produksi pada setiap jenis ternak sebagai panduan dalam melakukan perkiraan.
5	Untuk beberapa kabupaten/kota, data pemotongan untuk kurban pada masa Hari Raya Iduladha dikirim dengan jumlah nihil pada aplikasi FASIH Simental LPTB.	Melakukan pemeriksaan dan konfirmasi ulang data pemotongan untuk kurban pada masa Hari Raya Iduladha ke kabupaten/kota yang sudah dibandingkan dengan data yang terlapor dari Ditjen PKH Kementan RI.
6	Untuk beberapa kabupaten/kota, data pemotongan untuk kurban pada masa Hari Raya Iduladha berdasarkan jenis kelamin tidak tersedia secara lengkap.	Menyampaikan kepada kabupaten/kota agar menanyakan perkiraan proporsi jenis kelamin ternak yang dipotong kepada RPH/TPH/Dinas.
7	Terdapat beberapa perubahan Penanggung Jawab (PJ) kegiatan LPTB pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota karena rotasi/mutasi unit kerja serta konsep definisi baru (daging variasi) pada tahun 2025.	Menyampaikan <i>refreshing</i> materi LPTB ke PJ kegiatan LPTB provinsi dan kabupaten/kota setiap awal tahun secara daring.
8	Terdapat beberapa data yang tidak wajar.	Melakukan pemeriksaan dan menyampaikan surat hasil evaluasi data ke daerah setiap bulan agar dapat dilakukan pengecekan dan menindaklanjuti ketidakwajaran data. Komunikasi dengan PJ Statistik Peternakan juga sudah dilakukan, baik melalui telepon, grup WA, maupun <i>personal chat</i> untuk menyampaikan beberapa temuan dari hasil pemeriksaan. Selain itu, sudah dilakukan supervisi ke daerah terkait pengawasan kegiatan statistik peternakan.

No	Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
9	Pendataan lapangan dilakukan di daerah yang tidak ada sinyal/jaringan internet.	Pengisian di aplikasi FASIH sudah didesain agar dapat dilakukan secara <i>offline</i> . Kemudian, pengiriman dapat dilakukan ketika sudah berada di daerah yang memiliki sinyal/jaringan internet.
10	Cakupan pendataan LPTB hanya pada pemotongan tercatat di RPH/TPH maupun di luar RPH/TPH oleh Dinas. Sementara terdapat pemotongan yang tidak tercatat, sehingga data produksi tidak dapat dihitung jika hanya menggunakan data LPTB saja.	BPS melakukan pendampingan bersama Ditjen PKH dalam kegiatan verifikasi dan validasi (<i>verval</i>) data membahas produksi komoditas peternakan. BPS menyediakan data jumlah pemotongan tercatat dan rata-rata berat produksi yang berasal dari LPTB sebagai bagian dari penghitungan produksi. Sementara, untuk komponen pemotongan tidak tercatat dihitung oleh Ditjen PKH dengan data yang dikumpulkan melalui Dinas yang membidangi data peternakan di daerah.
11	Secara konsep definisi, terdapat RPH/TPH yang tidak <i>eligible</i> sehingga tidak dapat dijadikan sebagai responden dalam Pendataan LPTB.	Menyampaikan informasi bahwa RPH/TPH yang tidak termasuk responden LPTB namun pemotongan ternaknya dilaporkan kepada dinas atau didata oleh Dinas yang Menangani Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan dicatat pada survei LPTB dengan responden Dinas.

Sejalan dengan pentingnya data hasil Pendataan LPTB, terdapat beberapa rencana tindak lanjut/rencana aksi yang akan dilakukan di 2026, yaitu:

- Melakukan sosialisasi ke BPS di daerah mengenai dokumen Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Subsektor Peternakan antara BPS dengan Ditjen PKH Kementan RI, baik dalam pertemuan khusus maupun sesi dalam pelaksanaan refreshing materi kegiatan statistik peternakan.

- Melakukan pertemuan daring secara berkala (triwulanan/semesteran) dengan PJ Statistik Peternakan di BPS Provinsi untuk evaluasi data LPTB dan kegiatan lain dalam pengumpulan data statistik peternakan. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat pemeriksaan dan evaluasi data secara bulanan yang sudah dilakukan.
- Melakukan koordinasi dengan Ditjen PKH Kementan RI mengenai pendataan pemotongan untuk kurban pada masa Hari Raya Idul adha agar data yang diperoleh dapat lebih lengkap dan sesuai dengan pelaporan melalui aplikasi iShiknas milik Ditjen PKH.
- Mengajukan permintaan direktori RPH/TPH kondisi terbaru yang terdata di Ditjen PKH Kementan RI agar dapat dijadikan sebagai referensi BPS di kabupaten/kota untuk memastikan seluruh RPH/TPH yang memenuhi konsep definisi dapat tercatat/terdata di LPTB.
- Melakukan pembaruan buku pedoman kegiatan-kegiatan statistik peternakan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam menghasilkan data statistik perikanan adalah Pendataan Laporan Triwulanan Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan (PP/TPI), Pendataan Laporan Triwulanan Pendaratan Ikan Tradisional (PIT), Pendataan Tahunan Perusahaan Budidaya Ikan (LTB) dan Pendataan Tahunan Perusahaan Penangkapan Ikan (LTP). Tujuan dari kegiatan ini diantaranya:

- Menyediakan data statistik perikanan khususnya dari perusahaan perikanan, Pelabuhan Perikanan, Tempat Pelelangan Ikan dan Pendaratan Ikan Tradisional yang akurat.
- Menyediakan data produksi perikanan laut secara triwulanan yang mencakup produksi yang dijual/dilelang melalui tempat pelelangan ikan, didaratkan melalui pelabuhan perikanan dan melalui tempat pendaratan ikan tradisional.

Dalam prosesnya, kegiatan ini menghadapi beberapa kendala dengan beberapa solusi yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.19 Daftar Kendala dan Solusi Kegiatan Statistik Perikanan

No	Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
1	Efisiensi anggaran yang berdampak ke kecukupan dana untuk honor petugas lapangan, khususnya petugas yang berstatus mitra statistik.	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan untuk melakukan review ulang perhitungan efisiensi sehingga anggaran untuk pendataan lapangan dapat tersedia.
2	Terdapat beberapa perubahan Penanggung Jawab (PJ) kegiatan perikanan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota karena rotasi/mutasi unit kerja serta konsep definisi baru pada tahun 2025.	Menyampaikan <i>refreshing</i> materi pengumpulan data statistik perikanan ke PJ kegiatan perikanan provinsi dan kabupaten/kota setiap awal tahun secara daring.
3	Terdapat beberapa data yang tidak wajar.	Melakukan pemeriksaan dan menyampaikan surat hasil evaluasi data ke daerah setiap bulan agar dapat dilakukan pengecekan dan menindaklanjuti ketidakwajaran data. Komunikasi dengan PJ Statistik Perikanan juga sudah dilakukan, baik melalui telepon, grup WA, maupun <i>personal chat</i> untuk menyampaikan beberapa temuan dari hasil pemeriksaan. Selain itu, sudah dilakukan supervisi ke daerah terkait pengawasan kegiatan statistik perikanan.
4	Data produksi ikan menggunakan data sekunder dari KKP sehingga sangat tergantung ketersediaan data dari KKP. Apabila KKP tidak memberikan data maka penghitungan neraca komoditas perikanan tidak bisa dihitung. Begitu juga dengan proses updating data, sangat tergantung	Melakukan koordinasi terkait hal tersebut dengan Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, BPS RI dan Pusdatin KKP juga mengupayakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Subsektor

No	Kendala	Solusi
(1)	(2)	(3)
	ketersediaan data dari KKP sehingga proses updating data neraca komoditas tidak bisa dilakukan untuk bulan-bulan berikutnya.	Perikanan sehingga memperkuat dasar BPS untuk mendapatkan data sekunder dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Data BPS dari kegiatan pendataan statistik perikanan digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejalan dengan pentingnya data hasil Pendataan Statistik Perikanan, terdapat beberapa rencana tindak lanjut/rencana aksi yang akan dilakukan di 2026, yaitu :

- Melakukan koordinasi dengan Biro Humas dan Hukum BPS supaya dokumen Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Subsektor Perikanan antara BPS dengan Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan segera terwujud.
- Melakukan pertemuan daring secara berkala (triwulanan/semesteran) dengan PJ Statistik Perikanan di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota untuk evaluasi data perikanan dan kegiatan lain dalam pengumpulan data statistik perikanan. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat pemeriksaan dan evaluasi data yang sudah dilakukan.
- Melakukan koordinasi dengan Dirjen Budidaya, Dirjen Tangkap dan Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai pendataan statistik perikanan agar data yang diperoleh dapat lebih lengkap dan up to date.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan pendataan statistik perikanan tahunan menggunakan CAPI dan uji coba CAPI pendataan statistik perikanan triwulanan untuk memastikan penggunaan CAPI pada pendataan statistik perikanan berjalan lancar.
- Melakukan pembaruan buku pedoman kegiatan-kegiatan statistik perikanan.

c. Direktorat Statistik Industri

Deputi Bidang Statistik Produksi melalui Direktorat Statistik Industri, telah mendukung kompilasi dalam neraca komoditas garam, dengan *output* sebagai berikut:

- Keikutsertaan dalam pembahasan rapat penyusunan neraca komoditas garam bersama kementerian/lembaga terkait.
- Keikutsertaan dalam rapat persiapan, monitoring dan evaluasi untuk validasi data produksi garam.
- Keikutsertaan dalam supervisi survei produksi garam yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam pelaksanaan Pendataan Usaha Garam 2025 terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- *Updating* luas seluruh lahan garam tidak dilaksanakan pada tahun 2025 dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga.
- Kebijakan pengolahan data di KKP mewajibkan penggunaan aplikasi input data yang dibangun secara terintegrasi oleh Pusdatin KKP, namun masih banyak kekurangan dalam aplikasi tersebut yang menghambat petugas dalam input data ataupun beberapa rule validasi yang tidak jalan.
- Pemahaman (*sense of data*) Petugas dan validator KKP terhadap kualitas data yang masuk (diterima) masih perlu ditingkatkan.

Atas kendala tersebut, Direktorat Statistik Industri ikut serta dalam mengawal Pendataan Usaha Garam 2025, melalui kegiatan sebagai berikut:

- Pendampingan dalam setiap pembahasan kegiatan monitoring dan evaluasi pendataan usaha garam.
- Pendampingan pengawasan kegiatan pendataan usaha garam pada daerah daerah sentra garam.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2026, diantaranya adalah:

- Untuk melakukan survei dengan menerapkan metodologi berbasis *probability sampling*, diperlukan kerangka sampel yang baik secara lengkap dan mutakhir. Dengan demikian sampel yang akan terpilih dari penerapan metodologi *sampling* tertentu akan dapat mewakili karakteristik yang diinginkan dalam survei tersebut.
- Untuk menjaga agar kerangka sampel tersebut terjaga kualitasnya, harus dilakukan *updating* (perbaikan) kerangka sampel secara berkala.
- Koordinasi yang lebih kuat dengan Pusdatin KKP terkait penyempurnaan aplikasi input data dan pelaksanaan uji cobanya.
- Penyusunan metadata Pendataan Usaha Garam dan pengajuan rekomendasi statistik sebagai bagian dari perwujudan Sistem Statistik Nasional.

3.4 Prestasi dan Inovasi Deputi Bidang Statistik Produksi

Selama tahun 2025, ketiga direktorat di lingkup Deputi Bidang Statistik Produksi telah berhasil memperoleh prestasi maupun penghargaan, serta melakukan inovasi guna mewujudkan penyediaan data statistik produksi yang lebih cepat, akurat, dan berdampak. Berikut diuraikan secara rinci terkait prestasi serta inovasi Deputi Bidang Statistik Produksi.

3.4.1 Prestasi

1. Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Sepanjang tahun 2025, prestasi yang diraih Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan antara lain:

- a. Memperoleh penghargaan Terbaik III dalam Penilaian Statistik Berkualitas 2025 kategori Unit Kerja Eselon II BPS Pusat.



Gambar 3.5 Penghargaan Terbaik III dalam Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Kategori Unit Kerja Eselon II BPS Pusat

- b. Memperoleh penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon II BPS Pusat dengan Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025 yang dinyatakan Berkualitas.



Gambar 3.6 Penghargaan Unit Kerja Eselon II BPS Pusat dengan Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025 yang dinyatakan Berkualitas (STPHP)

- c. Memperoleh penghargaan Pengelolaan Arsip di Lingkup Unit Kerja dengan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 sebesar 92,419 dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan).



Gambar 3.7 Penghargaan Pengelolaan Arsip di Lingkup Unit Kerja dengan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 (STPHP)

- d. Memperoleh penghargaan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI, atas dukungan dalam penyediaan data komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan selama tahun 2025.



Gambar 3.8 Penghargaan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI

- e. Memperoleh penghargaan dari Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional atas kontribusi dalam penyediaan data komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bulanan untuk proyeksi neraca pangan nasional tahun 2025.



Gambar 3.9 Penghargaan dari Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional (STPHP)

- f. Memperoleh penghargaan dari Asosiasi Gula Indonesia (AGI) atas dukungan dalam penyediaan data terkait perkembangan gula di Indonesia selama tahun 2025.



Gambar 3.10 Penghargaan dari Asosiasi Gula Indonesia

- g. Memperoleh penghargaan dari Asosiasi Teh Indonesia (ATI) atas dukungan dalam penyediaan data terkait perkembangan teh di Indonesia selama tahun 2025.



Gambar 3.11 Penghargaan dari Asosiasi Teh Indonesia

2. Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Sepanjang tahun 2025, prestasi yang diraih Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan antara lain:

- a. Memperoleh penghargaan atas dedikasi dan kontribusi terbaik dalam mendukung pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) BPS pada Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Kategori Unit Kerja Eselon II BPS Pusat.



Gambar 3.12 Penghargaan atas Dedikasi dan Kontribusi Terbaik dalam Mendukung Pelaksanaan EPSS BPS pada Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Kategori Unit Kerja Eselon II BPS Pusat

- b. Memperoleh penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon II BPS Pusat dengan Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025 yang dinyatakan Berkualitas.



Gambar 3.13 Penghargaan Unit Kerja Eselon II BPS Pusat dengan Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025 yang dinyatakan Berkualitas (SP2K)

- c. Memperoleh penghargaan Pengelolaan Arsip di Lingkup Unit Kerja dengan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 sebesar 92,875 dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan).



Gambar 3.14 Penghargaan Pengelolaan Arsip di Lingkup Unit Kerja dengan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 (SP2K)

- d. Memperoleh penghargaan Insan Statistik Teladan tahun 2025 atas nama Zukha Latifah, SST.



Gambar 3.15 Penghargaan Insan Statistik Teladan Tahun 2025

- e. Memperoleh penghargaan dari BAPANAS kepada Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan atas kontribusi dan dukungan dalam penyediaan data pemotongan ternak untuk proyeksi neraca pangan nasional selama tahun 2025



Gambar 3.16 Penghargaan dari Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional

- f. Berperan aktif dalam forum-forum statistik tingkat nasional dan internasional dengan mengirimkan perwakilan dalam *training*, *workshop*, dan seminar secara *offline* atau *online* baik sebagai narasumber ataupun peserta.

3. Direktorat Statistik Industri

Sepanjang tahun 2025, prestasi yang diraih Direktorat Statistik Industri antara lain:

- a. Memperoleh penghargaan Terbaik II dalam Penilaian Statistik Berkualitas 2025 kategori Unit Kerja Eselon II BPS Pusat.



Gambar 3.17 Penghargaan Terbaik II dalam Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Kategori Unit Kerja Eselon II BPS Pusat

- b. Memperoleh penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon II BPS Pusat dengan Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025 yang dinyatakan Berkualitas.
- c. Memperoleh penghargaan Pengelolaan Arsip di Lingkup Unit Kerja dengan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 sebesar 94,675 dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan).
- d. Hasil Analisis Kebutuhan Data Tahun 2025 menunjukkan tingginya relevansi data yang dihasilkan Direktorat Statistik Industri. Data Industri Mikro dan Kecil serta Pertambangan tercatat sebagai salah satu Ragam Data Produksi yang paling banyak dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh pengguna data, baik untuk perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Temuan ini memperkuat capaian Direktorat Statistik Industri dalam aspek kualitas dan pemanfaatan data, sekaligus menegaskan peran strategis statistik industri sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti.
- e. Sebagai pembina data statistik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, BPS melaksanakan pembinaan statistik secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pada Triwulan III Tahun 2025 Direktorat Statistik Industri berhasil meraih capaian Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik tertinggi untuk kategori Eselon II BPS

Pusat. Prestasi ini mencerminkan komitmen Direktorat Statistik Industri dalam memperkuat koordinasi, harmonisasi, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.

3.4.2 Inovasi

1. Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, diantaranya adalah:

a. KSA Padi

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mengembangkan inovasi pendataan luas panen dan produksi padi melalui KSA Padi untuk mengatasi subjektivitas metode *eye estimate*. Inovasi ini menghasilkan data yang lebih cepat dan akurat melalui pemanfaatan perangkat Android dan metode statistik, menyediakan informasi potensi produksi padi tiga bulan ke depan sebagai *early warning system*, menyajikan informasi spasial padi/beras yang mutakhir, serta memperkuat sistem statistik nasional melalui peningkatan koordinasi antarinstansi dalam penyediaan data padi.

KSA Padi merupakan inovasi pendataan luas panen dan produksi padi yang dikembangkan sejak 2018 dan pernah diajukan sebagai inovasi dengan nama RADAR PADI pada 2019. Inovasi ini direplikasi pada KSA Jagung yang dirilis pada 2023, dengan kajian dan pengembangannya sudah dimulai sejak 2019/2020. Bukti implementasi inovasi tersedia pada tautan http://s.bps.go.id/Inovasi_KSAPadi. Adapun penerima manfaat dari inovasi ini meliputi unit kerja internal, BPS secara keseluruhan, K/L/Pemda, serta masyarakat umum.

b. Sedia Data Perusahaan Perkebunan melalui Aplikasi SKB Online (SEDAPP Online)

SEDAPP Online merupakan aplikasi berbasis *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI) yang dirancang untuk mendorong percepatan pengolahan dan diseminasi data komoditas strategis perkebunan. Melalui SEDAPP Online, para pelaku usaha bersama BPS Provinsi dan BPS

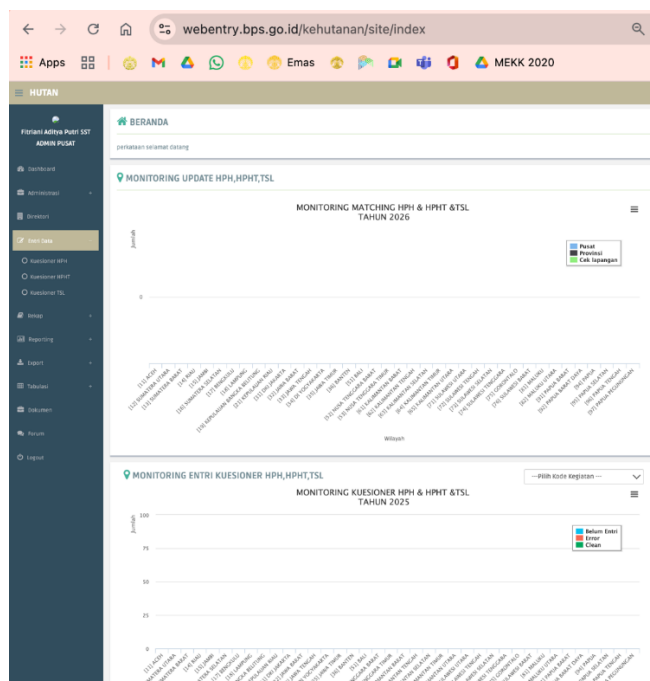
Kabupaten/Kota berperan aktif mengisi data terkini secara mandiri sehingga diperoleh data yang akurat dan disajikan tepat waktu untuk perencanaan pembangunan subsektor perkebunan. Hingga saat ini, sekitar 300 perusahaan (± 15 persen dari total perusahaan) sudah mengisi secara CAWI.

Inovasi ini telah direplikasi untuk data Perkebunan Rakyat melalui e-Statistikbun oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Inovasi diterapkan sejak tahun 2019 dan diperbaharui setiap tahun berdasarkan masukan entitas (Perkebunan Rakyat, PBN, dan PBS), serta pada 2026 telah bersifat publik untuk PBN dan PBS. Bukti implementasi inovasi tersedia pada tautan <https://drive.bps.go.id/s/PsZNPriBG9LqygY>. Adapun penerima manfaat meliputi unit kerja internal, BPS secara keseluruhan, K/L/Pemda, pelaku usaha (PBN dan PBS), asosiasi, dan dewan komoditas.

2. Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Pada tahun 2025, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan melakukan beberapa inovasi, antara lain:

- a. Perubahan moda pendataan dari Paper Assited Personal Interviewing (PAPI) menjadi *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) SI-UTAN.



Gambar 3.18 Inovasi CAPI SI-UTAN

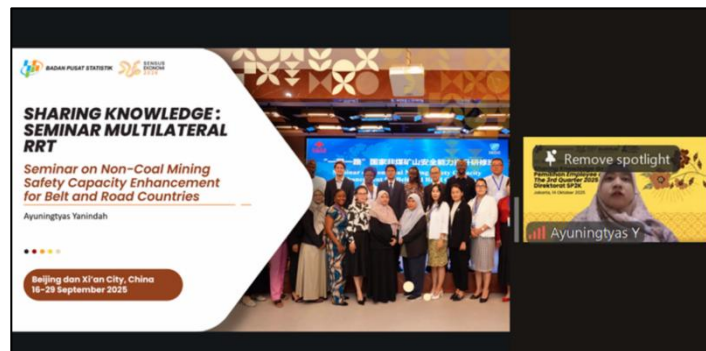
b. Menyelenggarakan beberapa kegiatan *Sharing Knowledge*, yang diantaranya:

- *Sharing Knowledge Agriculture Statistics* di Jepang oleh Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan pada 14 Oktober 2025.



Gambar 3.19 *Sharing Knowledge Agriculture Statistics*

- *Sharing Knowledge Seminar Multilateral RRT* oleh Ayuningtyas Yanindyah pada 14 Oktober 2025.



Gambar 3.20 *Sharing Knowledge Seminar Multilateral RRT*

- *Sharing Knowledge Tesis S2* di Nanyang Technological University (NTU) oleh Fitriana Nur Rachmah pada 29 Agustus 2025.



Gambar 3.21 *Sharing Knowledge Tesis S2*

- *Sharing Knowledge* Investasi Emas oleh Tim Antam pada 18 Juli 2025.



Gambar 3.22 *Sharing Knowledge* Investasi Emas

3. Direktorat Statistik Industri

Pemerintah mengembangkan KEK dan KI sebagai pusat aglomerasi usaha dan lokus pertumbuhan ekonomi baru. Dalam pendataan BPS, kawasan ini dipetakan sebagai konsentrasi kegiatan ekonomi yang mendorong hilirisasi, nilai tambah, dan investasi. KEK dan KI menjadi tujuan banyak perusahaan sektor pengolahan, logistik, dan jasa pendukung sehingga berkontribusi signifikan terhadap PDRB wilayah. Data BPS menunjukkan sekitar separuh PDB industri pengolahan berasal dari aktivitas di KEK dan KI. Direktorat Statistik Industri turut serta dalam Penguatan Pendataan Kawasan Ekonomi Khusus - Kawasan Industri Menyongsong Sensus Ekonomi (SE) 2026. Kegiatan *Fullday* Penguatan Pendataan KEK-KI Menyongsong Sensus Ekonomi 2026 dimaksudkan untuk penguatan sinergi antara BPS, Dewan Nasional KEK, Pengelola KEK-KI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Himpunan Kawasan Industri (HKI) dalam penyediaan dan peningkatan data statistik di kawasan.

Berbagai upaya telah dilakukan Direktorat Statistik Industri untuk mengatasi kendala rasionalisasi anggaran yang dihadapi antara lain dengan melaksanakan modernisasi proses bisnis berupa perubahan moda pendataan yang semula konvensional dengan *Paper Assisted Personal Interviewing* (PAPI) menjadi berbasis sistem *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) atau *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI). Pada Tahun 2025, beberapa survei di Direktorat Statistik Industri telah menggunakan aplikasi *Flexible*

Authentically Survey in Harmony (FASIH) dalam penerapan moda pendataan CAPI/CAWI antara lain Updating Direktori Perusahaan Awal (DPA), Survei Industri Besar dan Sedang (IBS) Triwulanan, Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Triwulanan, Survei Pertambangan dan Energi, dan Updating Perusahaan Konstruksi (UDP). Hal ini dilaksanakan dalam rangka implementasi teknologi terkini dalam proses pengumpulan dan pengolahan data sehingga memudahkan tahapan proses selanjutnya.

Direktorat Statistik Industri mulai aktif melakukan publisitas melalui media sosial Instagram sebagai sarana untuk mensosialisasikan berbagai produk statistik yang dihasilkan, sekaligus meningkatkan pemahaman publik terhadap peran dan cakupan data yang dikelola, seperti industri pengolahan, pertambangan dan energi, serta konstruksi. Selain konten visual informatif, Direktorat Statistik Industri juga menghadirkan *podcast* berjudul “Bisik Data: Bincang Statistik Industri Kita” yang membahas lebih mendalam mengenai kegiatan statistik dan pemanfaatan data statistik industri. *Podcast* telah bertransformasi dari sekadar tren menjadi instrumen strategis dalam mendukung *Open Government*. Melalui media ini, hambatan komunikasi birokrasi yang kaku berhasil didobrak, menciptakan ekosistem informasi yang lebih dinamis dan partisipatif. Kegiatan *podcast* menjadi sarana edukasi yang hadir untuk menjembatani informasi kebijakan publik agar lebih relevan di masyarakat. Penggunaan media *podcast* memberikan nilai manfaat yang berkelanjutan (*sustainable*) dibandingkan dengan seminar atau sosialisasi tatap muka sekali jalan.

Pemanfaatan *insight* dari data menjadi bagian penting dalam mendukung kinerja Direktorat Statistik Industri (DSI) yang mengelola beragam data kompleks, seperti data industri besar dan sedang, industri menengah dan kecil, pertambangan dan energi, hingga konstruksi. Meskipun secara teknis pengolahan data telah dikuasai dengan baik, kemampuan menggali *insight* untuk melakukan analisis mendalam dan menyajikannya dalam visualisasi yang informatif masih perlu diperkuat. Direktorat Statistik Industri melakukan pelatihan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas pegawai agar mampu mengubah data mentah menjadi dashboard interaktif yang tidak sekadar

menyajikan laporan, tetapi juga analisis yang menggambarkan pola, tren, dan hubungan antar variabel. Dengan kemampuan ini, diharapkan visualisasi yang dihasilkan dapat membantu pimpinan dan pemangku kepentingan memahami kondisi sektor industri, pertambangan dan energi, serta konstruksi secara cepat, akurat, dan komprehensif, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data di lingkungan BPS.

Selain itu, Direktorat Statistik Industri juga mengadakan *sharing knowledge* dengan tema *Exploring String Matching Methods* untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Dalam pekerjaan di Direktorat Statistik Industri, metode *string matching* sangat berguna untuk proses pembersihan data (*data cleaning*), penggabungan data dari berbagai sumber (*data merging*), standarisasi nama perusahaan atau komoditas, serta meningkatkan akurasi pencocokan data responden antar periode survei.

Dalam rangka membangun kekompakan dan kerjasama antar pegawai, Direktorat Statistik Industri mengadakan *Workshop Refleksi Diri* untuk *Membangun Soliditas Kerja: River of Life*. *River of Life* adalah model visual atau metafora yang menggambarkan perjalanan hidup seseorang dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan, yang digunakan untuk membantu memahami dan mengelola kehidupan. Metode ini dapat berupa ilustrasi sungai yang mencakup momen-momen penting, orang-orang yang berpengaruh, tantangan, dan harapan di masa depan, dengan tujuan membantu individu menemukan arah, merencanakan tujuan, dan lebih mengenal diri sendiri.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pengembangan ekonomi kreatif, Direktorat Statistik Industri melaksanakan inovasi kinerja melalui Program Pelatihan Barista. Kegiatan pelatihan barista ini dilaksanakan secara terstruktur dan berbasis kompetensi, mencakup materi teori dan praktik. Pegawai Direktorat Statistik Industri mendapatkan pembekalan mengenai jenis-jenis kopi, Teknik pengolahan dan penyeduhan (*manual brew* dan *espresso-based*), penggunaan serta perawatan mesin kopi, standar kebersihan dan pelayanan pelanggan, hingga dasar-dasar kewirausahaan di bidang *coffee shop*. Pelatihan juga melibatkan instruktur profesional dan praktisi industri untuk memastikan materi yang diberikan.

Direktorat Statistik Industri dengan berbagai permasalahan, tantangan dan peluang yang ada mencoba mengoptimalkan program kegiatan dalam mendukung perubahan Direktorat Statistik Industri yang lebih baik. Dalam upaya mendorong SDM BPS umumnya dan Direktorat Statistik Industri khususnya, Direktorat Statistik Industri mencoba mengimplementasikan program perubahan dalam rangka reformasi birokrasi berupa Kas dan Tali Asih (Katalis) DSI, *Coachme Program*, *Knowledge Cafe*, *Funergy (Fun & Energy)*, dan *Fun Coaching*.

3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Deputi Bidang Statistik Produksi didukung oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Deputi Bidang Statistik Produksi telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran.

Tabel 3.20 Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Direktorat Tahun 2025

Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	Persentase Realisasi (Persen) $K(3)/K(2)*100\%$
(1)	(2)	(3)	(4)
Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.016.403.000	978.454.154	96,27
Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	734.221.000	626.276.396	85,30
Direktorat Statistik Industri	560.090.000	505.316.141	90,22
Total	2.310.714.000	2.110.046.691	91,32

Keterangan: pagu dan realisasi anggaran berdasarkan Laporan Daya Serap pada Aplikasi SAKTI per Desember 2025 kondisi 20 Januari 2026

Tautan: http://s.bps.go.id/POK_SAKTI_2025

Berdasarkan Laporan Daya Serap aplikasi SAKTI per Desember 2025 kondisi 20 Januari 2026 pada Tabel 3.20, total nilai DIPA dari ketiga Direktorat di lingkup Deputi Bidang Statistik Produksi pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 2.310.714.000 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 91,32 persen. Terdapat beberapa catatan mengenai pagu anggaran pada aplikasi SAKTI sebagai berikut:

Tabel 3.21 Catatan Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Direktorat Tahun 2025

No	Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pada Laporan Daya Serap SAKTI, total pagu anggaran Direktorat STPHP tercatat sebesar Rp. 1.041.403.000. Namun, dari pagu tersebut terdapat pagu anggaran yang tidak dapat dikelola oleh Direktorat STPHP sebesar Rp. 25.000.000, yaitu pada komponen biaya paket <i>meeting</i> (dapat dilihat pada tautan https://drive.bps.go.id/s/TYHam8cDgzjm3gL). Anggaran dimaksud tidak dapat diserap karena tidak muncul pada aplikasi <i>Back Office</i> yang dikelola oleh PJK (dapat dilihat pada tautan https://drive.bps.go.id/s/AC6EpASAmAZdFSw). Oleh karena itu, pengelolaan anggaran tersebut seharusnya tidak diperhitungkan sebagai capaian serapan Direktorat STPHP dalam laporan akhir. Dengan demikian, pagu anggaran yang dikelola Direktorat STPHP adalah sebesar Rp.1.016.403.000, dengan capaian realisasi sebesar Rp.978.454.154.
2	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Pagu anggaran dan realisasi sudah sesuai.
3	Direktorat Statistik Industri	Pada Laporan Daya Serap SAKTI, total pagu anggaran Direktorat Statistik Industri tercatat sebesar Rp. 1.127.050.000 dengan realisasi sebesar Rp. 994.109.517. Namun, dari total pagu dan realisasi tersebut, terdapat komponen pagu anggaran yang tidak dapat dikelola (digunakan), yaitu pagu anggaran untuk kegiatan <i>Economic Wide Survey</i> (EWS) dengan pagu sebesar Rp. 566.960.000 dan realisasi sebesar Rp. 488.793.376, karena Direktorat Statistik Industri bukan merupakan pengampu dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, dalam penghitungan pagu dan realisasi anggaran Direktorat Statistik Industri, komponen pagu anggaran EWS dikeluarkan dalam perhitungan, sehingga total pagu anggaran Direktorat Statistik Industri menjadi Rp. 560.090.000 dengan realisasi sebesar Rp. 505.316.141.

Dengan beberapa catatan di atas, pada tahun 2025, total pagu anggaran Deputi Bidang Statistik Produksi sebesar Rp. 2.310.714.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.110.046.691, atau setara dengan 91,32 persen dari total pagu yang dapat digunakan. Adapun realisasi anggaran per sasaran menurut Direktorat pada tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.22 berikut.

Tabel 3.22 Realisasi Anggaran per Sasaran Menurut Direktorat Tahun 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	Pagu yang Dapat Digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi
Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								
Sasaran 1. Terwujudnya penyediaan data dan <i>Insight</i> statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas				100,00	975.217.000	951.628.564	97,58	1,02
Persentase publikasi/laporan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Persen	100	100	100,00	975.217.000	951.628.564	97,58	1,02
Sasaran 2. Terwujudnya pembinaan statistik sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang berkualitas				114,28	41.186.000	26.825.590	65,13	1,75
Tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Poin	75	85,71	114,28	41.186.000	26.825.590	65,13	1,75
Total				107,14	1.016.403.000	978.454.154	96,27	1,11
Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan								

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	Pagu yang Dapat Digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi
Sasaran 1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas				100	694.021.000	621.686.396	89,58	1,12
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	Persen	100	100	100	694.021.000	621.686.396	89,58	1,12
Sasaran 2. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan				120,00	40.200.000	4.590.000	11,42	10,50
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Poin	75,80	92,33	120,00	40.200.000	4.590.000	11,42	10,50
Total				110,00	734.221.000	626.276.396	85,30	1,29
Direktorat Statistik Industri								
Sasaran 1. Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Industri yang berkualitas				100,00	509.868.000	462.469.941	90,70	1,10
Persentase publikasi/laporan Statistik Industri yang berkualitas	Persen	100	100	100,00	509.868.000	462.469.941	90,70	1,10
Sasaran 2. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Direktorat Statistik Industri				119,50	50.222.000	42.846.200	85,31	1,40
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral	Poin	75	89,85	119,50	50.222.000	42.846.200	85,31	1,40

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	Pagu yang Dapat Digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi
Direktorat Statistik Industri								
Total				109,75	560.090.000	505.316.141	90,22	1,22

Dengan demikian, realisasi anggaran per sasaran Deputi Bidang Statistik Produksi pada tahun 2025 disajikan pada berikut:

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	Pagu yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi
Sasaran 1. Peningkatan Pemanfaatan Data dan Insight Statistik Produksi yang Berkualitas				106,69	2.179.106.000	2.035.784.901	93,42	1,14
Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi	Persen	83,95	89,57	106,69	2.179.106.000	2.035.784.901	93,42	1,14
Sasaran 2. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektorale Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi yang Berkualitas				100,00	131.608.000	74.261.790	56,42	1,77
Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/ Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorale	Persen	16,32	16,32	100,00	131.608.000	74.261.790	56,42	1,77
Total				103,35	2.310.714.000	2.110.046.691	91,32	1,13

Berdasarkan Tabel 3.23, dukungan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis pertama yaitu “Peningkatan Pemanfaatan Data dan *Insight* Statistik Produksi yang Berkualitas” sebesar Rp. 2.179.106.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.035.784.901. Sementara itu, dukungan anggaran untuk sasaran strategis yang kedua yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi yang Berkualitas” sebesar Rp. 131.608.000 dengan realisasi sebesar Rp. 74.261.790.

Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, Deputi Bidang Statistik Produksi merealisasikan penggunaan anggaran sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. Pengelolaan anggaran dilakukan secara cermat dan efisien guna memastikan seluruh rencana kegiatan dapat terlaksana secara optimal dalam rangka mencapai kinerja yang maksimal. Tingkat efisiensi yang dihasilkan selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana kinerja organisasi telah berjalan secara efektif, serta untuk mengidentifikasi potensi pemborosan dalam pemanfaatan anggaran.

Angka efisiensi dapat dihitung melalui persamaan sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\% \text{ Realisasi Anggaran}}$$

Keterangan:

- Jika ≥ 1 artinya efisien
- Jika < 1 artinya tidak efisien

Berdasarkan persamaan di atas, efisiensi anggaran yang dicapai oleh Deputi Bidang Statistik Produksi pada tahun 2025 adalah sebesar 1,13. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Deputi Bidang Statistik Produksi telah berada dalam kategori “efisien”, dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 91,32 persen dan capaian kinerja sebesar 103,35 persen. Hal tersebut juga telah tercermin pada sasaran strategis yang pertama, yaitu “Peningkatan Pemanfaatan Data dan *Insight* Statistik Produksi yang Berkualitas”, yang memiliki tingkat efisiensi sebesar 1,14, dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 93,42 persen dan capaian kinerja sebesar 106,69 persen.

Demikian juga pada sasaran strategis yang kedua, yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kementerian/ Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi yang Berkualitas”, diperoleh tingkat efisiensi anggaran sebesar 1,77, dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 56,42 persen dan capaian kinerja sebesar 100 persen. Nilai efisiensi yang relatif tinggi tersebut menggambarkan bahwa target kinerja pada sasaran strategis ini tetap dapat dicapai secara penuh meskipun realisasi anggarannya relatif rendah, sehingga menunjukkan adanya pengelolaan sumber daya yang efektif serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Secara keseluruhan, capaian efisiensi anggaran tahun 2025 menunjukkan bahwa Deputi Bidang Statistik Produksi mampu melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, dengan kinerja yang tercapai sesuai bahkan melampaui target, serta tetap menjaga penggunaan anggaran secara efisien.

Upaya-upaya efisiensi anggaran yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Statistik Produksi, diantaranya adalah:

1. Rapat koordinasi, *workshop*, pelatihan atau *briefing* yang melibatkan peserta BPS Pusat, BPS Provinsi/Kabupaten/Kota, K/L/D/I, maupun petugas/mitra BPS dilakukan secara *online* (seperti *Briefing* KSA, Briefing VP-Horti dan VN-Horti, Rapat Teknis Evaluasi Angka Produktivitas Padi dan Palawija SR 3 2024, Refreshing Input Data Sedapp Online, Rakor Persiapan Rilis Luas Panen dan Produksi Padi dan Jagung di Indonesia 2024 (Angka Tetap), *briefing* Statistik Perusahaan Perikanan tahun 2025, dan *briefing* kegiatan statistik industri. Selain itu, dilaksanakan juga kegiatan secara *hybrid*, yaitu Koordinasi Pengelolaan Data Kehutanan dengan Kementerian Kehutanan untuk mengurangi pengeluaran konsumsi.
2. Pembangunan aplikasi pendataan melalui moda CAWI dan CAPI. Moda CAWI merupakan kegiatan pendataan online melalui aplikasi FASIH berbasis web tanpa menggunakan petugas pendataan (pengisian kuesioner secara mandiri oleh responden) sedangkan Moda CAPI merupakan kegiatan pendataan melalui aplikasi FASIH berbasis mobile tanpa menggunakan kuesioner cetak. Dengan demikian, penggunaan aplikasi pendataan melalui moda CAPI dan CAWI telah menghemat anggaran pendataan dan pengumpulan data.

3. Diseminasi dilakukan melalui *web* sehingga menghemat anggaran pencetakan publikasi dan Berita Resmi Statistik (seperti Berita Resmi Statistik Luas Panen dan Produksi Padi dan Jagung, Statistik Perusahaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura Lainnya, Publikasi Statistik Perusahaan Budidaya dan Penangkapan Ikan Tahun 2024, Publikasi Statistik Perusahaan Kehutanan, dan lain-lain).
4. Kegiatan pembinaan sektoral dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, sehingga tidak seluruh kegiatan pembinaan dilaksanakan secara tatap muka langsung (seperti diskusi intensif melalui *Zoom Meeting* dan *WhatsApp Group* K/L mitra Deputi Bidang Statistik Produksi).
5. Perjalanan dinas dilakukan secara lebih efisien dengan menyesuaikan kondisi anggaran yang terbatas. Selain itu, pengaturan jadwal perjalanan dilakukan secara kolektif untuk beberapa kegiatan sekaligus guna menghindari perjalanan berulang ke lokasi yang sama.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang Statistik Produksi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS tahun 2025-2029.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Deputy Bidang Statistik Produksi menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Deputy Bidang Statistik Produksi menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata. Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata capaian kinerja IKU kegiatan Deputy Bidang Statistik Produksi tahun 2025 sebesar 103,35 persen dengan penyerapan anggaran sebesar 91,32 persen.

Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Deputy Bidang Statistik Produksi telah sesuai visi, misi, sasaran, tujuan, program, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, efisiensi anggaran yang dicapai oleh Deputy Bidang Statistik Produksi pada tahun 2025 adalah sebesar 1,13. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Deputy Bidang Statistik Produksi telah berada dalam kategori “efisien”.

Meskipun pelaksanaan program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, Deputy Bidang Statistik Produksi menyadari bahwa masih ditemukan permasalahan yang memerlukan rekomendasi perbaikan kinerja untuk pelaksanaan kegiatan periode berikutnya.

4.2 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada pada pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Statistik Produksi tahun 2025, serta mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa yang akan datang, berikut beberapa rekomendasi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Melanjutkan kerjasama dengan K/L berdasarkan Nota Kesepahaman/ MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
2. Melakukan penguatan SBR melalui *updating frame* survei statistik produksi yang selanjutnya digunakan sebagai *prelist* Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
3. Melakukan kegiatan prioritas statistik produksi seperti SE2026, SKP2026, KSA dan Ubinan, serta kegiatan lainnya.
4. Menyediakan Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang menjadi tanggung jawab Direktorat Statistik Industri.
5. Melakukan internalisasi Pembina Statistik Sektor (PSS) BPS tahun 2026.
6. Mengajukan permintaan data sektoral K/L Mitra untuk kelengkapan penyusunan data pertumbuhan ekonomi.
7. Melakukan pemetaan data yang akan dialirkan ke BPS melalui sistem dari K/L yang dibina.
8. Melakukan kerjasama dan kolaborasi yang lebih intensif dengan K/L produsen data.

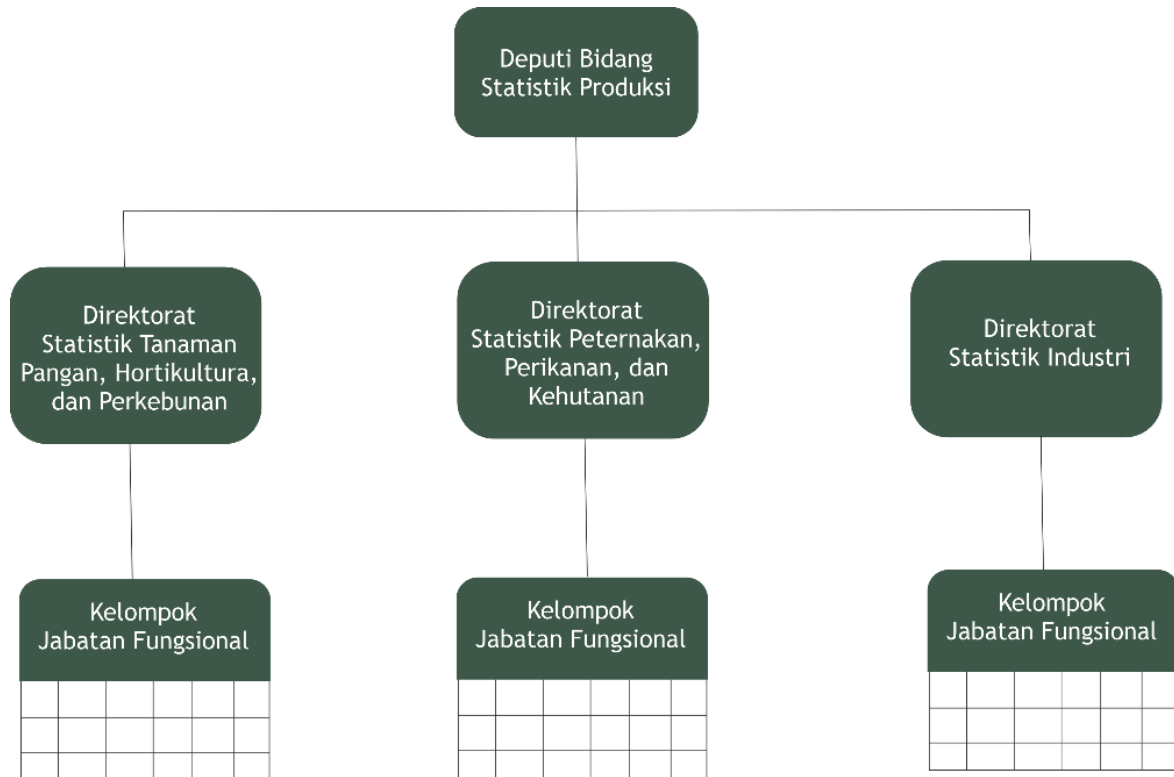
Selain itu, rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Statistik Produksi yang ditujukan kepada Lembaga maupun unit kerja Eselon I lainnya sebagai berikut:

1. Perlu adanya keseimbangan antara ketersediaan sarana infrastruktur dengan jumlah pegawai, oleh karena itu, Sekretariat Utama (Biro Sumber Daya Manusia, Biro Perencanaan, dan Biro Umum) melakukan kalibrasi dan menyediakan tambahan sarana infrastruktur.
2. Penyusunan jadwal survei di BPS diharapkan tidak tumpang tindih sehingga pelaksanaannya dapat lebih terkoordinasi dan efisien. Oleh karena itu, Sekretariat Utama (Biro Perencanaan) diminta melakukan harmonisasi seluruh jadwal kegiatan di BPS.

3. Alokasi anggaran kegiatan pendataan statistik produksi dan kegiatan pembinaan statistik sektoral perlu disusun secara lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat prioritas dan kesulitan kegiatan. Untuk itu, perlu dilakukan diskusi dengan Sekretariat Utama (Biro Perencanaan) agar standar biaya masukan sesuai dengan kebutuhan.
4. Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara aplikasi SAKTI dan *BackOffice* yang memengaruhi capaian realisasi anggaran unit kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dengan Sekretariat Utama (Biro Keuangan) agar realisasi anggaran dapat menjadi satu pintu.
5. Mengoptimalkan data administratif yang sudah dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L), sehingga perlu kolaborasi dan koordinasi antar unit kerja di BPS (internal) dan antara BPS dengan K/L (eksternal).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Susunan Organisasi Deputy Bidang Statistik Produksi



Lampiran 2 Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Reviu



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG STATISTIK PRODUKSI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Habibullah, S.Si., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Statistik Produksi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Amalia Adininggar W., S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Amalia Adininggar W., S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
NIP. 19720305199903 2 003

Jakarta, 19 Februari 2025
Pihak Pertama



M. Habibullah, S.Si., M.Si.
NIP. 19670619198901 1 001

Lanjutan Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Reviu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG STATISTIK PRODUKSI			
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Pemanfaatan Data dan <i>Insight</i> Statistik Produksi yang Berkualitas	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi	83,95 Persen
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi yang Berkualitas	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial	16,32 Persen

	Program/Kegiatan		Anggaran
1)	2904 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri Pertambangan dan Penggalian Energi dan Konstruksi	Rp.	5.995.116.000
2)	2909 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan Perikanan dan Kehutanan	Rp.	2.912.442.000
3)	2910 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Rp.	5.804.569.000
	Jumlah	Rp.	14.712.127.000

<p>Kepala Badan Pusat Statistik</p>  <p><u>Amalia Adininggar W., S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D</u> NIP. 19720305199903 2 003</p>	<p>Jakarta, 19 Februari 2025 Deputi Bidang Statistik Produksi</p>  <p><u>M. Habibullah, S.Si., M.Si.</u> NIP. 19670619198901 1 001</p>
---	---

Lanjutan Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Awal



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG STATISTIK PRODUKSI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Habibullah, S.Si., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Statistik Produksi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Amalia Adininggar W., S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pusat Statistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Amalia Adininggar W., S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
NIP. 19720305199903 2 003

Palembang, 24 Januari 2025
Pihak Pertama



M. Habibullah, S.Si., M.Si.
NIP. 19670619198901 1 001

Lanjutan Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Awal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG STATISTIK PRODUKSI			
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Pemanfaatan Data dan <i>Insight</i> Statistik Produksi yang Berkualitas	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi	83,95 Persen
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi yang Berkualitas	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	16,32 Persen

	Program/Kegiatan		Anggaran
1)	2904 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri Pertambangan dan Penggalian Energi dan Konstruksi	Rp.	5.995.116.000
2)	2909 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan Perikanan dan Kehutanan	Rp.	2.912.442.000
3)	2910 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Rp.	5.804.569.000
	Jumlah	Rp.	14.712.127.000

<p>Plt. Kepala Badan Pusat Statistik</p>  <p><u>Amalia Adininggar W., S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D</u> NIP. 19720305199903 2 003</p>	<p>Palembang, 24 Januari 2025 Deputi Bidang Statistik Produksi</p>  <p><u>M. Habibullah, S.Si., M.Si.</u> NIP. 19670619198901 1 001</p>
--	--

Lanjutan Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Awal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG STATISTIK PRODUKSI

Tujuan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
Tujuan 1. Menyediakan data Statistik Produksi yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya ketersediaan Data Statistik Produksi yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data statistik Produksi sebagai dasar pembangun nasional (%)	Persen	96,72
	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas Statistik Bidang Produksi (%)	Persen	90
Tujuan 2. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan statistik bidang produksi melalui SSN			
Penguatan Statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaan (%)	Persen	100

Kegiatan

1. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi
2. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
3. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Jumlah

Anggaran

Rp. 5.607.141.000,-

Rp. 1.916.029.000,-

Rp. 28.529.142.000,-

Rp. 36.052.312.000,-

Pihak Kedua

Amalia Adininggar W., S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
NIP. 19720305 199903 2 003

Jakarta, 29 Januari 2024

Pihak Pertama

M. Habibullah S.Si., M.Si.
NIP. 19670619 198901 1 001

Lampiran 3 Jumlah Pegawai Unit Kerja Deputi Bidang Statistik Produksi Menurut Unit Organisasi dan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Unit Organisasi/ Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		< D1	DIII	DIV/ S1	S2	S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Pegawai Unit Kerja Deputi Bidang Statistik Produksi		3	7	80	71	3	164
1	Deputi Bidang Statistik Produksi	-	-	-	1	-	1
2	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1	3	28	24	1	57
3	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	-	1	25	23	1	50
4	Direktorat Statistik Industri	2	3	27	23	1	56

Lampiran 4 Jumlah Pegawai Unit Kerja Deputi Bidang Statistik Produksi Menurut Unit Organisasi dan Golongan Kepangkatan Tahun 2025

No.	Unit Organisasi/ Jabatan	Golongan Kepangkatan				Jumlah
		I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Pegawai Unit Kerja Deputi Bidang Statistik Produksi		-	3	120	41	164
1	Deputi Bidang Statistik Produksi	-	-	-	1	1
2	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	2	41	14	57
3	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	-	-	38	12	50
4	Direktorat Statistik Industri	-	1	41	14	56

Lampiran 5 Jumlah Pejabat Fungsional Unit Kerja Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025

Deputi Bidang Statistik Produksi

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan					Jumlah
		Penyelia/ Terampil/ Lainnya	Pertama	Muda	Madya	Utama	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Statistisi	7	38	69	29	1	144
2	Arsiparis	1	3	-	-	-	4
3	Umum	6	-	-	-	-	6

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan					Jumlah
		Penyelia/ Terampil/ Lainnya	Pertama	Muda	Madya	Utama	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Statistisi	2	14	22	8	-	46
2	Arsiparis	-	1	-	-	-	1
3	Umum	1	-	-	-	-	1

Lanjutan Lampiran 5

Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan					Jumlah
		Penyelia/ Terampil/ Lainnya	Pertama	Muda	Madya	Utama	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Statistisi	1	10	23	11	1	46
2	Arsiparis	-	1	-	-	-	1
3	Umum	3	-	-	-	-	3

Direktorat Statistik Industri

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan					Jumlah
		Penyelia/ Terampil/ Lainnya	Pertama	Muda	Madya	Utama	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Statistisi	4	14	24	10	-	52
2	Arsiparis	1	1	-	-	-	2
3	Umum	2	-	-	-	-	2

Lampiran 6 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-B Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id

Nomor : T-118/08100/PW.120/LHE/2025 Jakarta, 22 Desember 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025

Yth. Deputi Bidang Statistik Produksi
di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS, Inspektorat Wilayah I telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Statistik Produksi menunjukkan nilai sebesar "74.15" dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah "Sangat Baik".

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara beserta seluruh jajaran, atas kerjasama dan kesungguhan dalam memenuhi dokumen pendukung kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP. Semoga Deputi Bidang Statistik Produksi dapat lebih meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerjanya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result-oriented government*) dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pt Inspektur Wilayah I,



Eko Yuwono

Tembusan:

1. Kepala BPS
2. Wakil Kepala BPS
3. Inspektur Utama



* Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Lanjutan Lampiran 6

E. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan metode evaluasi sederhana/*desk evaluation*, dan evaluasi terbatas menggunakan data awal pengisian kertas kerja implementasi SAKIP dan kriteria dokumen evaluasi yang diisi oleh anggota tim Evaluator, dan revidi berjenjang oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis. Selanjutnya dilakukan revidi antar tim evaluator melalui kegiatan panelisasi Evaluasi AKIP. Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada Deputi Bidang Statistik Produksi memperoleh nilai **"74.15"** dengan predikat **"BB"** yaitu **"Sangat Baik"**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perencanaan Kinerja	30	21.30	22.80
2.	Pengukuran Kinerja	30	22.80	22.80
3.	Pelaporan Kinerja	15	10.20	09.30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.50	19.25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	72.80	74.15
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Perencanaan Kinerja

- 1) Telah terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015.
- 2) Unit kerja telah menyusun Renstra Terbaru 2025-2029, ditandatangani Pimpinan, dan dipublikasikan pada laman PPID.
- 3) Unit Kerja telah menetapkan PK Pimpinan Unit Kerja Tahun 2025 serta mempublikasikan pada laman PPID.
- 4) Telah terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja melalui aplikasi KRISNA.
- 5) Telah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja melalui aplikasi KRISNA.
- 6) Telah terdapat seluruh dokumen perencanaan kinerja jangka menengah unit kerja periode sebelumnya yang ditandatangani dan dipublikasikan melalui PPID dengan lengkap, yaitu Revidi Renstra 2020 dan Renstra 2025-2029.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSi), BSSN
 * Pinda kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Lanjutan Lampiran 6

F. Rekomendasi

Terhadap hasil evaluasi tersebut serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Deputi Bidang Statistik Produksi untuk:



- Dokumen ini telah diintegrasikan secara otomatis menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Elektronik (BPJPE) BPSN
- Untuk lebih detail, kunjungi laman www.bps.go.id

1. Meningkatkan kualitas perencanaan strategis dengan menyempurnakan notulen penetapan target Renstra melalui penambahan dasar hitung yang sistematis, basis data pendukung yang valid, dan alasan logis yang komprehensif untuk setiap target [1.2.4.1].
2. Meningkatkan akuntabilitas penetapan target kinerja tahunan dengan menyempurnakan notulen penetapan Perjanjian Kinerja 2026 melalui penambahan dasar hitung yang terukur, basis data yang akurat, dan alasan logis yang kuat untuk setiap indikator kinerja sehingga target yang ditetapkan memiliki landasan yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan [1.2.6.1].
3. Meningkatkan kualitas monitoring kinerja strategis dengan menyempurnakan notula monitoring capaian Renstra 2025 melalui penambahan analisis capaian yang akurat, kendala yang mendalam, solusi yang terstruktur, rencana tindak lanjut yang spesifik, penetapan PIC yang jelas, dan batas waktu yang tegas [1.3.2.1].
4. Menyempurnakan mekanisme pengukuran kinerja individu dengan mengembangkan sistem verifikasi SKP Maret 2026 yang memungkinkan penelusuran hingga ke sumber data yang valid melalui dokumentasi bukti dukung yang sistematis [2.2.13.1].
5. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja 2026 yang telah dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian reward dan punishment yang selaras dengan kertas kerja penilaian [2.3.14.2].
6. Memperbaiki kualitas dokumentasi evaluasi kinerja dengan merevisi notula TW II, III, dan IV 2025 agar memuat analisis capaian yang akurat, kendala yang komprehensif, solusi yang terstruktur, rencana tindak lanjut yang spesifik, penetapan PIC yang jelas, dan batas waktu yang tegas sesuai pedoman. [3.1.17.1].
7. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan menyempurnakan Lakin 2025 agar memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Biro Perencanaan melalui gap analysis, revisi sistematis, dan implementasi template standar sehingga laporan kinerja dapat menjadi instrumen akuntabilitas yang efektif dan informatif [3.2.21.1].
8. Memperbaiki sistem dokumentasi tindak lanjut dengan mengembangkan database bukti pelaksanaan RTL TW IV 2025 yang komprehensif berupa dokumentasi foto,

Lanjutan Lampiran 6

laporan progress, dan bukti output kegiatan yang terstruktur sehingga dapat memastikan pelaksanaan tindak lanjut dapat diverifikasi. [3.3.19.1].

9. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja 2025 sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian reward dan punishment dengan menyusun mekanisme yang komprehensif, menetapkan kriteria kinerja yang jelas, melibatkan seluruh pegawai dalam penilaian, dan memastikan legalisasi pimpinan sehingga dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai dalam mencapai target kinerja [3.3.20.1].

Selanjutnya bukti tindak lanjut atas rekomendasi agar didokumentasikan dan akan dipantau pada evaluasi akuntabilitas kinerja periode Tahun 2026.

Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja



- 1 Andi Pujiono, SE (Pengendali Teknis)
NIP. 198509142010031002
- 2 Wira Wahyuni, SST, M.S.E (Ketua Tim)
NIP. 198907222013112002
- 3 Vony Wahyunurani, SST, M.S.A (Anggota Tim)
NIP. 198611102009022002



* Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSi), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Sumber: Surat Plt. Inspektur Wilayah I Nomor T-118/08100/PW.120/ LHE/2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Statistik Produksi Tahun 2025

Lampiran 7 Daftar Dokumen Pemerintah yang Digunakan sebagai Dasar Hitung Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS)



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sulomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3641195, 3642505, 3610291-4,
Fax. (021) 3657046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id

Nomor : B-54/02000/PR.620/2026 Jakarta, 15 Januari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Nilai Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS) 2025

Yth. :

1. Deputi Bidang Statistik Sosial
2. Deputi Bidang Statistik Produksi
3. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
4. Deputi Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

di-

Tempat

Dalam rangka Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV 2025, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 163 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029, terdapat indikator Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS) yang digunakan untuk mengukur kinerja lembaga (BPS), Deputi Bidang Statistik Sosial, Deputi Bidang Statistik Produksi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, serta Deputi Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.
2. Biro Perencanaan dan Direktorat Diseminasi telah menyelesaikan penghitungan realisasi indikator TPDS tahun 2025, baik di level lembaga maupun deputi. Hasil penghitungan dapat diunduh **pada tautan <http://s.bps.go.id/TPDS-2025>**. Nilai dalam tautan tersebut digunakan sebagai data realisasi pada Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV 2025 dan Laporan Kinerja Tahun 2025.
3. Hasil TPDS 2025 agar menjadi landasan perbaikan kinerja ke depannya khususnya dalam mencapai sasaran strategi "Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan".
4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdr. M. Irfan Sudrajat (Hp.: 0822-2128-2347)**.

Lanjutan Lampiran 7

-2-

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

 Plt. Sekretaris Utama,

Pudji Ismartini

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik, sebagai laporan;
2. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, sebagai laporan;
3. Inspektur Utama; dan
4. Plt. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.

Lanjutan Lampiran 7

No.	Dokumen	Pemanfaatan	Relevansi	Kemutakhiran	Deputi Produksi		
		Data Deputi	Data Deputi	Data Deputi	Pi	Qi	Pi.Qi
		Produksi	Produksi	Produksi			
1	Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ya	Ya	Ya	1	1	1
2	Renstra Kementerian Koordinator Bidang Pangan	Ya	Ya	Ya	1	1	1
3	Renstra Kementerian Koperasi	Ya	Ya	Ya	1	1	1
4	RKP Aceh	Ya	Ya	Ya	1	1	1
5	RKP Bali	Ya	Ya	Ya	1	1	1
6	RKP Bengkulu	Ya	Ya	Ya	1	1	1
7	RKP Gorontalo	Ya	Ya	Ya	1	1	1
8	RKP Jawa Tengah	Ya	Ya	Ya	1	1	1
9	RKP Jawa Timur	Ya	Ya	Ya	1	1	1
10	RKP Kalimantan Barat	Ya	Ya	Ya	1	1	1
11	RKP Kalimantan Selatan	Ya	Ya	Ya	1	1	1
12	RKP NTB	Ya	Ya	Ya	1	1	1
13	RKP Sulawesi Barat	Ya	Ya	Tidak	1	0,5	0,5
14	RKP Sulawesi Tenggara	Ya	Tidak	Tidak	1	0	0
15	RPJMD Aceh	Ya	Ya	Ya	1	1	1
16	RPJMD Bangka Belitung	Ya	Ya	Ya	1	1	1
17	RPJMD Banten	Ya	Ya	Ya	1	1	1
18	RPJMD Gorontalo	Ya	Ya	Ya	1	1	1
19	RPJMD Jambi	Ya	Ya	Tidak	1	0,5	0,5
20	RPJMD Jawa Timur	Ya	Ya	Ya	1	1	1
21	RPJMD Kalimantan Selatan	Ya	Ya	Ya	1	1	1
22	RPJMD Kalimantan Tengah	Ya	Ya	Ya	1	1	1
23	RPJMD Kalimantan Utara	Ya	Ya	Ya	1	1	1
24	RPJMD Lampung	Ya	Ya	Ya	1	1	1
25	RPJMD Maluku	Ya	Ya	Ya	1	1	1
26	RPJMD NTB	Ya	Ya	Ya	1	1	1
27	RPJMD NTT	Ya	Ya	Tidak	1	0,5	0,5
28	RPJMD Riau	Ya	Ya	Ya	1	1	1
29	RPJMD Sulawesi Barat	Ya	Ya	Ya	1	1	1
30	RPJMD Sulawesi Selatan	Ya	Ya	Ya	1	1	1
31	RPJMD Sulawesi Tengah	Ya	Ya	Ya	1	1	1
32	RPJMD Sumatera Barat	Ya	Ya	Ya	1	1	1
33	RPJMD Sumatera Selatan	Ya	Ya	Ya	1	1	1
34	RPJMD Sumatera Utara	Ya	Ya	Ya	1	1	1
35	RPJMN	Ya	Ya	Ya	1	1	1
36	RPJPN (dokumen di ttd September 2024)	Ya	Ya	Ya	1	1	1

Sumber: Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-54/02000/PR.620/2026 Tanggal 15 Januari 2026 Hal Nilai Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS) 2025

Lampiran 8 Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) 2025 sebagai Rujukan dalam Penghitungan Realisasi Kinerja Tw III dan IV 2025 Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Deputi Bidang Statistik Produksi



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

Nomor : B-600/02000/PR.613/2025 Jakarta 3 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) set
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB)
Tahun 2025 sebagai Rujukan dalam Penghitungan
Realisasi Kinerja Triwulan III dan IV 2025

Yth. Bapak/Ibu (Daftar Terlampir)
di -
Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh 12 unit kerja di lingkup BPS RI telah berkualitas. Hasil penilaian dapat dilihat pada Lampiran 2.
2. Berdasarkan hasil tersebut, maka seluruh publikasi yang dikoordinasikan dengan 12 unit kerja tersebut dinyatakan berkualitas, baik yang disusun oleh unit kerja, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota.
3. Hasil penilaian ini menjadi rujukan dalam menghitung realisasi kinerja triwulan III dan IV 2025 pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan "Persentase Publikasi/Laporan Statistik yang Berkualitas".
4. Kepala BPS Provinsi agar menyampaikan informasi ini kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Utama,



Pudji Ismartini

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik, sebagai laporan;
2. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, sebagai laporan; dan
3. Inspektur Utama.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSnE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Lanjutan Lampiran 8

-2-

Lampiran I Surat Plt. Sekretaris Utama

Nomor : B-600/02000/PR.613/2025

Tanggal : 3 Oktober 2025

Daftar Pejabat Penerima Surat

1. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
2. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat
3. Direktur Statistik Ketahanan Sosial
4. Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
5. Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
6. Direktur Statistik Industri
7. Direktur Statistik Distribusi
8. Direktur Statistik Harga
9. Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
10. Direktur Neraca Produksi
11. Direktur Neraca Pengeluaran
12. Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik
13. Seluruh Kepala BPS Provinsi



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE/C), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Lanjutan Lampiran 8

-3-

Lampiran II Surat Plt. Sekretaris Utama
 Nomor : B-600/02000/PR.613/2025
 Tanggal : 3 Oktober 2025

Hasil Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025

No	Kode	Nama Unit Kerja	Domain Kualitas Data	Aspek Pemanfaatan Data Statistik	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	4100	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	4.20	3.67	Berkualitas
2	4200	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	4.67	4.33	Berkualitas
3	4300	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	3.64	4.33	Berkualitas
4	5100	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	4.48	3.67	Berkualitas
5	5200	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	4.07	4.00	Berkualitas
6	5300	Direktorat Statistik Industri	4.55	3.67	Berkualitas
7	6100	Direktorat Statistik Distribusi	3.70	4.00	Berkualitas
8	6200	Direktorat Statistik Harga	4.00	3.67	Berkualitas
9	6300	Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	3.42	3.67	Berkualitas
10	7100	Direktorat Neraca Produksi	3.21	3.67	Berkualitas
11	7200	Direktorat Neraca Pengeluaran	4.17	4.00	Berkualitas
12	7300	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	3.50	3.67	Berkualitas



* Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN
 * Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Sumber: Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-600/02000/PR.613/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 sebagai Rujukan dalam Penghitungan Realisasi Kinerja Triwulan III dan IV Tahun 2025

Lampiran 9 Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-237/02000/TS.160/2025 Tanggal 7 Mei 2025 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

Nomor : B-237/02000/TS.160/2025 Jakarta, 7 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral
(EPSS) TA 2025

Yth. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
di-
Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina statistik sektoral dan pembina data statistik. Dalam rangka mengawal perbaikan tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah, BPS telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral untuk mendapatkan *benchmark* mengenai capaian penyelenggaraan statistik sektoral serta perbaikannya pada tahun 2023 dan 2024. BPS terus berkomitmen untuk mendukung upaya penguatan statistik sektoral yang berdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan **dua tahun sekali** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, rencana *Grand Design* RB 2025 – 2045 dan *Roadmap* RB 2025 – 2029, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 **tidak dilaksanakan**.
2. Upaya pembangunan statistik sektoral tahun 2025 dapat difokuskan untuk pembinaan statistik yang lebih intensif dalam rangka perbaikan tata kelola statistik sektoral di masing-masing Instansi Pemerintah berdasarkan rekomendasi hasil EPSS 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.

Lanjutan Lampiran 9

-2-

3. Instansi Pemerintah yang memiliki target capaian kinerja pada tahun 2025 dan berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS 2024 sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai pemenuhan pengukuran kinerja.
4. Sehubungan dengan angka 3, bagi Instansi Pemerintah yang baru terbentuk atau mengalami perubahan tugas dan fungsi di periode 2025 – 2029, maka pemenuhan target 2025 diserahkan ke masing-masing instansi pemerintah dan dapat mempertimbangkan hasil EPSS dari instansi sebelumnya dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing Instansi Pemerintah saat ini dalam pemenuhan target. Penilaian EPSS periode selanjutnya akan tetap fokus pada bukti dukung yang disampaikan saat itu, **bukan** pada hasil instansi sebelumnya. Informasi lebih lanjut terkait pengaturan ini akan disampaikan kemudian setelah berkoodinasi dengan Kementerian PANRB dan *stakeholders* lainnya.
5. Berbagai bentuk penilaian yang tidak sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 dan bukan hasil resmi BPS diluar tanggung jawab BPS.
6. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama agar menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan EPSS 2025 kepada Tim Pembina Statistik Sektorral masing-masing.
7. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdri. Dina Rizkiani (WA. 0812-9134-7900) atau Sdri. 'Aisyah Durrotussa'adah (WA. 0813-1945-6643).**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Utama,

Moh Edy Mahmud

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan);
2. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan); dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Lampiran 10 Daftar Kementerian/Lembaga (K/L) Mitra Unit Kerja Deputi Bidang Statistik Produksi Target Pembinaan Statistik Sektorial Tahun 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id

Nomor : B-11/03000/ES/2025 Jakarta, 30 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penyampaian lokus pembinaan statistik sektorial

Yth. Para Deputi BPS
di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan statistik sektorial Tahun 2025 dan berdasarkan rapat antar eselon 1 pada tanggal 2 Januari 2025, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan susunan Kabinet Merah Putih 2024-2029, maka telah dilakukan peninjauan dan penyesuaian alokasi lokus pembinaan statistik sektorial tahun 2025 sebagaimana tertera pada Lampiran Surat;
2. Alokasi lokus pembinaan sebagaimana pada angka (1) akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPS;
3. Bagi unit kerja eselon 1 yang belum melakukan pembentukan Tim Pembina Statistik Sektorial 2025, mohon segera dapat membentuk Tim Pembina Statistik Sektorial 2025 sebagaimana yang disebutkan pada Surat Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Nomor B-159/03000/PS.200/2024 perihal Tindak Lanjut Pelatihan Pembina Statistik Sektorial 2024; dan
4. Mohon informasi ini dapat disampaikan kepada para pimpinan tinggi pratama di lingkup kedeputian masing-masing.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Plt. Deputi Bidang Metodologi
dan Informasi Statistik

Puji Ismartini

Tembusan:

1. Plt. Kepala BPS;
2. Plt. Sekretaris Utama;
3. Inspektur Utama.

Lanjutan Lampiran 10

- 2 -

Lampiran Surat
 Nomor : B-11/03000/ES/2025
 Tanggal : 30 Januari 2025

ALOKASI LOKUS PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL

No	Direktorat BPS	Kementerian/Lembaga
1	3100 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Badan Informasi Geospasial
2	3100 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
3	3100 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Badan Standardisasi Nasional
4	3100 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
5	3100 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
6	3100 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Badan Pengawas Obat dan Makanan
7	3200 Direktorat Diseminasi Statistik	Arsip Nasional Republik Indonesia
8	3200 Direktorat Diseminasi Statistik	Lembaga Administrasi Negara
9	3200 Direktorat Diseminasi Statistik	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
10	3200 Direktorat Diseminasi Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
11	3200 Direktorat Diseminasi Statistik	Kementerian Agama
12	3200 Direktorat Diseminasi Statistik	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
13	3300 Direktorat Sistem Informasi Statistik	Ombudsman Republik Indonesia
14	3300 Direktorat Sistem Informasi Statistik	Badan Intelijen Negara
15	3300 Direktorat Sistem Informasi Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
16	3300 Direktorat Sistem Informasi Statistik	Badan Pengawas Pemilihan Umum
17	3300 Direktorat Sistem Informasi Statistik	Kementerian Pertahanan
18	3300 Direktorat Sistem Informasi Statistik	Badan Siber dan Sandi Negara
19	4100 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
20	4100 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
21	4100 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kementerian Dalam Negeri
22	4100 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan
23	4100 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kementerian Luar Negeri
24	4100 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Lanjutan Lampiran 10

- 3 -

No	Direktorat BPS	Kementerian/Lembaga
25	4200 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Kesehatan
26	4200 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
27	4200 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
28	4200 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29	4200 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Kebudayaan
30	4200 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
31	4200 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
32	4300 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Kejaksaan Agung Republik Indonesia
33	4300 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Kementerian Sosial
34	4300 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
35	4300 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Kementerian Transmigrasi
36	4300 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Kepolisian Negara Republik Indonesia
37	4300 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Komisi Pemberantasan Korupsi
38	5100 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
39	5100 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Badan Pangan Nasional
40	5100 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Badan Pemeriksa Keuangan
41	5100 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kementerian Pertanian
42	5100 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Badan Keamanan Laut
43	5100 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
44	5100 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
45	5200 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
46	5200 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Kementerian Kehutanan
47	5200 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
48	5200 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
49	5200 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
50	5200 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Lanjutan Lampiran 10

- 4 -

No	Direktorat BPS	Kementerian/Lembaga
51	5300 Direktorat Statistik Industri	Badan Pengusahaan Batam/Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
52	5300 Direktorat Statistik Industri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
53	5300 Direktorat Statistik Industri	Kementerian Pekerjaan Umum
54	5300 Direktorat Statistik Industri	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
55	5300 Direktorat Statistik Industri	Kementerian Perindustrian
56	5300 Direktorat Statistik Industri	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
57	6100 Direktorat Statistik Distribusi	Badan Narkotika Nasional
58	6100 Direktorat Statistik Distribusi	Kementerian Koperasi
59	6100 Direktorat Statistik Distribusi	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
60	6100 Direktorat Statistik Distribusi	Kementerian Perhubungan
61	6100 Direktorat Statistik Distribusi	Kementerian Keuangan
62	6100 Direktorat Statistik Distribusi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
63	6200 Direktorat Statistik Harga	Badan Kepegawaian Negara
64	6200 Direktorat Statistik Harga	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
65	6200 Direktorat Statistik Harga	Kementerian Koordinator Bidang Pangan
66	6200 Direktorat Statistik Harga	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
67	6200 Direktorat Statistik Harga	Kementerian Perdagangan
68	6200 Direktorat Statistik Harga	Badan Riset dan Inovasi Nasional
69	6300 Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
70	6300 Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Kementerian Komunikasi dan Digital
71	6300 Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
72	6300 Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
73	6300 Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
74	6300 Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
75	7100 Direktorat Neraca Produksi	Dewan Ketahanan Nasional
76	7100 Direktorat Neraca Produksi	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
77	7100 Direktorat Neraca Produksi	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
78	7100 Direktorat Neraca Produksi	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
79	7100 Direktorat Neraca Produksi	Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lanjutan Lampiran 10

- 5 -

No	Direktorat BPS	Kementerian/Lembaga
80	7100 Direktorat Neraca Produksi	Komisi Pemilihan Umum
81	7200 Direktorat Neraca Pengeluaran	Kementerian Pemuda dan Olahraga
82	7200 Direktorat Neraca Pengeluaran	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
83	7200 Direktorat Neraca Pengeluaran	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
84	7200 Direktorat Neraca Pengeluaran	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
85	7200 Direktorat Neraca Pengeluaran	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
86	7200 Direktorat Neraca Pengeluaran	Kementerian Sekretariat Negara
87	7300 Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Komisi Yudisial Republik Indonesia
88	7300 Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Kementerian Hak Asasi Manusia
89	7300 Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Kementerian Hukum
90	7300 Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
91	7300 Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan
92	7300 Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan



Plt. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik,

Pudji Ismartini

Lanjutan Lampiran 10

No.	K/L Mitra	Direktorat Pengampu
(1)	(2)	(3)
1	Kementerian Pertanian	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
2	Badan Pangan Nasional	
3	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	
4	Badan Pemeriksa Keuangan	
5	Badan Keamanan Laut	
6	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	
7	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
9	Kementerian Kehutanan	
10	Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH	
11	Majelis Permusyawaratan Rakyat	
12	Dewan Perwakilan Rakyat	
13	Dewan Perwakilan Daerah	Direktorat Statistik Industri
14	Kementerian Pekerjaan Umum	
15	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	
16	Kementerian Perindustrian	
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
18	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Badan Pengusahaan Batam	
19	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	

Sumber: Surat Plt. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Nomor B-11/03000/ES/2025 Tanggal 30 Januari 2025 Perihal Penyampaian Lokus Pembinaan Statistik Sektoral

Lampiran 11 Keputusan Kepala BPS Nomor 741 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 741 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada 77 (*tujuh puluh tujuh*) lokus Instansi Pusat dan 509 (*lima ratus sembilan*) lokus Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

KEDUA : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Lanjutan Lampiran 11

- 2 -

- KETIGA : Menghimbau kepada pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2023

PI-KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI



Lanjutan Lampiran 11

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 741 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL PADA INSTANSI PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT NILAI
INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS) DAN PREDIKAT EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (EPSS) TAHUN 2023

A. PREDIKAT EPSS DAN NILAI IPS PADA INSTANSI PUSAT

1. Kementerian

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kementerian Agama	1,42	Kurang
2	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1,48	Kurang
3	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2,97	Baik
4	Kementerian Dalam Negeri	2,94	Baik
5	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1,74	Kurang
6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2,41	Cukup
7	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,21	Baik
8	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	2,14	Cukup
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2,68	Baik
10	Kementerian Kesehatan	2,27	Cukup
11	Kementerian Ketenagakerjaan	2,94	Baik
12	Kementerian Keuangan	1,49	Kurang
13	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2,87	Baik
14	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	1,17	Kurang
15	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1,97	Cukup
16	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1,97	Cukup
17	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2,05	Cukup
18	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1,84	Cukup
19	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2,66	Baik
20	Kementerian Luar Negeri	2,05	Cukup
21	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2,77	Baik
22	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3,36	Baik

Lanjutan Lampiran 11

- 2 -

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
23	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,74	Baik
24	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2,13	Cukup
25	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1,21	Kurang
26	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	2,33	Cukup
27	Kementerian Perdagangan	2,02	Cukup
28	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	1,46	Kurang
29	Kementerian Perhubungan	2,84	Baik
30	Kementerian Perindustrian	2,86	Baik
31	Kementerian Pertahanan	1,84	Cukup
32	Kementerian Pertanian	3,12	Baik
33	Kementerian Sekretariat Negara	1,60	Kurang
34	Kementerian Sosial	3,43	Baik

2. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Arsip Nasional Republik Indonesia	1,46	Kurang
2	Badan Informasi Geospasial	2,26	Cukup
3	Badan Keamanan Laut	2,17	Cukup
4	Badan Kepegawaian Negara	2,53	Cukup
5	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3,63	Sangat Baik
6	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	3,03	Baik
7	Badan Narkotika Nasional	1,81	Cukup
8	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2,30	Cukup
9	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1,60	Kurang
10	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2,66	Baik
11	Badan Pangan Nasional	2,65	Baik
12	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1,10	Kurang
13	Badan Pengawas Obat dan Makanan	3,04	Baik
14	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2,35	Cukup
15	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	1,68	Kurang
16	Badan Pusat Statistik	4,03	Sangat Baik
17	Badan Riset dan Inovasi Nasional	2,96	Baik
18	Badan Standardisasi Nasional	2,04	Cukup
19	Lembaga Administrasi Negara	2,22	Cukup
20	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2,79	Baik
21	Lembaga Ketahanan Nasional	2,00	Cukup
22	Perpustakaan Nasional	3,52	Sangat Baik

Lanjutan Lampiran 11

- 3 -

3. Lembaga Penegak Hukum

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kecjaksaan Agung Republik Indonesia	1,76	Kurang
2	Kepolisian Republik Indonesia	1,43	Kurang

4. Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Badan Pemeriksa Keuangan	3,01	Baik
2	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	1,77	Kurang
3	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	1,48	Kurang
4	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	1,51	Kurang
5	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	1,96	Cukup
6	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	1,15	Kurang

5. Lembaga Penyiaran Publik

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Radio Republik Indonesia	1,23	Kurang
2	Televisi Republik Indonesia	1,28	Kurang

6. Lembaga Non Struktural

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1,46	Kurang
2	Badan Pengawas Pemilihan Umum	2,00	Cukup
3	Badan Pengusahaan Batam/Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	2,22	Cukup
4	Komisi Aparatur Sipil Negara	1,66	Kurang
5	Komisi Pemberantasan Korupsi	2,77	Baik
6	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1,67	Kurang
7	Ombudsman Republik Indonesia	1,87	Cukup
8	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	2,15	Cukup
9	Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1,62	Kurang
10	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	2,08	Cukup
11	Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1,80	Cukup

Keterangan: warna highlight biru merupakan nilai IPS tahun 2023 pada K/L mitra DBSP (alokasi baru)

Lampiran 12 Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorale pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 605 TAHUN 2024
TENTANG**

**HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorale, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorale pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorale (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorale pada 83 (*delapan puluh tiga*) lokus Instansi Pusat dan 534 (*lima ratus tiga puluh empat*) lokus Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorale.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorale sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Lanjutan Lampiran 12

- 2 -

KETIGA : Menghimbau kepada pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2024

Pt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADNINGGAR WIDYASANTI



Lanjutan Lampiran 12

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 605 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL PADA INSTANSI PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT NILAI
INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS) DAN PREDIKAT EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (EPSS) TAHUN 2024

A. PREDIKAT EPSS DAN NILAI IPS PADA INSTANSI PUSAT

1. Kementerian

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kementerian Agama	2.72	Baik
2	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2.47	Cukup
3	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2.69	Baik
4	Kementerian Dalam Negeri	3.28	Baik
5	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2.98	Baik
6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2.08	Cukup
7	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3.39	Baik
8	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	2.28	Cukup
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2.73	Baik
10	Kementerian Kesehatan	3.07	Baik
11	Kementerian Ketenagakerjaan	3.18	Baik
12	Kementerian Keuangan	2.39	Cukup
13	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3.37	Baik
14	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	2.57	Cukup
15	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2.99	Baik
16	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2.45	Cukup
17	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2.39	Cukup
18	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2.62	Baik
19	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.68	Baik
20	Kementerian Luar Negeri	2.68	Baik
21	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.42	Baik
22	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.49	Baik
23	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.76	Baik
24	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2.69	Baik
25	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2.31	Cukup

Lanjutan Lampiran 12

- 4 -

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
26	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	2.41	Cukup
27	Kementerian Perdagangan	3.02	Baik
28	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	2.23	Cukup
29	Kementerian Perhubungan	2.98	Baik
30	Kementerian Perindustrian	3.05	Baik
31	Kementerian Pertahanan	2.14	Cukup
32	Kementerian Pertanian	3.67	Sangat Baik
33	Kementerian Sekretariat Negara	2.76	Baik
34	Kementerian Sosial	2.63	Baik

2. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Arsip Nasional Republik Indonesia	2.18	Cukup
2	Badan Informasi Geospasial	2.68	Baik
3	Badan Keamanan Laut	2.52	Cukup
4	Badan Kepegawaian Negara	2.76	Baik
5	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3.68	Sangat Baik
6	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	3.29	Baik
7	Badan Narkotika Nasional	2.39	Cukup
8	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2.59	Cukup
9	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2.64	Baik
10	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan / Basarnas	2.95	Baik
11	Badan Pangan Nasional	2.83	Baik
12	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2.61	Baik
13	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1.85	Cukup
14	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2.60	Baik
15	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	2.43	Cukup
16	Badan Pusat Statistik	4.33	Memuaskan
17	Badan Riset dan Inovasi Nasional	3.14	Baik
18	Badan Siber dan Sandi Negara	2.31	Cukup
19	Badan Standardisasi Nasional	2.48	Cukup
20	Lembaga Administrasi Negara	3.35	Baik
21	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3.38	Baik
22	Lembaga Ketahanan Nasional	2.29	Cukup
23	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	3.38	Baik

Lanjutan Lampiran 12

- 5 -

3. Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Lainnya

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Badan Intelijen Negara	2.72	Baik
2	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1.96	Cukup
3	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2.04	Cukup
4	Badan Pemeriksa Keuangan	2.98	Baik
5	Badan Pengawas Pemilihan Umum	2.61	Baik
6	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam / Badan Pengusahaan Batam	2.74	Baik
7	Dewan Ketahanan Nasional	2.69	Baik
8	Dewan Perwakilan Daerah	1.90	Cukup
9	Dewan Perwakilan Rakyat	2.57	Cukup
10	Kejaksaan Republik Indonesia	2.57	Cukup
11	Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.58	Cukup
12	Komisi Aparatur Sipil Negara	1.98	Cukup
13	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1.82	Cukup
14	Komisi Pemberantasan Korupsi	3.05	Baik
15	Komisi Pemilihan Umum	1.96	Cukup
16	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1.96	Cukup
17	Komisi Yudisial	2.10	Cukup
18	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1.86	Cukup
19	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1.49	Kurang
20	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1.83	Cukup
21	Mahkamah Agung	2.03	Cukup
22	Mahkamah Konstitusi	2.03	Cukup
23	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1.67	Kurang
24	Ombudsman Republik Indonesia	2.26	Cukup
25	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2.65	Baik
26	Sekretariat Kabinet	2.37	Cukup

B. PREDIKAT EPSS DAN NILAI IPS PADA PEMERINTAH DAERAH

1. Pemerintah Provinsi

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemerintah Aceh	2.22	Cukup
2	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1.94	Cukup
3	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	2.87	Baik
4	Pemerintah Provinsi Riau	2.73	Baik
5	Pemerintah Provinsi Jambi	2.68	Baik
6	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	2.72	Baik
7	Pemerintah Provinsi Bengkulu	2.87	Baik
8	Pemerintah Provinsi Lampung	2.62	Baik
9	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.78	Baik
10	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2.61	Baik
11	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	3.48	Baik

Keterangan: warna highlight kuning merupakan nilai IPS tahun 2024 pada K/L mitra DBSP (alokasi baru)

Lampiran 13 Daftar Prestasi/Penghargaan Unit Kerja Deputi Bidang Statistik Produksi Menurut Unit Kerja Eselon II Tahun 2025

No.	Daftar Prestasi/Penghargaan	Instansi Pemberi	Unit Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Kategori Unit Kerja Eselon II BPS Pusat (Terbaik III)	BPS	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
2	Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025 dinyatakan Berkualitas	BPS	
3	Pengelolaan Arsiparis Tahun 2025 dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan)	BPS	
4	Dukungan dalam Penyediaan Data Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Selama Tahun 2025	Kementerian Pertanian	
5	Kontribusi Dalam Penyediaan Data Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Bulanan Untuk Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025	Badan Pangan Nasional	
6	Dukungan dalam Penyediaan Data terkait Perkembangan Gula di Indonesia Selama Tahun 2025	Asosiasi Gula Indonesia	
7	Dukungan dalam Penyediaan Data terkait Perkembangan Teh di Indonesia Selama Tahun 2025	Asosiasi Teh Indonesia	
8	Pengelolaan Arsiparis Tahun 2025 dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan)	BPS	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
9	Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025 dinyatakan Berkualitas	BPS	
10	Dedikasi dan Kontribusi dalam Mendukung Pelaksanaan EPSS BPS pada Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Unit Kerja Eselon II BPS Pusat	BPS	
11	Insan Statistik Teladan (IST) Tahap 1 Tahun 2025 (Tingkat Direktorat)	BPS	
12	Insan Statistik Teladan (IST) Tahap 2 Tahun 2025 (Tingkat Deputi Bidang Statistik Produksi)	BPS	
13	Kontribusi dan Dukungan dalam Penyediaan Data Pemotongan Ternak untuk Proyeksi Neraca Pangan Nasional Selama Tahun 2025	Kementerian Pertanian	

No.	Daftar Prestasi/Penghargaan	Instansi Pemberi	Unit Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Kategori Unit Kerja Eselon II BPS Pusat (Terbaik III)	BPS	Direktorat Statistik Industri
15	Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Kategori Unit Kerja Eselon II BPS Pusat (Tertinggi)	BPS	
16	Pengelolaan Arsiparis Tahun 2025 dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan)	BPS	

Lampiran 14 Daftar Inovasi Unit Kerja Deputi Bidang Statistik Produksi Menurut Unit Kerja Eselon II Tahun 2025

No.	Daftar Inovasi	Jenis Inovasi	Unit Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kerangka Sampel Area Padi (KSA Padi)	Aplikasi	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (STPHP)
2	Sedia Data Perusahaan Perkebunan melalui Aplikasi SKB Online (SEDAPP Online)	Aplikasi	
3	Moda Pendataan CAPI (<i>paperless</i>), yaitu: a) Sistem Informasi Pendataan Perusahaan Kehutanan (SIUTAN) b) FASIH Survei Kesejahteraan Petani (SKP) Tahun 2025	Aplikasi	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (SP2K)
4	<i>Agriculture Statistics</i>	<i>Sharing Knowledge</i>	
5	Seminar Multilateral Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	<i>Sharing Knowledge</i>	
6	Tesis S2 di <i>Nanyang Technological University</i> (NTU)	<i>Sharing Knowledge</i>	
7	Investasi Emas oleh Tim Antam	<i>Sharing Knowledge</i>	
8	Moda Pendataan CAPI dan CAWI (<i>paperless</i>) dalam kegiatan: a) Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur (STPIM) b) Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Tahunan c) Survei Tahunan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi d) Survei Tahunan Perusahaan Panas Bumi e) Survei Tahunan Perusahaan Gas f) Survei Konstruksi Tahunan (SKTH) g) Survei Konstruksi Triwulanan (SKTR)	Aplikasi	Direktorat Statistik Industri (DSI)
9	<i>Podcast</i> “Bisik Data: Bincang Statistik Industri Kita”	<i>Sharing Knowledge</i>	
10	Pelatihan Tableau dan <i>Exploring String Matching Methods</i>	<i>Sharing Knowledge</i>	
11	<i>Workshop</i> Refleksi Diri untuk Membangun Soliditas Kerja: <i>River of Life</i>	<i>Sharing Knowledge</i>	
12	Program Pelatihan Barista	<i>Sharing Knowledge</i>	

Lampiran 15 Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Unit Kerja Deputi Bidang Statistik Produksi Tahun 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	Pagu yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi
Sasaran 1. Peningkatan Pemanfaatan Data dan Insight Statistik Produksi yang Berkualitas				106,69	2.179.106.000	2.035.784.901	93,42	1,14
Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi	Persen	83,95	89,57	106,69	2.179.106.000	2.035.784.901	93,42	1,14
Sasaran 2. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi yang Berkualitas				100,00	131.608.000	74.261.790	56,42	1,77
Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	16,32	16,32	100,00	131.608.000	74.261.790	56,42	1,77
Total				103,35	2.310.714.000	2.110.046.691	91,32	1,13

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr Sutomo No 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046

E-mail : bpshq@bps.go.id Homepage : <http://www.bps.go.id>